

Laporan Penelitian Individual

**Ormas Islam dan Isu Keislaman
di Media Massa Tahun 2012**



PENELITI:

Dr. PHIL KHOIRUL NIAM
NIP. 197007251996031004

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor
IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/292/P/2013**

SURABAYA
2013

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. a. Judul Penelitian : Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa Tahun 2012
- b. Bidang Ilmu :
 c. Kategori : Individu
- 2 Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap/NIP. : DR. PHIL KHOIRUL NIAM
NIP. 197007251996031004
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Golongan : III (Lektor)
 - d. Jabatan Fungsional : Dosen
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - g. Lembaga Penelitian : IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - h. Bidang Ilmu yang Diteliti :
3. Jumlah Peneliti : 1 orang
4. Lokasi Penelitian :
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan
 - a. Nama Instansi : IAIN Sunan Ampel
 - b. Alamat : Jl. A. Yani 117 Surabaya
6. Lama Penelitian : 3 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
(Dari Dana DIPA BLU 2013)

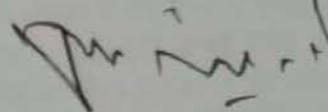
Surabaya, Desember 2013

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian



Dr. ABDUE CHALIK, M.Ag
NIP. 197306272000031002

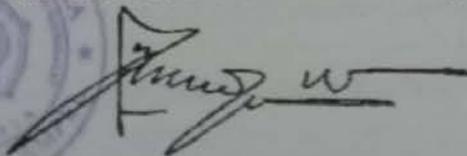
Peneliti



DR. PHIL KHOIRUL NIAM
NIP. 197007251996031004



Menyetujui
Ketua LPPM IAIN Sunan Ampel



DR. H. MUH. FATHONI HASYIM, M.Ag
NIP.195601101987031001

Abstract

The research aims to present Islamic issues reported by mass media throughout 2012, especially concerning to Islam and violence, law and politic, any Islamic issues other than two aforementioned components as well; to identify the trending Islamic issues brought up by Islamic social organization (ISO) in the mass media during 2012 relating to Islamic social organization; ISO and the legal and politic issues; and ISO with other than two mentioned issues.

The focus of the research is on two main problem statements (1) how is the Islamic issues reported in mass media in 2012? The fact that is intended to study from this research question is the clarification of Islamic issues from the point of violence, law and politic, and other related issues with ISO and non-ISO agent; (2) how is the trending Islamic issues exposed in the mass media in 2012. The expected description from this question is the trending activities of ISO reported by the mass media in 2012 and its implication towards Islamic issues.

The methodology applied in this research is the study on media text through content analysis. The analysis focuses on the Islamic issues with ISO and non-ISO and on each their agents is classified into topics relate to violence, law and politic, and the other issues. The object of the study is news about Islam reported in Koran Kompas, Jawa Pos, and Surya during 2012. The data is collected by Institute for Religious and Social Studies (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya in the form of news clipping. The data is analyzed through certain steps: news encoded, classified and processed quantitatively to get frequent themes, and analyzed and described using content analysis.

The study shows that (1) there are 741 new relate to Islam reported by Koran Kompas, Jawa Pos, and Surya during 2012 with details of 198 within first period (January-April), 262 within second period (May-August), and 281 within third period (September-December). The ISO relating issues consist of 315 titles and 426 titles concerning to Non-ISO; (2) during 2012, there are 47.6% issues dealing with violence, 42.2% with law and politic, and only 10.2% with the other Islamic issues. On the other hand, there are Non-ISO reported as much as 58.7%, on the other issues, 19.0% on violence and 22.3% on legal and politic issues. These trending issues show that Islamic Social Organization have more chances to induce legal and politic process, and violence. Therefore, focusing on Islamic social organization as partner to build civilization is needed.

Keywords: Islamic social organization, mass media, Islam, violence, law and politic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa pada tahun 2012, utamanya yang terkait dengan Islam dan kekerasan, hukum dan politik, serta isu keislaman lainnya yang tidak termuat dalam dua komponen topik sebelumnya; mengetahui trend Isu keislaman yang diperankan oleh Ormas Islam dalam pemberitaan media massa pada tahun 2012 yang menyangkut Ormas Islam kaitannya dengan isu kekerasan; ormas Islam kaitannya dengan Isu hukum dan politik; serta Ormas Islam yang terkait dengan isu selain kedua isu sebelumnya.

Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan (1) Bagaimana pemberitaan isu keislaman di media massa tahun 2012? Fakta yang ingin diperoleh dari pertanyaan penelitian ini adalah adanya klasifikasi isu-isu keislaman dari sudut kekerasan, hukum dan politik, serta isu keislaman lainnya yang terkait dengan Ormas Islam dan pelaku non-Ormas Islam (lainnya). (2) Bagaimana trend Isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa pada tahun 2012. Gambaran yang ingin diperoleh dari pertanyaan ini adalah trend aktifitas Ormas Islam yang dimuat oleh media massa pada tahun 2012 dan implikasinya terhadap isu keislaman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian teks media dalam bentuk *content analysis*. Analisis teks media ini diklasifikasi pada; Isu keislaman yang menyangkut ormas Islam dan non-ormas Islam, dan pada masing-masing pelaku isu (ormas, non-ormas Islam) diklasifikasi lagi ke topik yang berkaitan dengan kekerasan, hukum dan politik, serta isu lainnya. Sedangkan yang menjadi obyek kajian teks media adalah berita-berita yang terkait Islam yang dimuat dalam Koran Kompas, Jawa Pos, dan Surya selama tahun 2012. Data tersebut merupakan kliping Koran yang dimiliki oleh Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel. Data dianalisa melalui tahapan; pengkodean berita, klasifikasi dan pengolahan data secara kuantitatif untuk mendapatkan frekwensi tema, serta analisa dan deskripsi atas data terolah.

Dari hasil penelitian ini diperoleh (1) Ada 741 berita terkait islam yang diliput oleh Koran Kompas, Jawa Pos dan Surya selama tahun 2012 dengan rincian sebesar 198 terjadi pada periode pertama (Januari-April), sebesar 262 terjadi pada periode kedua (Mei-Agustus), dan sebesar 281 terjadi pada periode ketiga (September-Desember). Isu yang terkait Ormas Islam sebesar 315 judul dan 426 judul berita terkait non-ormas Islam; (2) Selama tahun 2012, isu-isu yang terkait dengan kekerasan (47.6%), hukum dan politik (42.2%) banyak diperankan oleh ormas Islam—dengan isu selain tema tersebut yang hanya 10.2%. Sedangkan non-ormas Islam lebih banyak pada isu-isu lainnya 58.7% daripada isu kekerasan (19.0%) dan isu hukum dan politik (22.3%). Trend isu ini menunjukkan bahwa Ormas Islam memiliki kans besar dalam mendorong proses hukum dan politik serta kekerasan. Karenanya, membidik ormas Islam sebagai mitra dalam membangun peradaban dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Kata kunci: Ormas Islam, media massa, Islam kekerasan, hukum dan politik.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pengumpulan Data dan Sumber Kajian	26
3. Analisa Data	27
G. Sistematika Pembahasan	29
DINAMIKA ORMAS ISLAM	31
A. Ormas Islam di Indonesia	33
B. Kecenderungan Ideologi Ormas Islam	52
C. Ormas Islam dan UU Ormas	57
ISU KEISLAMAN DI MEDIA MASSA TAHUN 2012	68
A. Isu Keislaman Periode Januari – April 2012	72
1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam	81
2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)	87
3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa	93
B. Isu Keislaman Periode Mei – Agustus 2012	95
1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam	98
2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)	106
3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa	112
C. Isu Keislaman Periode September – Desember 2012	113
1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam	117
2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)	123
3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa	131
D. Isu Keislaman di Media Massa Selama Tahun 2012	133
1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam	134
2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)	136
3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa	137
TREND ISU KEISLAMAN DAN ORMAS ISLAM TAHUN 2012	139
A. Potensi Kekerasan dalam Ormas Islam	140

B. Ormas Islam dalam Pusaran Dinamika Politik	142
C. Pelaku Non-Ormas Islam dalam Berbagai Ekspresi Keislaman.....	143
PENUTUP	146
A. Simpulan.....	146
B. Implikasi	147
DAFTAR REFERENSI	148

Daftar Tabel

Tabel 1	: Statistik Pemberitaan Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa Tahun 2012	69
Tabel 2	: Isu Keislaman pada Januari - April 2012	73
Tabel 3	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Januari - April 2012	82
Tabel 4	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Januari - April 2012	88
Tabel 5	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Januari - April 2012	93
Tabel 6	: Isu Keislaman pada Mei - Agustus 2012	96
Tabel 7	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Mei - Agustus 2012	98
Tabel 8	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Mei - Agustus 2012	106
Tabel 9	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Mei - Agustus 2012	112
Tabel 10	: Isu Keislaman pada September - Desember 2012	113
Tabel 11	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada September - Desember 2012	117
Tabel 12	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada September - Desember 2012	124
Tabel 13	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada September - Desember 2012	132
Tabel 14	: Isu Keislaman pada Tahun 2012	133
Tabel 15	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Tahun 2012	135
Tabel 16	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Tahun 2012	136
Tabel 17	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Tahun 2012	137
Tabel 18	: Perbandingan Proporsi Berita Keislaman 2012	140
Tabel 19	: Perbandingan Topik Berita Ormas Islam 2012	141
Tabel 20	: Perbandingan Topik Berita Non-Ormas Islam 2012	144

Daftar Bagan

Bagan 1	: Isu Keislaman pada Januari - April 2012	80
Bagan 2	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Januari - April 2012	87
Bagan 3	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Januari - April 2012	92
Bagan 4	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Januari - April 2012	94
Bagan 5	: Isu Keislaman pada Mei - Agustus 2012	97
Bagan 6	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Mei - Agustus 2012	105
Bagan 7	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Mei - Agustus 2012	111
Bagan 8	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Mei - Agustus 2012	113
Bagan 9	: Isu Keislaman pada September - Desember 2012	116
Bagan 10	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada September - Desember 2012	123
Bagan 11	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada September - Desember 2012	131
Bagan 12	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada September - Desember 2012	132
Bagan 13	: Isu Keislaman pada Tahun 2012	134
Bagan 14	: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Tahun 2012	135
Bagan 15	: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Tahun 2012	137
Bagan 16	: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Tahun 2012	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berbasis Agama, utamanya Islam, amatlah banyak. Keberadaan mereka merupakan faktor pendorong dalam memajukan perkembangan Islam di Nusantara ini. Setiap Ormas memiliki pengikut-pengikut tertentu dan diantara sekian pengikutnya ada yang sangat militan, namun ada pula yang biasa-biasa saja. Tentu kondisi ini juga mempengaruhi berbagai aktifitas-aktifitas yang dijalankan oleh ormas tersebut.

Disisi lain keberadaan ormas dengan militansi yang ditunjukkan oleh pengikutnya, juga memberikan implikasi lain, manakala mereka bertemu dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda—yang ditunjukkan oleh kelompok ormas lain. Bahkan tidak jarang, juga terjadi bentrok antar pengikut ormas.

Kenyataan diatas menunjukkan betapa ormas dengan segala doktrinnya memiliki dua sisi yang sulit untuk dipisahkan. Doktrin-doktrin ormas—utamanya yang berbasis keagamaan—biasanya muncul akibat penafsiran atas ajaran agama yang berbeda-beda. Tak dapat dipungkiri, kenyataan selanjutnya yang terjadi adalah perbedaan tafsir ini kemudian menjadi penyulut kekerasan atas nama agama.

Selain efek kekerasan, kehendak ormas yang senantiasa berusaha untuk memperluas jaringan, keanggotaan dan pencapaian sosial politik tertentu juga mendorong mereka untuk turut berkontestasi pada level sosial yang lebih luas.

Perluasan jaringan menuntut ormas untuk selalu beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan kelompok lain. Model adaptasi yang demikian ini pada bagian-bagian tertentu juga sering menimbulkan pertentangan internal yang ujung-ujungnya dapat memecah-belah keberadaan ormas tersebut. Friksi-friksi internal ini umumnya juga ditimbulkan oleh pertentangan dan perbedaan pemahaman terhadap visi dan arah tujuan organisasi tersebut.

Keanggotaan juga merupakan problem lain bagi ormas. Keinginan untuk selalu menambah anggota juga dapat menimbulkan bentrok kepentingan dengan berbagai pihak. Model yang demikian ini pada akhirnya mendorong ormas untuk selalu mencari berbagai cara guna meningkatkan jumlah keanggotaannya.

Senada dengan hal diatas, kecenderungan ormas yang berkeinginan untuk bergandeng dan mengarus pada kekuasaan juga mendorong pada tingkat pragmatism tersendiri. Harus diakui, tak ada satupun entitas yang tidak menginginkan untuk tidak dekat dengan kekuasaan, lebih jauh mereka juga menginginkan untuk menduduki posisi kekuasaan tersebut. Dengan begitu, segala hal positif dan yang menjadi cita-citanya dapat tersalurkan dan terfasilitasi.

Kenyataan-kenyataan diatas, tentu berimplikasi munculnya berbagai dinamika berorganisasi dan bermasyarakat yang diperankan oleh ormas. Tak

jarang hal seperti ini menimbulkan konflik tersendiri, sehingga memunculkan berbagai pertikaian baik yang secara terbuka dalam bentuk kekerasan fisik maupun yang secara tersamar dalam bentuk pertengkaran politik. Kekerasan-kekerasan yang demikian umumnya dipicu oleh perbedaan-perbedaan kepentingan dan bertemunya perbedaan tersebut dalam satu arena. Benturan pun tak dapat dielakkan.

Motivasi berbagai benturan tersebut tak lain adalah dipicu oleh keinginan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ormas sebagai tujuan organisasinya.

Kekerasan yang termotivasi oleh agama memang bukanlah sesuatu hal baru. Setiap agama memiliki konsep keyakinan dan konsep mempertahankan keyakinannya. Pada tataran praktis seringkali keyakinan ini yang selanjutnya mendorong umat beragama melakukan tindakan-tindakan yang bahkan melampaui batas kewenangannya. Semuanya dilakukan atas nama kebenaran agama.

Kekerasan dan agama merupakan sesuatu yang amat dekat. Kedekatan dua hal ini dapat disimak dari banyaknya pemberitaan mengenai penganut-penganut agama yang dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agamanya.

Dekatnya kekerasan dan agama juga dipicu oleh semangat penegakan ajaran agama. Sehingga hal-hal yang dianggap melenceng, perlu untuk diluruskan dengan mengatasnamakan agama. Tidak jarang pengembalian perilaku kepada ajaran agama ini juga diwarnai dengan sikap yang keras.

Agama memang menjadi magnet tersendiri, tatkala ia bersanding dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajarannya. Kekerasan adalah hal yang berbanding berbalik dengan khotbah para agamawan. Hal inilah yang dianggap sebagai sesuatu yang menarik oleh media, sehingga mereka merasa perlu untuk mempublikasikannya.

Ketertarikan media berkaitan dengan kekerasan dan agama ini selanjutnya memberikan dampak yang cukup luas bagi masyarakat. Pers dengan segala atribut kebebasannya memberikan informasi terhadap masyarakat. Kenyataan ini juga tidak jarang menimbulkan kejadian-kejadian baru sebagai reaksi atas berita yang dimuat oleh media massa. Adakalanya reaksi tersebut ditunjukkan dengan tindakan menyerang balik terhadap pers. Ada juga yang kemudian melakukan boikot pers. Kebebasan pers perlu kiranya diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers.¹

Ya, media memang menjadi salah satu alat yang cukup baik untuk mendiseminasikan suatu isu, meregulasi opini masyarakat dan menggiring opini tersebut ke satu titik tertentu. Tentu tidak semua media berpenciri seperti ini. Ada media-media tertentu yang memiliki visi kuat disamping juga sebagai sebuah perusahaan komersil. Kekuatan visi media ini biasanya berakar dari para punggawa yang ada di dalamnya. Sisi perjuangan media juga tampaknya menjadi perhatian penting jika media tersebut ingin memiliki segmentasi tertentu.

¹ Lukas Luwarso, dkk. *Mengelola Kebebasan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2008), 3

Janet Steele dalam sebuah bukunya tentang perjalanan majalah Tempo mencatat berbagai kronik, pilu, duka, heroisme yang ditampilkan oleh Gunawan Mohammad. Bagi Steele, majalah Tempo lebih dari sekedar simbol ekspresi kebebasan. “Selama 24 tahun masa hidupnya, Tempo adalah majalah yang sangat penting” begitu tulis Steele. Pada era itu, banyak sarjana yang telah menuliskan tentang budaya politik orde baru, tetapi sedikit yang menganalisisnya dari perspektif berita.²

Kebutuhan media—utamanya harian—adalah mendapatkan berita yang siap saji, tidak perlu terlalu jauh dan mendalam kecuali kasus itu berulang dalam beberapa peristiwa dan beberapa hari. Kekhasan berita kekerasan dan agama menjadi sesuatu yang dengan begitu saja harus dilempar ke masyarakat. Media menjadi bagian terpenting dalam meregulasi hal ini.

Penelitian ini sejatinya ditujukan untuk memotret bagaimana ormas Islam dan trend isu keislaman yang dipotret oleh media massa pada tahun 2012. Beberapa paragraph diatas—yang berisi tentang kaitan antara agama, kekerasan dan media massa—dianggap cukup memiliki kedekatan dengan isu-isu ormas Islam yang diberitakan media. Sepanjang tahun 2012 terdapat banyak berita yang diturunkan oleh media massa terkait dengan aktifitas ormas Islam. liputan media ini juga tidak jah-jauh dari problem kekerasan yang dilakukan oleh ormas tersebut. Karena, isu kekerasan dan ormas Islam dapat dianggap sebagai fakta yang paling “seksi” dan layak diberitakan.

² Lihat Janet Steele, *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita sejak Zaman Orde Baru*, terj. Arif Zulkifli (Jakarta: Dian Rakyat, 2007)

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberitaan isu keislaman di media massa tahun 2012? Fakta yang ingin diperoleh dari pertanyaan penelitian ini adalah adanya klasifikasi isu-isu keislaman dari sudut kekerasan, hukum dan politik, serta isu keislaman lainnya yang terkait dengan Ormas Islam dan pelaku non-Ormas Islam (lainnya).
2. Bagaimana trend Isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa pada tahun 2012. Gambaran yang ingin diperoleh dari pertanyaan ini adalah trend aktifitas Ormas Islam yang dimuat oleh media massa pada tahun 2012 dan implikasinya terhadap isu keislaman.

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa pada tahun 2012, utamanya yang terkait dengan Islam dan kekerasan, hukum dan politik, serta isu keislaman lainnya yang tidak termuat dalam dua komponen topik sebelumnya;
2. Mengetahui trend isu keislaman yang diperankan oleh Ormas Islam dalam pemberitaan media massa pada tahun 2012 yang menyangkut Ormas Islam kaitannya dengan isu kekerasan; ormas Islam kaitannya

dengan Isu hukum dan politik; serta Ormas Islam yang terkait dengan isu selain kedua isu sebelumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna dalam rangka memberikan peta data aktifitas ormas Islam dan isu keislaman yang muncul dalam pemberitaan media massa pada tahun 2012.

Selain itu penelitian ini secara pribadi berguna bagi peneliti yang juga sebagai dosen mata kuliah filsafat ilmu, filsafat Islam dan Studi pemikiran Islam. Tentunya hasil-hasil yang didapat dari penelitian ini akan dapat membantu dalam proses perkuliahan.

E. Kajian Terdahulu

Telah banyak dikaji hal-hal yang berkaitan dengan model, kecenderungan, dan motif pemberitaan yang dilakukan oleh media massa. Kajian-kajian yang berkait erat dengan kekerasan atasnama agama juga banyak dilakukan. Utamanya jika terdapat peristiwa yang secara langsung melibatkan unsur agama dalam memicu tindak kekerasan tersebut.

Selain beberapa penelitian dan analisa-analisa atas pemberitaan media, juga banyak buku-buku yang ditulis dengan mengambil tema kekerasan dan agama. Buku yang berjudul "*Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*" yang ditulis oleh Haqqul Yakin³ pada pertengahan

³ Haqqul Yakin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009)

2009 mengilustrasikan betapa agama menjadi instrument kekerasan-kekerasan yang terjadi setelah lengsernya rezim orde baru.

Buku lain yang juga mengupas agama dan kekerasan adalah sebagaimana yang ditulis oleh M. Bambang Pranowo dengan judul "*orang jawa jadi teroris*".⁴ Meski judulnya tidak secara spesifik mengenai agama dan kekerasan, namun pada bagian besar isinya mengipas keterkaitan islam, ideology dan terorisme.

Berbagai kajian tentang isu agama dan kekerasan diatas menjadikan agama sebagai entitas yang sangat terbuka terhadap berbagai macam isu. Agama seolah menjadi sumber berbagai problem disamping juga menjadi sumber kebahagiaan.

Agama dalam percaturan media juga pernah diteliti secara spesifik. Afif Azhari dalam penelitiannya yang berjudul "*Majalah Al-Muslimun dalam wacana relasi Islam dan Negara; studi analisis isi terhadap pemberitaan dan artikel-artikel majalah Al-Muslimun tahun 1998-2001*", menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara posisi kalangan kontributor yang lebih radikal dalam mengemukakan pendapat dibanding dengan respon kalangan redaktur yang cenderung bersifat moderta.⁵

⁴ M. Bambang Pranowo, *Orang Jawa jadi Teroris* (Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan LaKIP, 2011).

⁵ Afif Azhari, "*Majalah Al-Muslimun dalam Wacana Relasi Islam dan Negara; Studi Analisis Isi terhadap Pemberitaan dan Artikel-artikel Majalah Al-Muslimun tahun 1998-2001*" *Antologi Kajian Islam*, Seri 4 (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2003), 46.

Kajian dalam penelitian diatas menggunakan metode *content analysis* dengan pembagian unit tema pada tema konsep Negara, kepemimpinan dan posisi syariah dalam Negara. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran politik dalam wacana Islam dan Negara dari isi pemberitaan dan artikel majalah Al-Muslimun, dengan mengetahui latar belakang pemberitaan dan isi artikel majalah ini yang diletakkan dalam konteks perkembangan politik Indonesia era berakhirnya rezim orde baru dan awal masa reformasi.

Kajian mengenai agama telah luas dilakukan oleh para akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang penting dalam melakukan perubahan tatanan, perbaikan dan peradaban umat manusia. Indahnya ajaran agama dengan sendirinya menjadi sesuatu yang layak dijual dan disebarluaskan. Pun, begitu sebaliknya, berbagai isu miring yang ditimbulkan oleh agama menjadi kabar yang menarik untuk ditulis dan diberitakan oleh media massa.

Sebagaimana telah dikupas dalam bab pendahuluan. Isu agama sama-sama memiliki kedekatan publik dengan isu politik. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa politik dan media memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan sehat. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis; hingar binger, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonist. Politik juga memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak

diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.⁶

Agama juga dirasa demikian, baik tatkala agama bersanding dengan kekerasan maupun agama bersanding dengan isu politik, praktek-praktek umat beragama seringkali memiliki dimensi yang layak dijual kepada masyarakat, layak diketahui sebagai sesuatu yang menarik dan layak disimak. Keberadaan agama entah karena ajaran-ajarannya, penistaannya, penyelewengan ajarannya, ataupun praktek pengamalan ajarannya telah membikin hingar bingar kehidupan. Pun dengannya, media massa merasa perlu untuk memberitakannya.

Memang media massa memiliki motif-motif tertentu ketika memuat berita. Biasanya ditentukan berdasarkan muatan ideologis suatu media ataupun muatan teologis sekalipun. Hal ini mengakibatkan ada proses konstruksi wacana tertentu dalam suatu berita, yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menggiring pembaca kepada suatu opini publik tertentu. Disisi lain proses konstruksi wacana tidak hanya berasal dari media semata, tetapi juga melibatkan aktor-aktor wacana lainnya. Jadi memang media menjadi semacam arena kontestasi simbolik dari aktor-aktor wacana tersebut. Kesamaan utama antara politik, agama dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Ketiga ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang banyak dalam melakukan operasi-operasinya. Politik berurusan

⁶ Muzakki, dkk, *Pilkada dan Civil Society*, 114

dengan ideology, agama berurusan dengan teologi dan kedua topik tersebut tentu saja menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Sementara media adalah jembatan antara topik atau tema yang diangkat dengan rakyat yang tersebar.

Banyak kasus yang muncul di media massa dan media pun merasa perlu untuk memberitakannya kepada khalayak. Salah satu contoh berita yang bertendensi agama adalah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi selama tahun 2011. Pengeboman di tahun 2008 dan 2009. Bom bunuh diri yang dilakukan di masjid. Kesemuanya menjadi pembicaraan penting media massa. Media massa merasa perlu menyampaikan kepada masyarakat agar diketahui.

Isu terorisme yang disangkakan kepada Abu Bakar Ba'asyi dan semua jaringannya merupakan isu yang cukup bagus dan selalu mendapat porsi pemberitaan yang banyak dari media massa. Agama—dalam hal ini jika disandingkan dengan isu kekerasan dan terorisme—telah menjadi sumber berita yang tidak ada habisnya untuk dibahas dan disampaikan kepada masyarakat.

Memang terorisme tidak selalu identik dengan agama, tetapi terorisme yang dijalankan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan jaringannya dianggap oleh media sebagai suatu jaringan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Media juga gencar memberitakan berbagai isu terorisme.

Penangkapan Umar Patek pada tanggal 30 Maret 2011 juga mendapat porsi pemberitaan yang cukup fantastis oleh media massa. Koran *Surya* pada tanggal 31 Maret 2011 memberitakan penangkapan tersebut dengan judul "Buron Nomor satu Indonesia, tertangkap hidup di Pakistan". Judul tersebut

hendak memberitakan pengkapan Umar Patek, seorang gembong teroris yang atas nama agama melakukan tindak kekerasan. Dalam salah satu beritanya disebutkan:

“Penangkapan Umar Patek alias Abdul Ghani alias Abu Syeikh alias Umar Arab yang merupakan peracik bom bali I 2002, membuat para pejabat keamanan di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, kegirangan. Mereka berharap bisa mengorek keterangan dari mulut pria asal Pemalang Jawa Tengah itu tentang jaringan teroris internasional dan kemungkinan rencana serangan berikutnya.

Kantor berita AS *Associated Press* melaporkan Rabu (30/03/2011), mengutip sumber-sumber intelijen dan pejabat Pakistan, Indonesia, dan Filipina, Umar Patek ditangkap 2 Maret 2011 oleh aparat keamanan Pakistan. Belum jelas apakah aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Umar Patek atau penangkapannya berkat informasi intelijen....

... Pengamat teroris internasional Crisi Group (ICG), Sidney Jones, mengatakan Umar Patek menjadi kunci utama untuk mengungkap jaringan teroris di Asia Tenggara dan Asia Selatan. “Kabar tertangkapnya Umar Patek itu bagus sekali dan diharapkan bisa segera mengungkap jaringan teroris di Asia Tenggara dan Asia Selatan” Katanya...

Tim pengacara muslim (TPM) mengaku sudah mendengar penangkapan teroris Umar Patek di Pakistan. Pengacara TPM, Mahendradata mengatakan, pihaknya siap mendampingi.”⁷

Kutipan diatas menunjukkan betapa Umar Patek adalah aktor kuat yang selama ini menjadi buron terkait kekerasan dan terorisme. Telah diketahui bersama tragedi bom bali I dan II pada kurun 2002 memiliki kaitan motif agama yang cukup kuat. Kuatnya motif inilah yang kemudian mendorong pelakunya rela mengorbankan nyawanya sebagai “Syuhada”. Kepercayaan dan keyakinan jihad yang kuat yang terdapat dalam diri teroris ini kemudian menyulut perilaku-perilaku yang bahkan secara agama tidak dapat dibenarkan.

⁷ Surya, Kamis 31 Maret 2011

Penangkapan Umar Patek merupakan bagian kecil dari drama yang disajikan oleh media massa. Betapa media menganggap isu agama terutama yang bersangkutan paut dengan kekerasan adalah isu yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan, kabar-kabar yang demikian tetap ditunggu. Tetap sebagai sesuatu yang menarik.

Berita agama lain yang tak kalah menyedot jatah halaman media massa adalah berita mengenai Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dikatakan, bahwa jamaah ini adalah kelompok yang dianggap berbeda dengan kalangan umat Islam pada umumnya. Atas dasar pemberitaan ini, banyak tulisan-tulisan opini yang dimuat oleh media massa sekedar untuk menyikapi posisi Jamaah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

Salah satu tulisan yang dimuat oleh media massa terkait isu agama dan terkhusus Isu Jamaah Islamiyah Indonesia adalah tulisan Chabib Mustofa—dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel dengan judul Jaga JAI, jaga kemanusiaan.⁸ Tulisan yang dimuat di halaman opini Jawa Pos ini mengilustrasikan bahwa meski JAI adalah kelompok Islam yang paling aneh dan dianggap menyimpang, tetapi melakukan penjagaan atas entitas kelompok ini adalah diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸ Jawa Pos, Selasa, 8 Pebruari 2011

Tulisan yang dimulai dengan memaparkan guncangan isu kemanusiaan dengan kasus kekerasan di Peundeuy, desa Umbulan, kecamatan Cikeusik, Banten ditengarai lebih dipicu oleh motif keagamaan, bukan kriminal.

Insiden tersebut telah menelan tiga korban jiwa dan beberapa lainnya menderita luka, selain kerusakan fisik di lokasi. Menelaah persoalan ini tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan keagamaan. Mengingat, fakta menunjukkan bahwa korban tewas adalah anggota Jamaah Ahmadiyah dan pelaku penyerangan adalah masyarakat yang merasa terganggu oleh aktifitas Jamaah Ahmadiyah. Bentrokan antara Jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat bukan satu-satunya yang terjadi di Cikeusik ini. Sebelumnya juga pernah terjadi antara lain di Bogor, Makasar, Kuningan dan Lombok.

Konteks kemanusiaan yang hendak dijelaskan penulis ini adalah munculnya sebagian pendapat bahwa Islam merupakan agama yang dirugikan oleh Ahmadiyah tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, Islam tetaplah Islam dan tidak terpengaruh apapun. Fenomena Ahmadiyah sebenarnya sama dengan kemunculan berbagai sekte seperti syiah, muktazilah, khawarij dalam khazanah peradaban Islam. Itupun tidak merusak kredibilitas Islam sebagai agama, bahkan memberikan banyak ruang pilihan yang lebih fleksibel. Bagaimanapun Islam adalah rahmatan lil-'alamin yang mampu membawa keselamatan bukan hanya bagi pemeluknya, namun juga pemeluk agama lain. Islam menganjurkan pada pemeluknya untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Karena itu bagi tiap

muslim berlaku kode etik untuk melestarikan agama mulia tersebut dengan panduan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dua kasus yang berbeda diatas—fakta terorisme dan kerusuhan massa terhadap Jamaah Ahmadiyah—telah menggiring media massa untuk dengan sendirinya menampilkan berita-berita tersebut. Terorisme adalah isu global yang butuh disikapi secara global pula. Kerusuhan adalah ancaman yang tidak kalah dahsyatnya jika disandingkan dengan terorisme. Keduanya sama-sama memiliki motif agama. Memiliki landasan teologis atas perilaku yang ditimbulkannya. Media sebagai *corong* dan sarana transformasi informasi merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada masyarakat. Jadi, agama dan media memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sama-sama berharap menuai kebaikan. Media dengan gaya pemberitaannya memiliki nalar agar masyarakat menjadi waspada terhadap gejala-gejala, perubahan, pengulangan peristiwa serupa yang telah ditampilkan oleh media. Agama dengan segala kelebihan ajarannya mengharapkan agar umat manusia dapat saling rukun dan damai.

Penelitian ini hendak menyajikan berbagai berita tentang isu keislaman yang terekam di media massa pada tahun 2012. Media massa yang dijadikan sebagai obyek kajian adalah Harian Kompas, Harian Jawa Pos dan Harian Surya. Berita-berita terkait isu keislaman merupakan potongan-potongan berita yang dikliping selama tahun 2012.

Berbagai isu tersebut diklasifikasi dalam dua kelompok besar yakni yang terkait dengan Ormas Islam dan non-ormas Islam. dari masing-masing

kelompok besar tersebut kemudian diklasifikasi lagi menjadi berita yang terkait kekerasan, hukum dan politik, serta berita lainnya yang tidak termasuk dalam dua klaster tersebut.

Dalam menganalisa mengenai berita-berita ini, penelitian ini hanya mengarahkan pada trend isu keislaman yang muncul selama tahun 2012, kemudian disusun indikasi-indikasi kemudian hari terkait isu-isu yang berkembang selama tahun 2012, termasuk juga kemungkinan pencegahannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisa teks media. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Karena penelitian ini memfokuskan pada analisa teks-teks berita keislaman yang dimuat koran Kompas, Jawa Pos, dan Surya pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan guna mengetahui dan memahami kebenarannya;

pertama; melalui *interpretasi*,⁹ data yang dikumpulkan berasal dari berita media massa melalui eksplorasi kepustakaan (*library research*). Media massa yang diteliti adalah Jawa Pos, Kompas, dan Surya yang terbit pada tahun 2012 dan sudah dikliping oleh Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel. Pada tahap ini akan dilakukan pengkodean terhadap berita-berita yang dimuat dalam ketiga media

⁹ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

tersebut. Pengkodean dilakukan untuk mengklasifikasi berita kedalam dua komponen yakni yang terkait dengan Ormas Islam dan non-ormas Islam. dari masing-masing komponen tersebut diklasifikasi lagi menjadi yang terkait tema kekerasan, hukum dan politik, serta tema lainnya. Selain klasifikasi tersebut, juga akan ditampilkan data mengenai jumlah pemberitaan yang dimuat oleh masing-masing media.

Kedua; *koherensi intern*¹⁰; yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam satu struktur yang konsisten. Pada tahap ini dilakukan analisa relasional terhadap isi berita, pengelompokan isi berita kedalam tema dan kemudian memprosentase jumlah berita kedalam tema-tema yang sudah ditentukan. Proses prosentase isi berita kedalam tema dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Karena hendak melihat jumlah prosentase tema tertentu dan dibandingkan dengan tema lainnya.

Ketiga; *deskripsi analitis*¹¹; yaitu seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Tahap ini menjabarkan hasil prosentase yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif sebagaimana yang telah dilakukan pada tahap kedua diatas. Dari tahap ini diharapkan tema-tema sudah dapat dijabarkan dan dapat diketahui berbagai motif berita, kecenderungan berita, dan trend berita agama yang terdapat dalam media massa pada tahun 2012. Deskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan ide dasar

¹⁰ Ibid, 45.

¹¹ Ibid, 48.

pada suatu kenyataan tertentu. Satu usaha untuk merepresentasikan realitas yang dicerap oleh panca indera (*signified*), yang diteruskan dengan satu analisa yang menyeluruh menyangkut semua pemahaman yang ada (*content analysis*).

Barcus mengungkapkan bahwa *Content analysis* adalah metode analisis ilmiah tentang isi pesan komunikasi. Upaya yang dilakukan oleh metode ini mencakup: *pertama*: klarifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. *kedua*: menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan *ketiga*: adalah menggunakan teknik analisis sebagai dasar prediksi. Dalam memberikan prediksi terdapat tiga syarat yaitu obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.¹²

Content analysis ini sering digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Metode ini sering digunakan karena mempunyai keistimewaan. George dan Kraucer mengungkapkan bahwa *content analysis* kualitatif lebih mampu menyajikan dan melukiskan prediksinya lebih baik.¹³

2. Pengumpulan Data dan Sumber Kajian

Data dikumpulkan dari keterangan naskah, referensi, fakta atau peristiwa sejarah yang kemudian ditangkap arti, nilai, dan maksudnya melalui eksplorasi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari

¹² Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik dan realisme Metaphisik telaah studi teks dan penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Serasin, Edisi III, 1999), 49.

¹³ Ibid, 49.

berbagai sumber, baik data referensial maupun data sejarah arkeologis. Data yang digali terdiri dari data primer yakni data yang telah dikumpulkan pada tahun 2012 dalam bentuk kliping Koran Jawa Pos, Kompas, dan Surya yang telah menjadi kekayaan intelektual Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang menunjang akan selesainya penelitian ini sehingga mencapai nilai-nilai universal dan terwujudnya kebenaran dan kesempurnaan. Data ini diperoleh dari berbagai pembanding atas hasil kliping, berguna sebagai data pelengkap. Data dapat berasal dari yang memiliki tema selingkup, koran lain, ataupun dari berita *online*, serta buku-buku penunjang lainnya.

3. Analisa Data

Dalam sebuah penulisan yang berdasarkan studi pustaka (*library reseach*), menggunakan pendekatan *content analysis* menjadi suatu keharusan. Jadi data yang tersaji atau yang telah dikumpulkan, pertama diidentifikasi dengan interpretasi isi atau materi. Kemudian seluruh hasil interpretasi dipetakan dalam sistematisasi diskriptif analitis.

Pengungkapan dilakukan dengan menerapkan metode analisis teks yang menggunakan pendekatan kajian tematik atas teks. Analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini tidak mempergunakan analisis kritis, tetapi mempergunakan analisis tematis.

Dalam analisis kritis peneliti melihat terlebih dahulu realitas dan hubungan sosial yang berlangsung dalam situasi yang timpang.

Penglihatan atas realitas sosial seperti ini dikombinasikan dengan pemahaman yang perlu dimiliki oleh peneliti bahwa bahasa teks bukanlah saluran yang bebas.

Sementara dalam analisis teks yang menggunakan pendekatan tematik, peneliti memfokuskan pada produk informasi berupa teks khususnya dalam penelitian ini difokuskan pada hasil kliping Koran Jawa Pos, Kompas, dan Surya yang terbit pada tahun 2012.

Adapun langkah-langkah dalam analisis tematis atas teks dilakukan sebagai berikut: *pertama*, dikumpulkan teks berupa kliping Koran dimaksud. *Kedua*, dilakukan penelaahan atas teks melalui proses pembacaan, pemberian tanda, klasifikasi dan persentase atas berita, serta pencatatan atas masalah-masalah yang sesuai dengan tema yang ingin diangkat. *Ketiga*, dilakukan pengklasifikasian teks kedalam masalah-masalah yang sesuai dengan ciri, sifat, kronologi dan ruang lingkup bahasanya. *Keempat*, dilakukan penyusunan sub-sub tema yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelaahan dan pengklasifikasian atas teks. *Kelima*, dilakukan penulisan hasil penelitian sesuai dengan sub-sub tema yang telah disusun. *Keenam*, penelaahan kembali atas hasil penelitian. Hal ini penting dalam rangka untuk menguji kembali apakah hasil penyusunan naskah penelitian teks secara tematis ini telah dilakukan secara sistematis atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas keseluruhan kajian ini terdiri dari tujuh bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, batasan istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Pengumpulan Data dan Sumber Kajian, Analisa Data) dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Dinamika Ormas Islam

Bab ini mengemukakan fakta dinamika Ormas Islam di Indonesia

Bab III : Isu Keislaman di Media Massa tahun 2012

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelusuran pemberitaan kekerasan di media massa pada tahun 2012. Dalam pemaparannya, diklasifikasi menjadi dua tema yakni berita yang terkait dengan pelaku Ormas Islam dan pelaku lainnya/non-Ormas Islam/Individual.

Bab IV : Trend Isu keislaman dan Ormas Islam tahun 2012

Dalam bab ini dikemukakan analisa atas berbagai peristiwa yang terekam oleh media massa sebagaimana klasifikasi diatas, dan kemudian berusaha meramalkan kemungkinan trend yang akan muncul di kemudian hari.

Bab V : Penutup

Bab terakhir ini merupakan generalisasi dari keseluruhan kajian analisis data yang berisi kesimpulan dan saran. []

BAB II

DINAMIKA ORMAS ISLAM

Indonesia—dalam geografis kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke—memiliki tradisi dan pengalaman “keagamaan” yang cukup tua dan kaya. Sebelum Hindu-Budha yang mewariskan candi-candi mengagumkan dan menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia, kepulauan ini sudah mengenal pola peribadatan khas, sebagai wujud kebutuhan masyarakat terhadap Yang Transenden dalam bentuk “agama” lokal (local religi) setempat.

Agama lokal ini mengantarkan orang Jawa pada pencapaian “ketuhanan” yang sangat mengagumkan. Disebut mengagumkan, sebab tanpa dibimbing wahyu sekali pun, masyarakat Nusantara, Jawa misalnya, sudah bisa mengenal Tuhan sebagai Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang (Dzat Yang Esa, penguasa alam semesta). Karena itu, masuknya agama Hindu dan Budha, bisa jadi sekadar pelengkap belaka bagi “rasa ketuhanan” dan pencarian masyarakat Nusantara terhadap Yang Tunggal, Yang Kuasa atas jagad alit (*micro cosmos*) dan jagat besar (*macro cosmos*). Begitu juga ketika Islam masuk wilayah Nusantara. Maka, jangan heran jika Islam yang masuk ke bumi Nusantara, tidak lain dan tidak bukan, adalah Islam “percampuran” antara agama lokal setempat dan akulturasi dari ajaran agama dari India Selatan.¹⁴

¹⁴ Nur Syam, *Tarekat Petani: Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal* (Yogyakarta: LKiS, 2013).

Itu sebabnya, menjadi semacam kewajaran bila corak Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa, sangat berbeda belaka dengan Islam di tanah moyangnya, Arab dan Mesir yang berpenampilan lebih puritan. Boleh jadi Islam dari hasil akulturasi inilah “Islam yang Indonesia”. Apalagi, setelah ditelisik lebih jauh, Islam di bumi Nusantara telah memperoleh polesan budaya dari Persia dan India yang sifatnya lebih akomodatif. Itulah sebabnya, nuansa Islam Indonesia bisa bersenyawa dengan kebudayaan lokal. Pola adaptasi dan akulturasi ini sangat mendapat tempat ketika Sunan Kalijaga, yang merupakan bagian dari “lembaga” bernama Wali Songo (Wali Sembilan) mengembangkan dakwah yang lain dari delapan wali lainnya.¹⁵

Perkembangan Islam di Nusantara yang memiliki dinamika adaptif tersebut, selanjutnya mengantarkan ke berbaai corak pemahaman keagamaan. Corak-corak ini berkoloni dan membentuk satu kesatuan yang selanjutnya terlembaga menjadi berbagai aliran keagamaan. Tentu, berbagai aliran ini juga mengemban misi untuk melancarkan pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan kadar dan pemahaman masing-masing terhadap nilai-nilai Islam.

Inilah yang menjadi embrio terbentuknya berbagai organisasi keislaman, yang kemudian lebih dikenal dengan Ormas. Pada awal mulanya, ormas ini lebih banyak berkonsentrasi pada peribadatan dan mensyiarkan agama Islam, lambat laun juga masuk pada wilayah-wilayah politik, hukum, penegakan syariah dan

¹⁵ Achmad Chodjim, *Sunan Kalijaga* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013).

lain sebagainya.¹⁶ Ormas harus diakui juga menjadi faktor pendorong berbagai perubahan positif di negeri ini. Keberadaannya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perkembangan berbagai bangsa dan bernegara.

Sejak 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam. Fenomena yang sering ditengarai sebagai Kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) ini muncul dalam bentuk meningkatnya kegiatan peribadatan, menjamurnya pengajian, merebaknya busana yang Islami, serta munculnya partai-partai yang memakai platform Islam. Fenomena mutakhir yang mengisyaratkan menguatnya kecenderungan ini adalah tuntutan formalisasi Syariat Islam.

A. Ormas Islam di Indonesia

Terdapat berbagai aliran ormas Islam di Indonesia. Berbagai aliran ini sejatinya merupakan dari dinamika dan proses saling melengkapi antara kelompok Islam tertentu dengan kelompok Islam lainnya. Meski dapat dilihat bahwa antar Ormas ini juga cukup mempertontonkan berbagai perbedaan. Kesemua itu merupakan proses dan dinamika dalam memahami berbagai ajaran Islam.

Penjelasan di bawah merupakan gambaran mengenai perjalanan ormas Islam yang ada di Indonesia sekaligus berbagai dinamika dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Kesemua ormas ini memiliki

¹⁶ Salah satu contoh adalah Resolusi Jihad yang pernah dipelopori oleh para Kyai NU dalam melawan penjajahan Belanda di Surabaya. Ini merupakan contoh riil bahwa Ormas juga berperan aktif dalam membentengi NKRI dari berbagai penjajahan.

kontribusi dalam mencerdaskan dan membangun peradaban berbangsa dan bernegara.

Dalam bagian ini hanya dijelaskan mengenai dua ormas besar yang ada di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua ormas ini memiliki perjalanan yang cukup panjang dan berkontribusi dalam pembangunan peradaban Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat terkait dengan kecenderungan ideologis dan keberpihakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Nahdlatul Ulama

Perbincangan tentang NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (*jam'iyah*), tidak bisa dilepaskan akar budaya masyarakat pesantren dan kiai, yang dalam tradisi masyarakat Indonesia, menjadi bagian dari struktur sosial, terutama pada masyarakat tradisional atau pedesaan.

NU lahir bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926, hingga sekarang menginjak awal tahun 2012, NU tetap *survive* dan terus berkembang di bumi nusantara. Dua tokoh kharismatik yang menjadi “dalang” pendirian NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah telah berhasil mewujudkan cita-citanya dalam mendakwahkan Islam moderat untuk kebangkitan karakter bangsa.

Terbukti, jika hingga kini di tengah peradaban global sekalipun, NU masih bertahan dan mengakar kuat. Melewati banyak dinamika sosial,

politik dan kemasyarakatan di Indonesia, NU justru tampil sebagai bagian dari solusi, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua hal. *Pertama*, NU pada hakikatnya merupakan pelembagaan dari tradisi Islam yang sudah ratusan tahun hidup dan berkembang di nusantara. *Kedua*, kelahiran NU tidak dapat dipisahkan dari kelahiran *Nahdlatul Wathan* yang berdiri pada tahun 1914, *Nahdlatul Tujjar* (1918) dan *Tashwirul Afkar* (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU. *Nahdlatul Wathan* yang artinya kebangkitan bangsa atau tanah air merupakan organisasi pendidikan dan dakwah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berwatak religius dan nasionalis.¹⁷

Secara formal, NU memang baru dideklarasikan pada tahun 1926. Namun, sebagaimana diuraikan pembahasan terdahulu, bahwa komunitas Islam tradisional telah terbentuk jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan. Para kyai pendiri NU adalah para pendukung, penyebar dan pembela faham Islam *Ahlus sunnah wal Jama'ah* dimana perjuangan para kiai tersebut menggunakan sarana pesantren. Faham ini telah mempersatukan secara organis antara ajaran tauhid, fiqih dan tasawuf. Jadi doktrin *Ahlus sunnah wal jama'ah* sebagaimana dipahami oleh NU ialah doktrin yang berpangkal pada 3 madzhab panutan; dalam bertauhid mengikuti paham *Al-Asy'ari* dan *Al-Maturidi*, mengikuti salah satu dari 4 madzhab (Hanafi,

¹⁷ A. Muhaimin Iskandar, *Momentum untuk Bangkit: Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik, dan Keagamaan* (Yogyakarta: LKiS, 2009).

Maliki, Syaifei atau Hambali) dalam berfiqh dan mengikuti faham *Al-junaid Al-baghdadi* dan *Al-ghozali* dalam bertasawuf.

Sebelum NU berdiri, di kalangan para ulama (kyai) pesantren sudah terbangun kesamaan faham dan wawasan keagamaan, cara pengamalan dan ritual-ritual keagamaan. Diantara mereka juga sudah terjalin saling hubungan yang kuat melalui pertemuan-pertemuan dalam berbagai upacara seperti khaul, selamatan, hubungan perkawinan maupun ikatan-ikatan seperguruan. Tetapi hubungan yang erat tersebut belum terorganisir beraturan dan belum melembaga. Munculnya kebutuhan untuk membentuk sebuah organisasi para kyai ini lebih banyak didorong oleh faktor luar daripada faktor kesadaran internal untuk mengembangkan secara kolektif faham keagamaan yang mereka anut.¹⁸

Seperti banyak peneliti sebutkan bahwa munculnya keinginan untuk membentuk sebuah organisasi lebih dilatarbelakangi faktor eksternal ketimbang kesadaran internal kelompok kiai-pesantren.¹⁹ Sementara itu, Andre Failard²⁰ menyebut beberapa faktor terbentuknya NU diantaranya; *Pertama*, Adanya serangan terbuka dari kelompok reformis (pengikut ajaran Wahabi) terhadap paham dan praktik-praktik keagamaan para kiai

¹⁸ Lihat juga Martin.V.B dan Andre Feilard: *NU vis a vis Negara*

¹⁹ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam Upaya Pemberdayaan Civil Society* (Yogyakarta: Manhaj, 2010); Fathurin Zain, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

²⁰ Dalam Ibid.

dan pengikutnya. Ajaran para kiai yang menekankan pentingnya sistem bermadzhab dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dituduh sebagai penyebab kemunduran dan kemandekan umat Islam. Berbagai praktek ritual keagamaan seperti; tahlilan, selamatan, khhaul, ziarah kubur dan praktek-praktek tarekat dianggap bid'ah dan syirik oleh kelompok reformis. *Kedua*, Penyerbuan terhadap Makkah oleh Abd Al-Azis ibn Sa'ud, sehingga seluruh Hijaz (bagian barat Semenanjung Arabia) berada dibawah kekuasaan Ibn Sa'ud pengikut paham Wahabi.

Seperti ulasan di atas, dalam kekhawatiran yang memuncak itulah para alim ulama merasa berkepentingan dengan akan dilangsungkannya Khilafah Islamiyah karena wakil umat Islam yang terpilih untuk menghadiri kongres di Makkah adalah kelompok *reformis* (yang diwakili Muhammadiyah-yang memang telah berdiri sebelumnya-). Sudah barang tentu, kelompok reformis sendiri tidak merasa perlu dan berkepentingan menyampaikan (menyuarakan) pandangan kalangan Islam *Sunni* sebagaimana yang kebanyakan menjadi tradisi keagamaan (baca; dianut) KH. Hasyim Asy'ari, kiai-kiai dan para pengikutnya (baca; santrinya).

Atas dasar kepentingan itulah NU dibentuk agar bisa menyuarakan sendiri aspirasi terutama menyangkut eksistensi dan perlindungan atas berbagai ajaran dan praktik keagamaan kiai-pesantren dan para pengikutnya.²¹ Dengan segala keterbatasan akhirnya, delegasi NU pun berangkat menghadap Raja Arab Saudi menyampaikan keberatan ulama-

²¹ Ibid.

ulama dan umat Islam Indonesia. Tiga orang delegasi mewakili umat Islam Indonesiaketika itu adalah; 1. KH. Wahab Hasbullah, delegasi tunggal. 2. Syekh Ghonaim (warga negara Mesir) penasehat delegasi, untuk meningkatkan wibawa delegasi, karena pada saat itu, Saudi masih memandang rendah bangsa Indonesia. 3. KH Dachlah Kohar, santri Indonesia yang sedang belajar di Makkah, dengan maksud penghematan biaya.²²

Demikianlah NU lahir dan hadir sebagai sebuah organisasi. Dengan latar sosio-politik yang berkembang di zamannya (1926) dan dalam pengawalan dan keikhlasan tokoh-tokoh kiai besar seperti Hadratus Syeikh Hasyim As'ary, KH.Wahab Hasbullah, Kiai Mas Mansur, dan Kiai Bisri Sansuri. Organisasi ini terus tumbuh dan berkembang sampai hari ini.

Studi Greg Fealy²³ tentang NU rentang waktu 1952-1969 menyebut dua wacana ilmiah yang mengemuka dalam historiografi NU. *Pertama*, wacana yang sangat kritis terhadap NU, dapat disebut sebagai wacana yang didominasi modernis". *Kedua*, wacana yang menggunakan pendekatan simpatik, dapat disebut sebagai wacana "yang menghargai tradisi". Dalam konteks relasi Islam Indonesia dan pergaulannya, NU masuk pada kelompok Islam Tradisionalis. Bagaimana elaborasi budaya yang dihasilkan oleh NU dalam konteks padu padan budaya tradisinal-

²² Abdul Muchit Muzadi. *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2006), 8-9

²³ Dalam Choiratun Chisaan, *Lesbumi* (Yogyakarta: LkiS, 2008), 14.

dalam hal ini budaya Indonesia, Timur Tengah, dan Barat-sudah pasti merupakan keunikan tersendiri bagi NU.

Terlepas dari faktor mana yang dominan yang mendorong dibentuknya organisasi NU, yang nyata terjadi selama organisasi berjalan ialah bahwa NU merupakan organisasi pembela ajaran Islam tradisional, ia menjadi sarana (wadah) perjuangan kepentingan kelompok Islam tradisional dan berperan sebagai sarana partisipasi mereka dalam proses pembentukan bangsa Indonesia maupun dalam proses pencarian prinsip-prinsip penataan masyarakat dan negara Indonesia. Organisasi NU sendiri sesungguhnya adalah federasi dari otoritas otonom para kyai dan pondok pesantren, sehingga di kalangan Nahdliyin (pengikut NU) organisasi ini juga disebut sebagai pesantren besar. Struktur organisasi yang terdiri dari lembaga Syuriah disatu pihak (lembaga tertinggi dalam NU) yang berwenang menetapkan keputusan organisasi (berdasarkan pertimbangan hukum Islam) mengenai berbagai persoalan agama, politik dan sosial, dan lembaga "*Tanfidziyah*" sebagai pelaksana harian organisasi dipihak lain, menegaskan betapa kuatnya otoritas para ulama (kyai) dalam organisasi tersebut. Dan memang benar bahwa organisasi NU tanpa pesantren tidak dapat dijamin keberlangsungannya. Tetapi NU yang hanya mengandalkan pesantren sebagai basis dukungannya juga tidak akan dapat berkembang dan berperan dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat maupun kepentingan warganya sendiri.²⁴

²⁴ Hasan. *Ijtihad Politik NU*

NU yang lahir dari Komite Hijaz yang bertujuan mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah.²⁵ Dalam menjalankan syariat Islam, NU menganut salah satu mazhab empat yakni Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Namun dalam prakteknya, justru yang mendominasi gerakan ini adalah mazhab Syafi'i.²⁶ NU memiliki akar yang kuat di pesantren di seluruh Nusantara.

Soliditas di kalangan NU juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kuatnya kekerabatan internal, baik yang disebabkan oleh seperguruan dalam menimba ilmu agama (pesantren sebagai tempat belajar), factor nasab (keturunan), dan juga silaturahmi yang dijalin. Dan tentu saja ukhuwah Islamiyah dan kesatuan akidah.

Pada awalnya nampak bahwa tujuan utama didirikannya NU adalah untuk melakukan upaya pengembangan ajaran Islam tradisional dan melindunginya dari serangan kaum reformis yang dinilai membahayakan sendi-sendi ajaran mereka. Disamping itu pembentukan organisasi ini juga dimaksudkan untuk memajukan atau meningkatkan pendidikan umat Islam, kepedulian terhadap anak-anak miskin dan anak yatim dan usaha-usaha ekonomi rakyat. Jika dilihat dalam anggaran dasar NU (statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama tahun 1926) maka organisasi ini tidak

²⁵ Fauzan Saleh, "the School of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah and the Attachment of Indonesian Muslims to its Doctrines" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 1 (2008), 16

²⁶ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia. Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994),

mencantumkan bidang atau permasalahan politik sebagai bidang perhatian dan perjuangannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa para ulama NU tidak peduli dan tidak aktif melakukan perjuangan politik bersama elemen bangsa Indonesia yang lain. Para ulama dengan pondok pesantrennya merupakan institusi yang berperan aktif dalam melawan imperialisme. Bahkan para santri yang merupakan kekuatan dan pendukung utama NU telah terlibat dalam pertempuran melawan penjajahan Belanda sejak masa perang Diponegoro.²⁷

Kepedulian para ulama NU (kyai) terhadap politik lebih dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kebebasan kaum muslimin untuk melaksanakan ajaran Islam, dan penyebarannya di tengah masyarakat. Karena itu para ulama NU (kyai) tidak mempersoalkan bentuk tertentu sebuah negara dan pemerintahannya. Menurut mereka tidak ada ketentuan baku dalam ajaran Islam yang menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan negara. Mengenai persoalan negara dan sistem pemerintahannya adalah merupakan urusan bersama semua warga masyarakat, yang harus mereka sepakati bersama-sama. Ajaran Islam hanya memuat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan (pengaturan) masyarakat dan pelaksanaan kekuasaan didalamnya. Kewajiban umat Islam adalah memperjuangkan perealisasiian prinsip-prinsip tersebut secara

²⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Bisma Satu, 1999); Lihat pula Andre Feillard, *NU vis a vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2008).

terus-menerus didalam penataan masyarakat yang telah disepakati bersama.

Karena itu cita-cita mengenai pembentukan negara Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif negara, tidak menjadi orientasi etik normatif dalam menentukan pandangan dan sikap sosial politik NU. Pandangan dan sikap politik NU mengenai penataan normatif (hukum) dan penataan *efektif* (kekuasaan) sebuah masyarakat (negara) bertitik tolak dari prinsip-prinsip dasar ajaran islam mengenai persamaan (*equality*) manusia, (yaitu persamaan derajat dan martabat; persamaan hak dan kewajiban; persamaan kebebasan dan tanggung jawab) dan konsensus yang secara deskriptif telah dicapai bersama dalam masyarakat. Serta pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dan kepentingan deskriptif semua elemen masyarakat (negara).

Dimensi etik dalam pandangan dan sikap politik NU bergerak diantara dua kutub yaitu kutub ideal (prinsip dasar ajaran Islam) dan kutub empirik deskriptif (situasi kongkrit) kehidupan masyarakat dan negara. Dalam tradisi NU mengenai sikap sosial dan politik sebagaimana dijalankan oleh para kyai (melalui pesantren maupun melalui organisasi NU) sejak masa kolonial hingga masa pasca kemerdekaan menunjukkan adanya konsistensi dimensi etik tersebut. Dalam prakteknya dimensi etik yang terkandung dalam pandangan dan sikap/perilaku sosial politik NU seperti di atas telah menjadi kesadaran spontan (terpatri dalam penghayatan) kaum nahdliyin. Kesadaran spontan atau penghayatan atas

dimensi etik tersebut, secara teoritis telah dirumuskan oleh para ulama (kyai) NU ke dalam prinsip-prinsip dasar sosial *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Yaitu: prinsip *I'tidal*, prinsip *tawassuth*, prinsip *tawazun*, prinsip *tasamuh* dan prinsip *al-maslahah al-'ammah*.

Doktrin *I'tidal* mengandung pengertian setiap norma positif, ideologi, hak dan kepentingan yang plural dalam masyarakat harus dipertimbangkan dan diperlakukan secara adil, fair dan sederajat dalam rangka penataan (penetapan) hukum positif maupun dalam rangka penataan sistem politik/pemerintahan. *Tawassuth*, mengandaikan bahwa dalam setiap segi kehidupan manusia, baik individual maupun sosial senantiasa terdapat pandangan-pandangan yang ekstrim positif (kanan), pertengahan (moderat) dan ekstrim negatif (kiri). Prinsip jalan tengah (moderat) berarti penolakan terhadap cara berpikir, sikap, pandangan hidup dan tindakan yang berlebihan (ekstrim) dalam rangka penataan masyarakat dan negara serta dalam setiap segi kehidupan. Baik soal maupun politik dan budaya. Jadi, prinsip jalan tengah (moderat) yang merupakan sebuah andaian tentang keutamaan dalam cara berpikir, sikap, pandangan hidup (*way of life*) dan tindakan setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Adapun doktrin "*tawazun*", (keseimbangan) mengandaikan adanya dua dimensi dan serba dikotomis dalam berbagai segi kehidupan manusia. Ada dimensi transendent dan profan, dimensi wahyu (ilahi) dan akal budi, dimensi metafisik dan fisik, dimensi individual dan

social, dimensi masa lalu dan masa depan serta dimensi ukhrowi dan jasmani (materi). Tatanan masyarakat dan negara yang baik (yaitu yang menjamin martabat kemanusiaan dan mendukung perealisasi kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia serta menjamin kebahagiaan hidup yang sejati) adalah tatanan yang secara prosedural maupun materiil mempertimbangkan dan memuat dimensi-dimensi obyektif kehidupan manusia tersebut secara adil, fair dan komprehensif. Sedangkan doktrin "*tasamuh*", (toleransi) mengandaikan adanya perbedaan-perbedaan dan ketidaksetaraan (*inequalities*) antar individu-individu maupun kelompok-kelompok mengenai status sosial, distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam masyarakat. Prinsip toleransi bukan hanya mengakui hak-hak setiap individu dan kelompok-kelompok yang berbeda dan tidak setara dalam masyarakat tersebut tetapi lebih dari itu ia menuntut kesediaan semua pihak, terutama pihak yang kuat bersedia berkorban seperlunya terhadap pihak yang lemah. Prinsip ini hendak menyerukan bahwa tatanan masyarakat dan negara yang baik adalah yang menjamin hak-hak dan kepentingan semua warga masyarakat dalam keberbedaannya masing-masing serta adanya jaminan bahwa pihak-pihak yang kuat bersedia berkorban guna melindungi hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah serta demi menunjang kesejahteraan mereka yang lemah.

Kemudian, doktrin *al-mashlahah al-'ammah* (kesejahteraan umum), mengandaikan bahwa tujuan obyektif setiap individu manusia

maupun kelompok dalam masyarakat adalah untuk merealisasikan kesejahteraan hidup mereka di dunia kehidupan kongkrit sekarang ini maupun untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang sejati di dunia transendent yang akan datang (akhirat).

Hasan²⁸ menyebut kelima prinsip/doktrin keagamaan NU di atas sebagai prinsip moral-sosial dan politik NU. Dikemudian hari, kita sepakat bahwa Implementasi prinsip-prinsip "moral-sosial dan politik" di atas dalam realitas deskriptif masyarakat Indonesia bisa tercermin dalam pandangan dan sikap warga NU maupun organisasi NU yang akomodatif, yang toleran dan pembelaannya terhadap pluralisme sosial, budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Sedang implementasinya dalam realitas deskriptif penataan segi-segi hukum maupun penataan segi kekuasaan politik tercermin dalam pengakuan NU terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah mencatat bagaimana NU "menghiasi" sejarah perjalanannya dengan doktrin-doktrin ini. Sejarah Republik ini menorehkan kilasan peristiwa-peristiwa sejarah tentang bagaimana NU menjadi bagian dan berada pada garda terdepan melahirkan dan mengawal Republik Indonesia. Dalam ranah kehidupan berbangsa bernegara (Indonesia) inilah NU memperoleh perwujudan secara operasional atas prinsip-prinsip/doktrin-doktrin keagamaan yang dianut-nya. Keterlibatan NU dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia melakukan

²⁸ Hasan. *Ijtihad Politik NU*.

perlawanan fisik dan non fisik terhadap Penjajah. Dan ketika persiapan kemerdekaan dan pada periode-periode pasca kemerdekaan Republik Indonesia semakin nampak signifikannya peran NU.

Dalam kehidupan politik, Nahdlatul Ulama ikut aktif semenjak zaman pergerakan kemerdekaan di masa penjajahan. Semula, Nahdlatul Ulama aktif sebagai anggota Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), kemudian Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), baik yang dibentuk di zaman Jepang maupun yang didirikan oleh seluruh organisasi Islam setelah merdeka sebagai satu-satunya partai politik umat Islam Indonesia. Karena berbagai perbedaan, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama, menyusul PSII, menyatakan menarik diri dari keanggotaan istimewa Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Nahdlatul Ulama bersama dengan PSII dan Perti membentuk Liga Muslimin Indonesia sebagai wadah kerja sama partai politik dan organisasi Islam. Dalam pemilihan umum tahun 1955 Nahdlatul Ulama muncul sebagai partai politik besar ketiga. Pada masa Orde Baru Nahdlatul Ulama bersama partai politik lainnya (PSII, Parmusi, Perti) berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian sejak tahun 1984 NU menyatakan diri kembali ke khittah 1926, yaitu melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi organisasi sosial keagamaan.

Meski Khittah 1926 NU pada mulanya diilhami oleh suatu pemikiran bahwa keterlibatan secara langsung dalam kancah politik praktis ternyata tidak memberikan 'keuntungan' yang signifikan bagi kelangsungan hidup

organisasi. Perjalanan NU kemudian tampak lebih didominasi oleh aktivitas politik. Inilah yang kemudian memunculkan ide untuk kembali ke khittah 1926. Bukan berarti NU harus meninggalkan dunia politik, namun netralitas politik tetap menjadi pilihan NU. Karena itu, untuk menjaga sikap netral itu, dapat dimaklumi jika PBNU melarang adanya rangkap jabatan bagi segenap pengurusnya dengan jabatan politik.

Dalam praktiknya, anggota NU masih ada yang di PPP, tak sedikit yang menyeberang ke Golkar, dan tidak dilarang juga masuk PDI. Ini terjadi dalam kurun sekitar 1984-1998. Sampai kemudian pada tahun 1999 saat gelombang reformasi menyeruak, NU bisa berkampanye untuk rumahnya sendiri, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Langkah ini dianggap sebagai langkah “non politik” dari “politik” NU, di mana NU tidak mengubah bentuk menjadi organisasi politik secara “langsung”—karena berarti ini mencederai khittah 1926—namun menampilkan representasi organisasinya yang memiliki kekuatan sosial cukup signifikan di Indonesia dalam wadah PKB.

Meski bukan satu-satunya partai bentukan warga NU, di masa inilah PKB meraih simpati massa—khususnya dari kalangan santri—Islam yang cukup besar, hingga mampu menduduki peringkat lima besar partai pemenang pemilu 1999.

Sebagai cucu dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari, sosok Abdurahman Wahid atau Gus Dur tak terlepas dari perkembangan Nahdlatul Ulama. Menjabat selama tiga periode berturut-turut dalam

pucuk kepemimpinan di PBNU, pemikiran Gus Dur banyak memberikan "corak" bagi perkembangan NU berikutnya. Ia disebut-sebut sebagai seseorang yang memadukan pemikiran tradisional dan kontemporer. Greg Barton, dalam disertasinya yang berjudul "The Emergence of Neo Modernism", salah satunya mengupas pemikiran beberapa tokoh Indonesia, di antaranya Gus Dur. Gus Dur adalah sosok yang penuh kontroversi dan dianggap telah memelopori bangkitnya gerakan liberalism Islam di kalangan anak muda NU.

Gus Dur kemudian terpilih sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang dengan demikian harus meletakkan jabatan sebagai ketua PBNU. Dalam perkembangannya, saat pemilihan presiden dilaksanakan di Senayan, pada tahun 1999 terjadi tarik-menarik. Lobi-lobi tokoh-tokoh Islam di DPR/MPR menghasilkan konsesi politik yang berujung pada kemenangan Abdurrahman Wahid sebagai orang nomor satu di republik ini. Namun, selama kepemimpinannya, pemerintah menuai badai kritik dan dipenuhi langkah-langkah yang juga penuh kontroversi. Gus Dur akhirnya lengser setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dalam Sidang Istimewa.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar yang masih eksis hingga kini. Ormas Islam ini didirikan oleh KH. Dahlan pada

tanggal 8 Dzulhijah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta.²⁹ Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah³⁰, Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al- Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah menentang berbagai praktik bid'ah dan khurafat. Sifat gerakan ini non politik, tetapi tidak melarang anggota-anggotanya memasuki partai politik. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang concern terhadap pembaruan Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Muhammadiyah memberikan titik tekan tersendiri bagi dunia pendidikan dan kesehatan dengan berbagai lembaga pendidikan dan rumah sakit yang didirikan hampir di beberapa daerah di Indonesia.

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan Islam (tajdid fi al-Islam). Oleh karena itu, Muhammadiyah memahami makna tajdid meliputi: (1) Arah pemurnian, yakni pemurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah), (2) Pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progressif dan berwawasan masa depan dan lebih khusus diarahkan kepada pengembangan kepemimpinan organisasi, serta etos kerja dalam

²⁹ Suaidi Asy'ari, "A Real threat from within; Muhammadiyah's Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2007): 18-41.

³⁰ Anggaran Dasar Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985

Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam bahasa yang lebih sederhana biasanya diistilahkan dengan purifikasi dan dinamisasi.³¹

Sejak masa berdirinya, banyak kader Muhammadiyah yang ikut berjuang, misalnya di perang kemerdekaan. Sementara itu setelah Indonesia merdeka, mulai bergerak kembali ke berbagai bidang, selain juga terjun dalam perjuangan fisik. Sementara itu, pada zaman revolusi fisik dan demokrasi liberal, banyak anggota Muhammadiyah yang memasuki partai politik Masyumi. Dalam dunia politik, banyak tokoh Muhammadiyah berdiri di depan.

Persebaran Muhammadiyah dimulai sejak kelahirannya sampai saat ini. Sampai sekurang-kurangnya tahun 1917, penyebaran Muhammadiyah bisa dibilang masih sangat terbatas, yakni masih di daerah Kauman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan sebagai pimpinan Muhammadiyah, selain aktif tabligh, aktif pula mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pengajaran shalat dan juga mengumpulkan dana dan pakaian untuk dibagikan kepada fakir miskin.

Dengan kesungguhan para kadernya, Muhammadiyah akhirnya berkembang pesat. Pada tahun 1925 Muhammadiyah telah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota. Sedangkan kegiatannya di bidang pendidikan meliputi 8 Hollands Indlandse School, 1 Sekolah guru di

³¹ Syamsul Hidayat, "Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya," *Tajdid*, Vol. 9, No. 1 (2011), 61.

Yogyakarta, 32 sekolah dasar 5 tahun, 1 Schakelschool, 14 madrasah dengan 119 guru dan 4000 murid.

Sampai dengan hari ini, muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Kebesaran pendidikan Muhammadiyah ini juga tak terlepas dari concern organisasi ini sendiri yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pendidikan. Disamping sebagai suatu prestasi, pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah juga mengalami berbagai pencarian utamanya yang berkaitan dengan pencarian aspek filosofis pendidikan muhammadiyah yang sudah tersebar di berbagai daerah, hingga ke pelosok nusantara.³²

Di bidang sosial, Muhammadiyah mencatat 2 klinik di Jogja dan Surabaya dengan 12.000 pasien, 1 buah rumah miskin, dan 2 rumah yatim piatu. Selanjutnya, penyebaran Muhammadiyah semakin meluas lagi. Bidang pendidikan menjadi begitu melekat dengan ikon Muhammadiyah. Data pada tahun 1985 saja tercatat lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 12.400 lebih yang tersebar di seluruh tanah air, yang terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan agama. Dari jumlah tersebut tercatat 15 universitas dan 23 perguruan tinggi. Sisanya adalah sekolah TK sampai tingkat SLTA (agama dan non agama). Sampai dengan tahun 1990, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkembang menjadi 78 buah.

³² Lebih lanjut mengenai dialektika pemikiran pendidikan muhammadiyah, baca Mohammad Ali dan Marpuji Ali, "Filsafat Pendidikan Muhammadiyah; Tinjauan Historis dan Praksis," *Tajdid*, Vol. 2 No 2, (2004).

Selain bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mencurahkan perhatiannya untuk mendirikan poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, dan sekarang fakultas kedokteran. Kalau pada tahun 1922 baru ada 1 rumah sakit atau poliklinik, di tahun 1990 Muhammadiyah telah memiliki 215 rumah sakit, poliklinik dan rumah bersalin. Kini belum ada data pasti, tapi diyakini jumlahnya jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pola kerja Muhammadiyah yang demikian ini disinyalir meniru pola Kristen dalam menyebarkan ajarannya, yakni melalui pendidikan, kesehatan dan penyediaan panti asuhan.³³

Diskursus mengenai pluralism di kalangan Muhammadiyah juga menjadi perdebatan yang cukup seru. Sebagian intelektual muda muhammadiyah menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang pro-pluralisme, disisi lain sebagian menolak dengan anggapan demikian.³⁴

B. Kecenderungan Ideologi Ormas Islam

Ormas Islam dengan berbagai latar belakangnya memiliki kecenderungan ideologis yang beragam. Ada yang tradisional seperti yang diwakili oleh NU, ada juga kelompok modernis atau sering pula disebut reformis yang diwakili oleh Muhammadiyah. Namun, ada juga kelompok radikal yang diwakili oleh FPI, Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia. Disisi lain

³³ Asy'ari, "A Real threat from within," 19.

³⁴ Baca selengkapnya Biyanto, "Pluralism Discourse; the Views of Young Muhammadiyah Intellectuals." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3, No. 2 (2009): 314-340

ada juga seperti kelompok fundamental yang diwakili oleh Hizbut Tahrir dengan isu khilafah Islamiyahnya.

Debat kelompok Islam reformis dan Islam tradisional pernah menjadi perbincangan serius dalam khazanah pemerhati kebudayaan-Islam. Mengenai pemilahan secara dikotomis Islam di Indonesia dalam Islam reformis (Muhammadiyah) dan Islam tradisional (NU) telah lama menjadi perbincangan. Studi Geertz menginformasikan tentang peta kebudayaan dalam tiga kelompok besar yakni abangan, santri dan priyayi. Abangan diimajinasikan sebagai komunitas masyarakat yang bertahan dengan tradisi-tradisi ke-Jawa-annya seperti gamelan, slametan, dan wayang. Santri dimaksudkan pada kelompok/komunitas yang menyebar pada basis simbol kultural-agama seperti di Masjid, Mushalla, dan pesantren. sementara Priyayi diasosiasikan sebagai para komunitas ningrat/darah biru, penguasa yang secara ekonomi-politik memiliki status lebih tinggi daripada orang kebanyakan (rakyat).³⁵

Dalam tahapan berikutnya, banyak yang kemudian menganggap pemetaan kebudayaan mazhab Geertz ini ketinggalan zaman. Seiring perkembangan akulturasi kebudayaan diantara tiga kelompok/komunitas *ala* Geertz ini tidak sepenuhnya berlaku. Seorang Indonesianis lainnya, Hefner menganggap konsep polarisasi sebagaimana Geertz sebutkan sudah tidak mamadai untuk mengetengahkan peta kebudayaan-Islam Indonesia

³⁵ Fathurin Zain, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

kontemporer.³⁶ Artinya, pada dasarnya bukan hanya soal formal-tidak formal NU hadir dan dihadirkan oleh para kiai-pesantren ketika itu. Lebih dari itu, NU hadir sebagai satu model pendekatan (dakwah) kiai-pesantren untuk mengetengahkan Islam pada masyarakat dunia bahwa Islam bukan hanya sekadar ajaran/paham yang jauh dari realitas kebudayaan dimana agama (Islam) ada sebagaimana Islam sendiri ketika pertama kali dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Baik kelompok reformis maupun tradisional yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, kedua ormas ini hampir sama-sama mewarnai berbagai kehidupan politik dan kontestasi kekuasaan di Indonesia. Meski keduanya tidak secara langsung terjun ke arena politik praktis, melainkan membentuk sayap partai politik sebagai kendaraan pencapaian kekuasaannya.³⁷

Berbeda dengan dua ormas diatas, kelompok radikal yang diwakili oleh FPI³⁸ memberikan warna tersendiri. FPI dianggap sebagai organisasi bentukan militer yang disupport dana dan pelatihan khusus ala militer.³⁹ Mereka

³⁶ Ibid.

³⁷ Baca juga Michael Buehler, "Islam and Democracy in Indonesia," *Inside Turkey*, Vol. 11, No. 4 (2009). 59

³⁸ M. Ridwan Nasir, "Live in Destiny or Die as Martyr; The Venture of Front Pembela Islam (FPI) in Contemporary Indonesia" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 1 (2008), 217-221

³⁹ Baca selengkapnya Jajang Jahroni, *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003* (Washington: University of Washington Press, 2008), 18

bergerak untuk melakukan aksi pemberantasan kemaksiatan. Dengan berpedoman pada doktrin amar ma'ruf nahi munkar, FPI melakukan gerakan-gerakan dengan berbalut kekerasan seperti praktek militer.

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai *sayap juang*, FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi "penertiban" (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa.

Stigma sebagai kelompok radikal dan Islam garis keras bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Berbagai aksi protes yang dilakukan oleh FPI, yang sebagian besar bernuansa kekerasan itulah yang kemudian mendorong persepsi masyarakat untuk menyatakan bahwa FPI adalah gerakan islam radikal, islam garis keras.⁴⁰

FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh laskar paramiliternya yakni Laskar

⁴⁰ Berbagai rekaman aksi kekerasan yang ditampilkan oleh FPI dapat disimak dalam rangkuman berita bertema yang disajikan dalam situs majalah Tempo, baca selengkapnya di: <http://www.tempo.co/topik/lembaga/45/Front-Pembela-Islam--FPI>.

Pembela Islam. Rangkaian aksi penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, ancaman terhadap warga negara tertentu, penangkapan (*sweeping*) terhadap warga negara tertentu, konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa.

Walaupun disamping aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh,⁴¹ bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya, yang menurut Ketua Majelis Tanfidz FPI jarang diekspos oleh media nasional

Tindakan FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya institusi yang berhak melakukan hal tersebut dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki inisiatif untuk melakukannya.

Habib Rizieq, sebagai ketua FPI, menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Menurut Rizieq kekerasan yang dilakukan FPI dikarenakan kemandulan dalam sistem penegakan hukum dan berkata bahwa FPI akan mundur bila hukum sudah ditegakkan. Ia menolak anggapan bahwa beberapa pihak

⁴¹ Baca selengkapnya di <http://www.tempo.co/read/news/2005/01/12/05554834/Relawan-FPI-Tidur-di-Kuburan>

menyatakan FPI anarkis dan kekerasan yang dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.

Yang tak kalah menyita perhatian dunia internasional adalah aksi FPI dalam menentang penerbitan majalah *Play Boy* di Indonesia. Isu ini menjadi cukup ramai dan FPI dengan segala kegagahannya menyatakan menolak hal tersebut. Penerbitan majalah *Play Boy* yang semula dipusatkan di Jakarta dan dilaunching di Jakarta pada akhirnya harus dipindahkan dan berkantor di Bali. Namun, persoalan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Proses majalah *Play boy* Indonesia akhirnya juga terkendala.⁴²

C. Ormas Islam dan UU Ormas

Ormas Islam tentu tidak terlepas dari jerat pemberlakuan Undang-undang organisasi kemasyarakatan. Isu tentang penentangan berbagai kalangan ormas terhadap pengundangan UU ormas ini santer diberitakan media pada tahun 2013. Oleh karena itu, meski kajian terhadap Ormas Islam dalam penelitian ini hanya menyangkut pemberitaan yang terjadi selama tahun 2012, tetapi penting kiranya memberikan sedikit gambaran mengenai problematika pengundangan UU Ormas ini.

Sekitar Oktober 2007, Pemerintah—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/ Kemdagri—berupaya mendesakkan draf RUU Ormas kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Namun berkat tiga lembar kertas fakta yang

⁴² Penjelasan mengenai kasus Majalah *Play Boy* dan aksi FPI sebagaimana tampak dalam Helen Pausacker. "Playboy, the Islamic Defenders' Front and the Law; Enforcing Islamic Norms in Post-Soeharto Indonesia?," *Australian Journal of Asian Law*, Vol 13, No 1 (2012): 1-20.

memuat tanya-jawab seputar Tolak UU Ormas yang disodorkan oleh PSHK, YAPPIKA, ELSAM, ICW, GAPRI, PKM, KONTRAS, WALHI, KPI, IMPARSIAL dan UPC, Baleg menolak draf RUU Ormas versi Pemerintah tersebut.

Dengan demikian upaya Pemerintah merevisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) semenjak 2006 kandas sementara waktu.

Terhitung sejak tahun 2006, Pemerintah gencar menggolkan RUU Ormas yang ternyata mendapat dukungan beberapa agensi asing yang berkepentingan terhadap pengontrolan organisasi masyarakat sipil. Tercatat ada tiga agensi asing yang terlibat memfasilitasi proses revisi UU Ormas.

Pertama adalah UNDP melalui Program *Civic Engagement in Democratic Governance Project* atau CIVED, yang memfasilitasi Kemdagri untuk menyusun peraturan perundang-undangan secara partisipatif. Dukungan kedua diberikan oleh *Charity Commission*, sebuah komisi dari Pemerintah Kerajaan Inggris dengan tujuan untuk membuat kode etik bagi LSM. Lepas dari *Charity Commission*, Kementerian selanjutnya difasilitasi oleh GTZ (sekarang bernama GIZ), sebuah agensi dari Pemerintah Jerman.

Keberadaan agensi asing dalam proses revisi terlihat sangat mewarnai substansi draf RUU Ormas Pemerintah, termasuk judul rancangan undang-undangnya sendiri. Judul RUU Ormas sebelumnya dinamai RUU Lembaga Masyarakat dan RUU Organisasi Masyarakat Sipil. Di dalamnya termuat ide untuk membuat Komisi Organisasi Masyarakat yang bertujuan untuk

mewujudkan kredibilitas, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas organisasi masyarakat.

Pernah pula muncul ide tentang Forum/Dewan Nasional Lembaga Masyarakat yang berfungsi melakukan koordinasi dan membangun sinergi antar lembaga masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dan Pemerintah.

Revisi UU Ormas ini masuk menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) semenjak 2005-2009, meski tidak pernah dilakukan pembahasan. Lantas mengapa sekarang ini Pemerintah bersama DPR terlihat sangat cepat ingin menyelesaikan pembahasan RUU Ormas?

Setelah hampir satu dekade Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menjadi *leading sector* revisi UU Ormas, tiba-tiba pada penghujung 2010 DPR “mengambil alih” tugas ini. Baleg pun kemudian menyiapkan RUU Organisasi Masyarakat. Di tingkat DPR, Dewan membentuk Pansus RUU Ormas pada 3 Oktober 2011 yang diketuai oleh Abdul Malik Haramain, politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Apa sebenarnya alasan di balik revisi ini? Kebutuhan mendesak apa yang harus diatasi dengan merevisi UU Ormas? Untuk menjawab pertanyaan ini, seringkali DPR dan Pemerintah mengatakan bahwa alasan revisi UU Ormas dibutuhkan sebagai dasar untuk menindak pelaku kekerasan oleh kelompok ormas. Tentu saja tidak akan ada yang menyangkal alasan ini.

Alasan lain adalah kecurigaan para ultranasionalis terhadap ‘bantuan asing’ untuk tindakan terorisme atau pencucian uang atau menyetir ormas

yang akan mengakibatkan terganggunya kesatuan NKRI. Dengan alasan tersebut Pemerintah memerlukan UU Ormas baru untuk menjaga stabilitas NKRI.

Namun apakah benar kita membutuhkan UU Ormas baru dengan menerima begitu saja alasan-alasan tersebut? Pelaku kekerasan entah yang bertameng dalam sebuah ormas atau tidak, sudah pasti harus ditindak. Apalagi para pelaku kekerasan tersebut dapat dengan gampang dilihat wajahnya di televisi. Oleh karena itulah, revisi UU Ormas sebagai sebuah keharusan untuk menyelesaikan persoalan kekerasan, terasa dan terdengar sangat tepat.

Tidak dilakukannya penegakan hukum pada pelaku kekerasan tidak berkaitan dengan UU Ormas maupun proses revisinya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum.

Jika revisi UU Ormas dikaitkan dengan kecurigaan terhadap dampak 'bantuan asing', maka undang-undang ini sesungguhnya berbenturan dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara proses awal revisi UU Ormas ini jelas-jelas Pemerintah sendiri mendapat dukungan dan fasilitasi dari 'bantuan asing'.

Pemerintah juga sempat berdalih butuh UU Ormas sebagai alat pendorong transparansi dan akuntabilitas ormas yang berbadan hukum

yayasan. Padahal kita telah memiliki UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mengatur mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan yayasan.

Jika memang hendak mendorong akuntabilitas dan transparansi yayasan, selain dasar hukum yayasan yang sudah diatur, Pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan dan melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menetapkan organisasi nonpemerintah termasuk badan publik nonpemerintah yang harus transparan kepada publik.

UU Ormas lahir dengan semangat mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat. Disahkan pada 17 Juni 1985, UU Ormas merupakan bagian dari Paket Undang Undang Politik bersama dengan RUU Pemilu, RUU Parpol, RUU MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU Referendum. Sementara UU lainnya telah direvisi seiring dengan iklim demokrasi Indonesia yang terus berkembang, substansi UU Ormas justru memburuk.

Perlu Diingat, bentuk Ormas diciptakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk menerapkan konsep “wadah tunggal” dan “azas tunggal”. Ini sebuah konsep yang dipaksakan untuk mengekang kemerdekaan berserikat dan berkumpul masyarakat. Konsep dari sebuah pemerintah otoritarian yang takut pada warganya sendiri sehingga perlu untuk menempatkan organisasi sejenis dalam satu wadah sehingga mudah dikontrol dan diawasi.

Dua tahun setelah UU Ormas disahkan tahun 1985, Pelajar Islam Indonesia (PII) yang berasaskan Islam dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang berasaskan Marhaenisme dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam dengan alasan menolak menyesuaikan diri dengan UU

Ormas baru itu. Babak baru pelanggaran kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai cara yang 'sah' dan 'legal' dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.

Pasal pembekuan dan pembubaran organisasi yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang menjadi instrumen pelanggaran HAM oleh Pemerintah. Berbagai pemikiran yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan NKRI menjadi ancaman yang harus dilenyapkan dengan paksa.

Bentuk "Ormas" sendiri tidak jelas posisinya dalam kerangka hukum yang benar. Kerangka hukum yang ada untuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, seperti telah disinggung di muka.

Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*) yang dikeluarkan pada 28 Maret 1870. Mengingat hal ini, Pemerintah semestinya bukan merevisi UU Ormas tetapi seharusnya mencabutnya.

Tidak seperti UU Yayasan dan Stb. 1870-64 yang memberikan status badan hukum, UU Ormas hanya memberikan status terdaftar melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kementerian Dalam Negeri. SKT ini ibarat 'stempel sah' ijin

operasi sebuah ormas yang sewaktu-waktu dapat dibekukan atau dicabut oleh Pemerintah.

Fakta diatas menggambarkan betapa RUU Ormas telah lama berproses dan selalu menuai kegagalan untuk diundangkan. Pada tahun 2013 ini, RUU ormas juga mendapat tentangan yang luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa pasal disinyalir memberatkan dan berpotensi memberangus hak masyarakat untu berserikat.⁴³

Berbagai elemen masyarakat yang menolak disahkannya RUU Ormas terus bergulir. tidak hanya yang berlatar belakang Ormas Islam mulai buka suara untuk menolak pengesahan RUU Ormas. Di antaranya Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menginginkan dan menyuarakan penolakan terhadap RUU Ormas. Mereka menggelar aksi di halaman Gedung Sate, Kota Bandung.⁴⁴

Maraknya penolakan dari berbagai ormas/pihak terhadap pengesahan RUU Ormas, dikarenakan RUU tersebut akan membungkam kekritisian rakyat terhadap kezholiman yang sangat mungkin terjadi dalam system demokrasi seperti sekarang ini. Jika pun sejumlah aspirasi rakyat disampaikan melalui aktivitas aksi/unjuk rasa/demonstrasi, hal itu semata-mata bukan untuk

⁴³ Terdapat sekurangnya delapan pasal yang disinyalir memberatkan, selengkapnya baca <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492975/RUU-Ormas> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

⁴⁴ <http://www.annah.com/news/2013/04/09/mengapa-kita-harus-> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

mengemis kepada wakil rakyat agar RUU ini dibatalkan; melainkan untuk menyatakan pendapat dan menyadarkan bahwa RUU Ormas ini memang pantas ditolak karena pasti merugikan umat Islam, memberangus dakwah Islam, dan bertentangan dengan syariah.

Rapat Paripurna DPR pada 25 Juni 2013 belum sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang walaupun semua fraksi menerima, kecuali Fraksi Partai Amanat Nasional. Menurut Muhammad Najib, anggota Pansus RUU Ormas F-PAN yang juga mantan aktivis Muhammadiyah, mengatakan F-PAN lebih condong menyetujui pengesahan RUU Ormas karena sejumlah ormas mengubah posisi mereka dari menentang menjadi mendukung. DPR sendiri, bila tidak ada aral melintang, akan mengesahkan RUU Ormas pada hari ini, 2 Juli 2013.

Pembahasan RUU Ormas sudah memakan waktu sangat lama. Ide Pemerintah membuat RUU Ormas yang kemudian disambut legislatif sudah terjadi sejak 2011. Sehingga dapat dibayangkan berapa besar anggaran negara yang sudah dikeluarkan untuk memahaminya sampai saat ini. Meskipun demikian, menurut catatan berbagai kalangan, setidaknya ada 98 ormas yang menolak RUU ini, termasuk salah satunya Muhammadiyah.⁴⁵

Menurut Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, RUU Ormas akan membalikkan arah jarum jam sejarah ke arah otoritarianisme dan represif. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena

⁴⁵ <http://pelitaonline.com/opinions/ruu-ormas-antra-idialisme-dan-realita> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

melemahkan konsolidasi demokrasi Indonesia dan mempersempit ruang partisipasi publik. Din Syamsuddin menilai pembahasan RUU Ormas sudah keliru sejak awal karena bertolak belakang dengan Pasal 28 UUD 1945 yang memberi masyarakat kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.⁴⁶

Praktisi hukum senior, Adnan Buyung Nasution menilai RUU Ormas merupakan bentuk kesalahan berpikir perumus Undang-Undang (UU). Bila tetap disahkan, ia menilai RUU Ormas akan membahayakan rakyat. Saat Indonesia merdeka, negara menjamin dan memerdekakan rakyatnya. Dan memberikan kebebasan berkumpul serta berserikat kepada semua masyarakat. Tapi, RUU Ormas malah hadir untuk membatasi hak tersebut. Bila pemerintah menjadikan RUU Ormas sebagai instrumen untuk menertibkan ormas yang disebut-sebut meresahkan masyarakat, menurut Buyung pemerintah dan DPR salah mengambil langkah. Karena RUU ormas bukan jawaban untuk penertiban organisasi yang bersifat anarkis itu. Indonesia telah memiliki aturan hukum yang jelas dalam KUHP untuk menertibkan gerakan-gerakan yang dianggap meresahkan itu.⁴⁷

Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai RUU Ormas lebih represif dibandingkan UU Nomor 8 Tahun 1985. UU Nomor 8 Tahun 1985 lebih sederhana karena hanya memuat

⁴⁶ <http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2013/06/27/25509/in>. (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

⁴⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/30/mp7pkv-a> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

20 pasal sedangkan RUU Ormas memuat 88 pasal. Menurut Syaiful, PP Muhammadiyah menolak RUU Ormas karena akan mengarah kepada rezim birokrasi perizinan. Kalangan yang menolak RUU Ormas pada dasarnya menyebutkan bahwa RUU Ormas merupakan instrumen negara yang masuk ke wilayah privat dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Negara menjadi penentu dapat atau tidaknya seseorang berserikat. Ada juga yang menyatakan negara akan mengontrol seluruh aktivitas politik warga negara dengan berlindung di balik politik perizinan, pelaporan, dan pengawasan.

Mereka yang menolak juga mempersoalkan Pasal 16 yang berbunyi pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum harus memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh menteri bagi ormas yang memiliki wilayah kegiatan nasional; gubernur bagi ormas yang memiliki wilayah kegiatan provinsi; dan bupati/ walikota bagi ormas yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota.

Pasal 21 dan 61 juga dinilai menuai kontroversi karena berpotensi melanggar HAM. Dalam Pasal 61, diantaranya, disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan. Pasal itu layaknya pasal karet yang sangat subyektif.

Di negara manapun, kebebasan tetap harus “diatur” agar tumbuh menjadi kebebasan yang ramah, bertanggung jawab, dan dewasa. Indonesia dalam mengatur kebebasan warganya masih cenderung lebih moderat dibandingkan negara-negara lain, seperti Malaysia yang mempunyai Internal Security Act

(ISA), Amerika Serikat yang membolehkan CIA menyadap kebebasan warganya, dan Selandia yang memiliki banyak Undang- Undang terkait intelijen dan keamanan nasional.

Sementara itu, para penentang RUU Ormas yang mempersoalkan jumlah pasal sebenarnya juga sangat dangkal. Sebab, secara logika rasional, jelas perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional pada situasi dan kondisi UU Nomor 8 Tahun 1985 berbeda dengan perkembangan saat RUU Ormas dibuat. Perbedaannya bagaikan “bumi dengan langit”. Sehingga wajar jika RUU Ormas memuat lebih banyak pasal dibandingkan UU Nomor 8 Tahun 1985. Sebab, sejatinya pasal dalam sebuah UU merepresentasi aspek yang meminimalisasi ancaman terhadap kepentingan nasional atau percepatan gerakan dinamika persoalan itu sendiri. Pasal 61 RUU Ormas sudah jelas urgensinya. Publik sudah pasti tidak menginginkan kehadiran ormas yang menjadi “distributor anarkisme”. Sedangkan Pasal 16 – soal pendaftaran ormas – sejatinya dilandasi oleh semangat bukan untuk mengontrol melainkan membina (jika penolak RUU Ormas menganalisisnya secara obyektif bukan berdasarkan kepentingan politik praktis, maka akan mudah memahaminya). Pada akhirnya, kehadiran RUU Ormas sebenarnya merupakan upaya kita bersama untuk menghindari terjadinya “proknastinasti” (*policy of doing nothing*) atau kebijakan tanpa berbuat apa-apa atau nihilisasi. []

BAB III

ISU KEISLAMAN DI MEDIA MASSA TAHUN 2012

Perkembangan isu keislaman yang direkam media massa cukuplah banyak. Bagian ini akan menjelaskan data statistik mengenai klasifikasi berita yang terrekam oleh media massa sepanjang tahun 2012. Berbagai rekaman media ini memiliki variasi berita yang cukup banyak, mulai dari kaitan antara Islam dengan kekerasan, islam dengan politik, islam dengan hukum, islam dengan pendidikan, ekonomi, keluarga dan berbagai sektor lainnya. Kesemua berita tersebut, ada yang terliput berdasarkan yang melibatkan ormas Islam, namun ada pula yang terliput berdasarkan perilaku individu yang dianggap layak oleh media untuk diberitakan.

Selain berbagai kasus berkaitan dengan Islam dengan pelaku ormas Islam maupun individu, berita-berita yang tak kalah penting adalah yang berkaitan dengan institusi pemerintahan maupun institusi politik yang kemudian menyeret Islam sebagai latar pemberitaan.

Dalam tabel 1 di bawah ini disebutkan frekwensi kemunculan berita yang terliput oleh media massa selama tahun 2012, lengkap dengan rentang periode catur wulanannya.

Tabel 1: Statistik Pemberitaan Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa Tahun 2012

Periode	Isu Keislaman	Berita terkait Ormas Islam	Berita terkait Isu Keislaman Lainnya	Jumlah berita di Media Massa
Jan – Apr 2012	198	108	90	198
Mei – Agust 2012	262	84	178	262
Sept – Des 2012	281	123	158	281
Total berita tahun 2012	741	315	426	741

Sumber : Kliping Koran tahun 2012 oleh Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel. Data diolah menggunakan SPSS 16.0 for Windows.

Tampak pada tabel diatas frekwensi berita yang muncul selama catur wulan pertama (Juni-April 2012) menempati posisi yang paling sedikit dengan hanya 198 judul berita. Posisi terbesar peliputan yang dilakukan oleh media massa justru ada pada catur wulan ketiga (September-Desember 2012) dengan frekwensi berita sebanyak 281 judul. Sedangkan untuk periode catur wulan kedua (Mei-Agustus 2012) sejumlah 262 judul berita. Keseluruhan berita yang ditampilkan oleh Harian Kompas, Jawa Pos, dan Surya selama tahun 2012 mencapai 741 berita. Jumlah ini sebetulnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan berita terkait is keislaman yang ditampilkan oleh media massa pada tahun 2011.⁴⁸

⁴⁸ Gambaran mengenai frekwensi isu keislaman yang diliput oleh media massa selama tahun 2011. Jumlah berita yang terkait isu keislaman yang dimuat oleh Harian Kompas, Jawa Pos dan Surya adalah sebanyak 1.063 judul berita. Perbedaan yang mencolok antara rentang tahun 2011 dengan tahun 2012 adalah karena pada tahun 2011, media massa banyak yang meliput perhelatan Kongres GP Ansor yang dilaksanakan di Surabaya. Keberadaan momentum ini disinyalir mendorong dua media massa, Jawa Pos dan Surya, yang memang berbasis di Jawa Timur, banyak menyumbang judul berita atas momentum ini. Selebihnya lihat, Khoirun Niam, "Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Media Massa tahun 2011," Laporan Penelitian tidak dipublikasi (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2012).

Dari total berita dalam tiga periode catur wulan tersebut, berita-berita yang melibatkan pelaku Ormas Islam pada catur wulan ketiga menempati posisi teratas, sejumlah 123 judul berita, sedangkan jumlah berita teratas yang terkait dengan pelaku non-ormas Islam terletak pada periode catur wulan kedua, sejumlah 178.

Adapun secara keseluruhan berita yang melibatkan ormas Islam dengan pelaku non-ormas Islam tampak lebih banyak dilakukan oleh non-ormas Islam dengan jumlah sebanyak 426 judul berita. Sedangkan berita yang terkait dengan pelaku ormas Islam dalam rentang waktu tahun 2012 sebanyak 315 judul berita.

Detail gambaran mengenai kejadian-kejadian terklasifikasi pada masing-masing periode catur wulan dapat disimak dalam penjelasan di bawah. Klasifikasi kejadian per periode catur wulan diketengahkan dalam sub-sub tertentu yang meliputi: isu keislaman yang terkait pelaku ormas Islam dan terkait pelaku non-ormas Islam—yang dalam bagian ini juga disebut sebagai isu keislaman lainnya. Pada masing-masing isu keislaman yang terkait pelaku tersebut dijelaskan pula klasifikasi-klasifikasi topik berita yang ada di dalamnya, meliputi kekerasan, hukum dan politik, serta isu keislaman lainnya yang menyangkut pelaku ormas Islam dan non-ormas Islam. Pada setiap periode catur wulan juga dijelaskan frekwensi berita yang ditampilkan oleh masing-masing media massa.

Khusus yang berkaitan dengan topik kekerasan, mengingat frekwensi kebalikan dari kekerasan yakni meliputi tema perdamaian, harmoni, dan pluralism sangat jarang muncul, maka tema-tema kebalikan kekerasan ini juga diklasifikasi dalam tema kekerasan. Artinya, jika pembaca menemukan klasifikasi data yang

berkaitan dengan kekerasan tentunya di dalamnya juga mengandung berita yang memuat tentang perdamaian, harmoni dan pluralisme.

Selain alasan diatas, penggabungan kekerasan dan varian yang menjadi kebalikannya juga didasarkan pada argumentasi bahwa semua orang menghendaki keadaan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan akan dicarikan jalan keluarnya agar tetap menemukan jalan untuk berdamai, berdampingan membentuk suatu harmoni dan keselarasan penuh toleransi.

Dari dua argumentasi tersebut, kemudian mendorong peneliti untuk memasukkan tema perdamaian, harmoni dan pluaralisme masuk dalam kategori kekerasan. Sebagai gambaran awal, dari keseluruhan berita yang ditampilkan oleh media massa selama tahun 2012, isu-isu yang terkait harmoni, pluralism dan perdamaian tidak lebih dari 30 berita dari total 741 berita selama satu tahun 2012.

Isu-isu harmoni ini paling banyak dimuat oleh Harian Kompas. Meski demikian, pemuatan isu harmoni sebetulnya hanya menjadi bagian dari pemuatan berita yang terkait dengan kekerasan, dan terorisme. Kenyataan yang ditam;pilkan oleh Harian Kompas ini merupakan jawaban yang diandaikan oleh media tersebut bahwa kekerasan merupakan keadaan yang terkutuk. Karenanya situasi yang damai menjadi pilihan dan jalan yang harus dicapai oleh berbagai pihak. Hal tersebut sebagaimana tampak dalam berita Harian Kompas sebagai berikut:

Hubungan Umat Beragama; Islam Seharusnya Mengayomi

Umat Islam seharusnya mengayomi seluruh komponen bangsa Indonesia dan menjadi payung besar untuk melindungi mereka dalam wadah negara kasatuan. Islam yang berwawasan kebangsaan di Indonesia akan

semakin meneguhkan agama ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dengan demikian, menurut ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin, tak seharusnya umat Islam marah dan bertindak anarki jika ada umat lain menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka. Din menyampaikan dukungannya atas jalan jalan Islam kebangsaan yang diusung Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap Partai Demokrasi Perjuangan, saat berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (6/1).

"Umat Islam adalah kelompok mayoritas di tubuh bangsa ini yang berperan dan berjasa besar dalam pembentukan Indonesia, harus merasa punya kepercayaan diri dan punya tanggung jawab dalam kehidupan bangsa, maka seyogianya umat Islam menjadi pengayom bagi seluruh elemen bangsa termasuk minoritas umat agama lain. Oleh karena itu, sejalan dengan misi Islam yang rahmatil lilalamin, maka terhadap segala permasalahan itu bisa diselesaikan secara persaudaraan, diantara umat beragama, suku-suku bangsa," katanya.

Dia yakin bahwa umat Islam bisa menyelesaikan secara arif persoalan diantara umat beragama. Akan tetapi menurut dia, tetap harus ada peran negara di tengah-tengahnya. Menurut Din, persoalan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat, bisa selesai seandainya negara turut hadir ditengahnya.⁴⁹

A. Isu Keislaman Periode Januari – April 2012

Isu keislaman pada periode catur wulan pertama (Januari-April 2012) banyak didominasi oleh keterkaitan Ormas Islam. sebanyak 54.5% isu-isu yang berkaitan dengan ormas Islam. dan hanya sebesar 45.5% saja isu yang berkaitan dengan pelaku non-ormas Islam.

Pelaku ormas Islam pada periode ini tidak saja ditampilkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal, melainkan juga ditampilkan oleh

⁴⁹ Kompas. Sabtu 17 Januari 2012

kelompok Islam moderat. Kedua aliran keagamaan Islam ini berkontribusi dalam menyebarkan munculnya berita mengingat banyak kejadian-kejadian unik yang ditampilkannya.

Sedangkan isu yang berkaitan dengan non-ormas Islam atau pelaku lainnya lebih banyak ditampilkan oleh pelaku individual ataupun pelaku kelembagaan pemerintah semacam institusi kementerian agama beserta turunan kelembagaannya.

Isu-isu yang berkaitan dengan pelaku non-ormas Islam juga ditampilkan oleh banyaknya kejadian yang berkaitan dengan isu pendidikan, ekonomi syariah maupun ekonomi secara umum yang bersentuhan dengan komunitas muslim.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa isu keislaman pada periode catur wulan pertama ini mencapai hamper 198 judul berita.

Tabel 2: Isu Keislaman pada Januari - April 2012

Klasifikasi Berita	Frequency	Valid Percent
Ormas Islam	108	54.5
Isu keislaman lainnya	90	45.5
Total	198	100.0

Berkaitan dengan hal tersebut, isu-isu keislaman yang nampak pada periode ini cenderung didominasi oleh proses hukum yang berkaitan dengan aktifitas-aktifitas terorisme maupun aktifitas proses politik tertentu yang melibatkan ormas Islam

Gambaran mengenai hal ini sebagaimana tampak dalam rekaman berita yang ditampilkan oleh media massa berikut:

Suara ledakan keras terdengar setelah pembacaan vonis penjara tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan penjara terhadap ketua Front Pembela Islam (FPI) DIJ-Jawa tengah Bambang tedi kemaren. Suara ledakan itu sontak mengagetkan warga sekitar dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan sidang kasus penganiayaan di Pengadilan negeri Yogyakarta.

Diketahui, muasal suara ledakan tersebut sekitar 200 meter dari kantor PN di simpang tiga jalan Kenari. Tepatnya di sebuah lahan kosong yang terdapat di selatan kompleks stadion Mandala Krida.⁵⁰

Berita diatas berjudul Ledakan keras setelah sidang ketua FPI, dan merupakan berita yang dilansir oleh Harian Jawa Pos pada tanggal 18 April 2012. Berita lain yang terrekam selama periode catur wulan pertama yang berkaitan dengan politik antara lain ditunjukkan oleh laporan berikut:

Ormas berbasis keagamaan kembali menjadi payung elemen-elemen dengan jalan politik berbeda. Dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang baru saja selesai disusun, setidaknya dua nama, yakni zanuba Arifah Chafsah (Yenni Wahid) dan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar berhasil disandingkan.

Keduanya yang dalam percaturan politik NU kerap diposisikan tidak hanya berbeda, tapi huga berhadapan, akhirnya bias duduk bersama dalam jajaran Dewan Penasehat ISNU periode 2012-2017. Bersama keduanya dipercaya pula sejumlah nama terkenal lainnya.

Berita dengan judul “Yenni-Muhaimin bersanding di Ikatan Sarjana NU” diatas merupakan berita nasional mengenai bersandingnya sejumlah politisi yang kemudian turut masuk dalam jajaran kepengurusan ormas, ISNU. Berita yang dilansir oleh Jawa Pos pada tanggal 23 April ini menyatakan keterlibatan para politisi—entah disengaja atau tidak—dalam kepengurusan ormas Islam.

⁵⁰ Jawa Pos, 18 April 2012

Secara lokal, berita lain yang menunjukkan kaitan antara politik dengan ormas secara internal dapat disimak melalui berita berikut:

Terpilihnya M. faizin menjadi ketua GP Ansor Gresik periode 2012-2016 mulai dipersoalkan. Dia dituduh memalsukan identitas dukungan berupa SK Ansor ranting Raci wetan, kecamatan Bungah kabupaten Gresik, yang diterbitkan oleh PC IPNU Gresik saat konferan GP Ansor di Pnpes Al Karimi Tebuwung Kecamatan Dukun, Kamis (12/4).

Dokumen yang diduga palsu itu ditemukan panitia pengarah (SC), M. Subur. Dia mengatakan, setelah proses pemilihan ketua selesai, berkas-berkas ketua Ansor terpilih bersama tim formatur diserahkan ke PWNU Jatim dan PCNU Gresik.

Namun, berkas yang telah dikirim ke PWNU Jatim itu ternyata dikembalikan. "Saya tahunya setelah berkas itu dikembalikan dari PWNU Jatim bahwa ada berkas yang diduga dipalsukan oleh ketua terpilih" kata Subur di hadapan ketua PCNU Gresik, Husnul Khuluq bersama pengurus dan kandidat PC Ansor, Minggu (22/14).

Setelah berkas yang diduga dipalsukan tersebut diteliti panitia pengarah (SC), ditemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya soal logo kop surat pengesahan, bentuk dan ukuran huruf kop surat, tanda tangan, alamat secretariat, dan lainnya. Karena arsip dokumen di PC IPNU Gresik masih menggunakan mesin ketik manual.

Menanggapi dugaan pemalsuan surat dukungan tersebut, ketua PCNU Gresik Husnul Khuluq mengatakan, PCNU Gresik berencana melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang terlibat. "kita akan mendatangkan yang bersangkutan, agar permasalahan ini dapat jelas, sehingga sesama saudara tidak saling mencurigai, dan tetap menjadi keluarg abesar NU," kata Khuluq yang juga mantan Seka Gresik di hadapan para pengurus Ansor dan PC IPNU.⁵¹

Berita dengan judul "Ketua Terpilih Ansor Digoyang" ini merupakan berita rentetan panjang dari proses pemilihan ketua PC GP Ansor Gresik.

⁵¹ Surya, 23 April 2013

Tarik menarik kepentingan dalam pemilihan ketua ormas Islam biasanya juga menyita perhatian tersendiri. Kasus local yang demikian ini tampaknya juga banyak menghiasi pemberitaan media massa. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dimainkan oleh media massa untuk meliput berita-berita yang sebetulnya jika dianggap kurang menarik, namun jika diketahui celahnya dapat ditulis dan diturunkan dengan judul yang *mentereng*.

Dari tiga gambaran berita diatas, tampak bahwa ormas memainkan peran penting dalam menyumbang pemberitaan media massa. Kasus-kasus yang berkaitan dengan ormas, yang selanjutnya dianggap oleh media massa sebagai sesuatu yang layak diberitahukan kepada masyarakat, merupakan kasus yang tidak bias dengan begitu saja diberitakan satu kali, melainkan memiliki rentetan berita yang panjang. Kadang, juga terkait dengan proses yang terjadi di tahun sebelumnya.

Berbagai macam berita tersebut menunjukkan bahwa ormas dalam proses dan aktifitasnya memiliki rentetan panjang dengan tahun sebelumnya. Hal ini oleh media massa tetap dianggap sebagai sesuatu yang layak diberitakan kepada masyarakat.

Selain ormas, isu keislaman lainnya, yakni yang terkait pelaku non ormas Islam sebagaimana tampak ditunjukkan oleh rekaman media massa sebagai berikut:

Kementerian Agama (Kemenag) meminta Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan aturan hak perdata anak hasil hubungan di luar nikahmempertimbangkan aspek non-hukum positif, yaitu Al-Qur`an dan Hadist. Sebab, masyarakat bakal resah jika terjadi perbedaan putusan

tentang status anak di luar nikah antara MK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Masyarakat seperti dibenturkan antara aturan konstitusi dan syariah yang saling bertentangan,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar ketika dihubungi di Jakarta kemaren (26/3).

Dia menerangkan, disatu sisi, MK kukuh pada putusannya bahwa anak diluar nikah memiliki hak perdata dengan ibu dan bapak. Sedangkan MUI menilai melalui fatwa yang didasari ayat Al-Qur'an dan hadist, ngotot bahwa anak haram hanya memiliki nasab dengan pihak ibu dan keluarga ibu.

Menurut Nasaruddin, jika dijalankan, aturan MK tadi bertentangan dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kental menggunakan landasan syariah. Dalam UU tersebut diatur bahwa anak hasil hubungan di luar nikah adalah anak ibunya.

Karena itu, Nasaruddin berpendapat, dalam menetapkan aturan tentang hak perdata anak yang lahir di luar nikah, MK semestinya juga mempertimbangkan hukum Al-Qur'an dan Hadist. Jika tidak, khawatir putusan MK itu akan diabaikan masyarakat.

Karena putusan MK tentang hak perdata anak haram terlanjur keluar, Nasaruddin berharap MK bias berbesar hati untuk mengoreksinya. Dengan begitu, hasilnya tidak berseberangdengan fatwa MUI yang didasarkan pada AL-Qur'an dan Hadist.

Secara kelembagaan, Nasaruddin mengatakn, Kemenag terus menghadapi dilemma yang super berat. Dia mengatakan, Kemenag tidak bias menjalankan putusan MK. Sebab, langkah itu akan menabrak hukum syariat Islam sebagaimana difatwakan MUI. Sebaliknya, jika Kemenag nekat menjalankan fatwa MUI dan meninggalkan fatwa MK, mereka bias dianggap melanggar konstitusi. “Sangat dilematis, tapi bagaimanapun harus dicarikan titik temunya,” ujarnya.⁵²

Gambaran mengenai isu keislaman lainnya yang ditampilkan oleh media massa menunjukkan bahwa pelaku non-ormas memiliki kecenderungan

⁵² Jawa Pos, 27 Maret 2012

tersendiri yang kemudian ditangkap oleh media massa sebagai sesuatu yang layak diketengahkan kepada khalayak.

Berita ini memang bukanlah berita aktual semacam liputan tentang kejadian aksi teror, juga bukan berita yang diliput dan didasarkan pada seminar ataupun kegiatan sejenisnya. Pada paragraph diatas, penjelasan mengenai media memiliki kemampuan tersendiri untuk menilai layaknya suatu informasi diberitakan, telah menunjukkan bahwa meski kasus ini diberitakan hanya berdasar wawancara, namun yang demikian ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Pada berita diatas yang diberi judul "Kemenag Bakal Mediasi MK-MUI", pembaca diajak untuk melihat lebih jauh bahwa persoalan anak di luar nikah versi MUI dan versi MK mengalami perbedaan pemahaman.

Data yang hampir 45.5% berisi berita keislaman lainnya pada periode ini menunjukkan bahwa isu keislaman yang melibatkan pelaku individual, institusi kenegaraan ataupun pelaku bisnis syariah dan pendidikan memiliki tempat yang berarti bagi media massa. Berita lain yang terkait dengan pelaku non ormas Islam adalah sebagai berikut:

Menteri Agama Suryadharma Ali memprediksi bahwa biaya Ibadah Haji tahun ini akan naik. Pertimbangannya, ada kenaikan sejumlah komponen yang turut menentukan biaya haji. Pihaknya belum bias menentukan berapa biaya haji itu.

"Masih dalam pembahasan, tetapi tanda-tanda kenaikan itu ada." Kata Suryadharma, Senin (12/3), seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Suryadharma mengatakan, tanda-tanda kenaikan itu

antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS.⁵³

Berita dengan judul “Biaya Haji Diperkirakan Naik” yang dilansir oleh Kompas ini menunjukkan bahwa soal haji yang esensinya adalah ibadah sebetulnya juga memiliki motif ekonomi tinggi, mengingat biaya haji juga bukan perkara yang mudah. Dalam berita lain disebutkan maraknya talangan haji juga mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba berangkat haji. Talangan ini juga berpengaruh pada kemudahan mendaftar haji dan kemudian membayar secara mengangsur. Bisnis talangan haji, memiliki motif ekonomi yang tinggi.⁵⁴

Setelah menyimak berbagai berita yang ditamp;ilkan oleh media massa diatas, perbedaan antara pelaku ormas Islam dan non-ormas Islam memiliki motif yang berbeda-beda. Ormas islam lebih banyak diberitakan kaitannya dengan entitas yang lain; hukum politik dan kekuasaan. Sedangkan non-ormas islam lebih banyak pada persoalan hajat hidup manusia banyak, seperti haji dan anak di luar nikah, sebagaimana tampilan berita diatas.

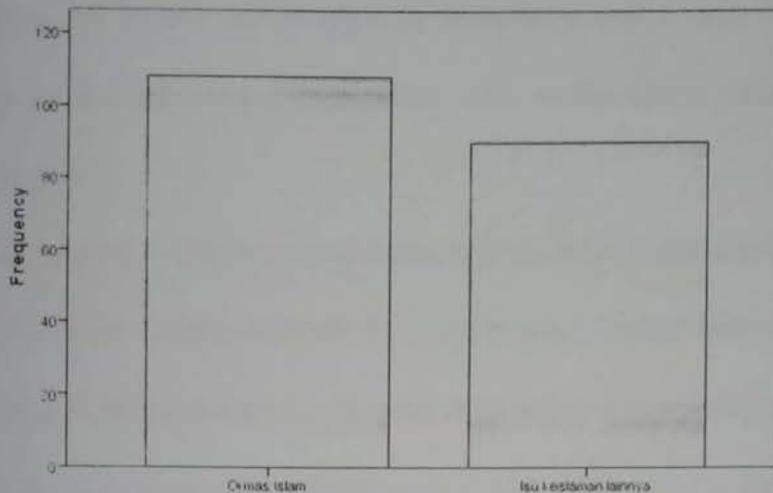
Grafik dibawah meski tidak ada kesenjangan yang signifikan antara isu keislaman dengan pelaku ormas Islam ataupun yang ditampilkan oleh non-ormas Islam menandakan bahwa kedua peristiwa ini memiliki arti penting bagi media massa. Berikut adalah grafik yang menunjukkan gambaran

⁵³ Kompas, 13 Maret 2012.

⁵⁴ Berita mengenai talangan haji ini sebagaimana dilansir oleh Harian Surya, 6 April 2012 dengan judul Talangan haji Banjir Peminta: pertumbuhan diatas 50 persen, didominasi wirausaha dan PNS

rekaman peristiwa yang ditampilkan oleh pelaku ormas Islam dan pelaku non-ormas Islam atau isu keislaman lainnya.

Bagan 1: Isu Keislaman pada Januari - April 2012



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa isu-isu yang terkait dengan Ormas Islam masih menempati posisi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan isu lainnya. Maksudnya adalah jika isu ormas saja yang mencapai angka 54.5% dan isu lainnya yang meliputi berbagai satuan pelaku hanya menempati posisi 45.5%, maka dapat dinyatakan bahwa ormas Islam merupakan entitas penyumbang berita terbesar dalam isu-isu yang berkaitan dengan keislaman. Ini berarti ormas Islam masih memiliki kekuatan yang luar biasa dalam meregulasi perkembangan sosial kemasyarakatan. Baik dinamika sosial yang berkonotasi positif maupun dinamika sosial yang berefek negatif.

Keadaan yang demikian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan kemasyarakatan, utamanya yang terkait dengan basis keagamaan tertentu, memanfaatkan dan mendorong pelaku-pelaku ormas amatlah strategis. nilai ke-stragis-annya terletak pada kemampuan ormas mengatur berbagai kohesi

sosial dan kemudian memainkannya untuk pengembangan dan perbaikan keadaan.

Guna mengetahui satuan kegiatan ormas yang merangsang media untuk meliputnya, di bawah ini merupakan klasifikasi berita yang terkait dengan topik-topik tertentu yang dimunculkan oleh media massa berkaitan dengan pelaku ormas.

Pada bagian selanjutnya juga ditampilkan topik-topik terklasifikasi yang ditampilkan oleh pelaku non-ormas islam (isu keislaman lainnya). Selain itu, juga ditampilkan frekwensi berita yang diturunkan oleh masing-masing media massa berkaitan dengan isu keislaman selama periode catur wulan pertama ini.

1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam

Penjelasan diatas merupakan penjelasan umum kaitan antara isu keislaman yang ditampilkan oleh ormas Islam dengan isu keislaman yang ditampilkan oleh non-ormas Islam atau pelaku lainnya. Sub ini hendak memberikan gambaran spesifik mengenai isu-isu yang ditampilkan oleh ormas Islam berkaitan dengan topik-topik tertentu.

Dalam klasifikasi sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, isu kekerasan periode catur wulan pertama (Januari-April 2012) tidak dapat dikatakan sebagai isu yang kuat, karena topik ini hanya muncul sebanyak 38.9%.

Pada periode catur wulan pertama ini, justru yang banyak dimainkan oleh ormas Islam adalah isu yang berkaitan dengan hukum dan politik yakni sebesar 50.0%. Sedangkan isu lainnya yakni isu yang diluar dua

topik tersebut hanya menempati sebesar 11.1%, sebagaimana tampak dalam table berikut:

Tabel 3: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Januari - April 2012

Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	42	38.9
Hukum dan Politik	54	50.0
Lainnya	12	11.1
Total	108	100.0

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan ormas Islam terhadap hukum dan politik yang dianggap media sebagai sesuatu yang bernilai berita amatlah tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai problem sosial politik yang dihadapi oleh ormas, yang memaksa mereka untuk lebih intens bersinggungan dengan proses politik ataupun proses hukum.

Periode catur wulan pertama merupakan periode pemanasan pada proses kontestasi politik 2014. Berbagai kegiatan seremonial partai digelar dengan mendekati berbagai elemen masyarakat. Berita berita terkait hal ini dapat disimak pada kutipan berikut:

Di Lirboyo, Sengaja Dekati NU

JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim kemesraan hubungannya dengan nahdlatul Ulama (NU) mulai membuahakan hasil. Setidaknya, survey LSI terakhir menjadi salah satu indikasi.

Ketua bidang Komunikasi DPP PPP M. Arwani Thomafi menyatakan, hasil survey LSI memberikan gambaran adanya tren kenaikan suara partai. Ini jika dibandingkan dengan hasil survey lembaga yang sama sebelumnya. "Salah satu factor kenaikan suara PPP dalam survey LSI adalah kembalinya kiai dan warga NU ke PPP," Ujar Arwani Thomafi di Jakarta kemaren (2/2)

Survey LSI terakhir mengungkap bahwa PPP meraih 4.9% atau sama dengan capaian partai Gerindra. Posisi pertama ditempati Golkar (15.5%), Demokrat (13.7%), dan PDIP (13.6%). PPP sementara berhasil mengungguli PKB (4.6%), PAN (4.1%), PKS (3.7%), dan Hanura (1.2%)

Sementara itu Mukernas PPP dibuka hari ini (21/2). Pemilihan lokasi di pesantren Lirboyo Kediri, juga menjadi indikasi keseriusan partai berlambang ka'bah tersebut menggarap masa pemilih nahdliyyin. Sekjen DPP PPP M. Romahurmuzy mengakui, pemilihan Lirboyo sebagai lokasi mukernas memiliki maksud tertentu. "Ini bukti kami punya hubungan emosional dengan NU," jelasnya.⁵⁵

Sedangkan berita terkait yang juga bernada sama adalah mengenai keterkaitan antara ormas Islam dengan proses politik sebagaimana tampak dalam berita dengan judul "Kiai NU Mulai Terpecah", berikut:

Mojokerto, Surya – Buntut persetujuan antara PCNU Kabupaten Mojokerto dengan bupati Mustofa Kamal Pasa, mulai berbuntut. Sejumlah kyai pun pecah, bahkan tim 9 yang dibentuk PCNU untuk menangani persoalan ini, jalan ditempat.

Sekretaris tim 9 Purwanto menyatakan, selama beberapa pekan terakhir tim 9 lebih banyak bungkam. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan para kyai. Meski begitu tim 9 tetap bekerja dan menyiapkan bahan-bahan bukti untuk dilanjutkan ke ranah hukum.

Ia mengklaim, saat ini tim yang dipimpin Syaiful Amin tersebut sudah memiliki data lengkap terhadap unsur pidana yang dilakukan bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan pengusaha galian C. "Data itu sudah lengkap dan sudah siap kami layangkan untuk mempidanakan bupati," ujarnya.

Meski tim 9 sudah mempunyai banyak bukti, tetapi tim ini belum bisaberbuat banyak. Mereka harus menunggu instruksi dari para kyai untuk melangkah lebih lanjut. "Nasib kita juga digantung. Kita belum bisa melangkah

⁵⁵ Jawa Pos, 21 Februari 2012

kemana-mana.” kata dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.⁵⁶

Berita diatas memberi arti bahwa proses politik selalu melibatkan Ormas Islam. Ormas Islam masih dianggap sebagai entitas yang strategis mengalahkan partai politik itu sendiri dalam mendulang suara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ormas Islam, meski dapat dikatakan tidak berpolitik tetapi sesungguhnya juga menjadi penentu proses politik.

Sedangkan isu kekerasan yang muncul pada periode ini, yang ditampilkan oleh pelaku ormas Islam masih berkisar pada proses-proses yang terkait dengan hal-hal kecil. Kekerasan tidak tampil sebagai sesuatu yang menonjol. Hal ini sebagaimana tampak pada berita berikut:

Said Aqil: NU Harus Lindungi Ahmadiyah

Mataram – Ketua umum PB NU Said Aqil Siradj merasa prihatin atas masih maraknya perilaku intoleransi di Indonesia dewasa ini. Sejumlah pengusiran jamaah Ahmadiyah di beberapa daerah mendapat perhatian secara khusus.

”Terus terang saya prihatin. Masih ada saya pengusiran disana-sini terhadap warga Ahmadiyah.” ujar Said Aqil di depan pengurus NU se-NTB di Santosa Villas & resort, Lombok, tadi malam (18/1).

Dia menegaskan bahwa secara akidah, pihaknya menganggap ajaran Ahmadiyah memang salah. Namun, lanjut dia, bukan berarti hal itu menjadi alasan pembenar untuk mengusir mereka.

”*Nggak* boleh kita mengusir, apalagi NU, *nggak* boleh, tegasnya. Dia menyatakan sejak didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 1926, NU merupakan wadah untuk

⁵⁶ Surya, Kamis, 19 Januari 2012

menjaga persaudaraan. Bukan hanya semata umat Islam, tetapi juga dengan berbagai elemen bangsa lainya.⁵⁷

Berita lain yang menyatakan tentang pentingnya perdamaian persaudaraan dan pluralism sebagaimana tampak oleh apa yang ditampilkan kelompok Gusdurian berikut:

Gusdurian Temui Tokoh Lintas Agama

Sidoarjo, Surya – para pengikut pemikiran mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai bersafari menemui sejumlah tokoh lintas agama. Komuntas yang menyebut diri sebagai gusdurian itu dibentuk sejak nopember 2011. Mulai kamis (19/1) pekan lalu, mereka menemui tokoh Konghucu, Bingki Irawan dirumahnya, kawasan Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

”Hari ini,” (kemarin), kami bertemu dengan sejumlah kyai Sidoarjo, termasuk pengurus Nahdlatul Ulama’ (NU), Sidoarjo,” ucap kordinator Gusdurian Sidoarjo, Dodi Syauddin, kepada Surya, minggu (22/1)

Menurut Dodi, Gusdurian Sidoarjo beranggotakan puluhan pemuda dan mahasiswa dari beragam agama; Islam, Kristen, dan Katolik. ” Sesuai pemikiran Gus Dur yang menjunjung tinggi pluralisme, anggota kami berasal dari beragam latar belakang,” ucap Dodi yang juga ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (lakpesdam) NU Sidoarjo.

Gusdurian juga menghadiri perayaan tahun baru Imlek di sebuah Kelenteng di kawasan kota Sidoarjo, minggu pukul 22.00 WIB. ”kami datang atas undangan mereka untuk merayakan Imlek.” Katanya.⁵⁸

Berbeda dengan kekerasan yang ditampilkan oleh ormas Islam, isu lainnya yang ditampilkan oleh ormas Islam adalah terkait dengan berbagai hal seperti ekonomi sebagaimana tampak dalam gambaran berita berikut.

⁵⁷ Jawa Pos. Kamis 19 Januari 2012

⁵⁸ Surya. Senin, 23 Januari 2012

Wapres Minta NU Perkuat Basis Wirausaha

Surabaya – pemerintah pusat memiliki harapan khusus terhadap saudagar NU. Hal itu terungkap dalam pembukuan Rembuk Nasional Saudagar NU dan Expo NU 2012 di Grand City Surabaya kemarin (26/1).

Harapan itu disampaikan Wakil Presiden Boediono ketika memberi sambutan dalam acara tersebut. " hari ini NU telah menggelorakan kembali semangat kemandirian dan kewirausahaan bangsa," tegas orang nomer dua di Indonesia tersebut.

Menurut Boediono, dalam sejarahnya, NU selalu menunjukkan satu fokus penting. "yakni, betapa pentingnya mempunyai kelompok wirausaha yang tangguh." Ucapnya.

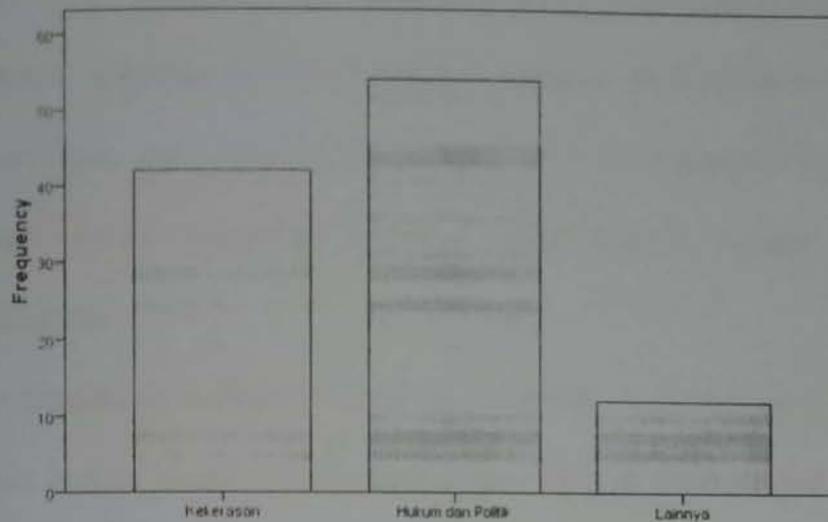
Boediono menyatakan, pemerintah bisa bersinergi bersama NU untuk membantu program pengentasan kemiskinan. " karena pemerintah tidak bisa melakukan sendiri," tuturnya.

Pemerintah, kata Boediono, mempunyai empat cluster pengentasan kemiskinan, yakni, berbasis keluarga (program keluarga harapan, jasmaskes), berbasis komunitas (PNPM), berbasis usaha kecil menengah (kredit usaha rakyat), dan berbasis khusus (penyediaan air bersih-perahu nelayan).⁵⁹

Dari gambaran ketiga fakta diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan ormas Islam pada periode catur wulan pertama ini masih banyak didominasi oleh fakta yang berkaitan dengan proses hukum dan politik yang dijalankan oleh ormas Islam. ini menunjukkan bahwa hukum dan politik lebih banyak menyita perhatian media massa tatkala mereka menampilkan keterkaitan antara ormas Islam dengan berita-berita yang diturunkan oleh media massa. Grafik dibawah menunjukkan kesenjangan yang luar biasa tinggi antara fakta hukum dan politik yang ditampilkan oleh ormas Islam dengan isu-isu lainnya yang ditampilkan oleh entitas ini.

⁵⁹ Jawa Pos. Jum'at 27 Januari 2012

Bagan 2: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Januari - April 2012



Gambaran ini secara tegas menyatakan bahwa Ormas Islam masih menemukan dinamika yang luar biasa besar terkait dengan fakta hukum dan politik. Tentu, kejadian-kejadian diatas tidak serta merta diinginkan oleh ormas, melainkan kondisi sosial politik yang kemudian menuntun ormas Islam untuk mengambil sikap. Dan, sikap tersebut menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi media massa untuk memberitakannya kepada masyarakat.

2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)

Berbeda dengan isu keislaman yang ditampilkan oleh ormas Islam diatas, isu keislaman yang ditampilkan oleh pelaku non-ormas Islam justru hanya sebesar 17.8% yang berkaitan dengan isu hukum dan politik, dan hanya sebesar 7.8% yang berkaitan dengan isu kekerasan. Isu terbesar justru tampak pada isu lainnya (74.4%).

Memang, gambaran pemberitaan media massa terhadap isu lainnya dengan pelaku non-ormas Islam pada periode catur wulan ini dapat

dikatakan menempati porsi besar, mengingat periode ini banyak aktifitas-aktifitas sosial, pendidikan ataupun ekspresi keberagaman yang meliputi upacara keagamaan, ritual khusus, maupun peringatan-peringatan hari besar Islam. Isu lain yang tak kalah banyak sumbangannya pada porsi ini adalah berita mengenai ekonomi yang berlatar pelaku maupun isu keislaman.

Gambaran mengenai detail data statistik yang berkaitan dengan topik berita terkait pelaku non-ormas Islam sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Januari - April 2012

Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	7	7.8
Hukum dan politik	16	17.8
Isu lainnya	67	74.4
Total	90	100.0

Isu-isu yang melibatkan pelaku non-ormas Islam adalah isu lain-lain yang menempati porsi sebesar 74.4%. Jumlah ini amatlah banyak. Inilah yang membedakan antara ormas Islam dengan pelaku non-ormas Islam. kenyataan ini menggambarkan bahwa proses politik, hukum dan kekerasan sebetulnya lebih banyak dimainkan oleh kumpulan yang terinstitusionalisasi semacam ormas.

Adapun berita yang menyangkut isu lainnya yang diperankan oleh pelaku non-ormas Islam adalah sebagaimana tampak dalam pemberitaan media massa berikut:

BRI Syariah Gelontor Sektor Mikro Rp 2 T

Surabaya – sektor mikro masih menjadi primadona bagi perbankan. Salah satunya BRI Syariah yang kian instens mengharap kredit mikro. Sigit Surya Suryawan, *mikro banking head BRI Syariah*, mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan menyalurkan kredit hingga 2 triliun. Jumlah itu naik signifikan jika dibandingkan dengan 2011 yang hanya Rp 1,2 triliun.

“Tiap tahun pertumbuhan kita tinggi. Di awal, penyaluran kredit mikro hanya 400 miliar,” ujarnya di sela kunjungan redaksi Jawa Pos Surabaya kemarin (26/1). Sigit menyebut, NOA (*number of account*) BRI Syariah mencapai 12.759. Rata-rata penyaluran sekitar Rp 90 juta. Tahun lalu BRI Syariah mencatat jumlah Usaha Mikro Syariah (UMS) mencapai 156 unit. “Tahun ini kita mengarah 200 jaringan,” katanya.

Apa tidak bersaing dengan induk usaha BRI yang lebih dahulu bermain mikro? Sigit menyatakan tidak. Alasannya, segmen mereka berbeda. Sang induk telah memiliki jaringan yang luas sehingga dapat seluruh menjangkau semua kota kecil di seluruh tanah air. Sementara itu, BRI Syariah hanya membidik sampai kota kedua di provinsi. “Paling kita di ibu kota-ibu kota kabupaten, karena itu kita bisa memasarkan mikro dengan teknologi,” katanya.

Teknologi yang telah diterapkan adalah penggunaan EDC (*electronic data capture*) untuk angsuran kredit. Selain itu, pengesahan proposal menggunakan mesin. “Ke depan, EDC bisa bermanfaat untuk membayar kebutuhan lain. Seperti, PLN, PDAM, atau telepon hingga kami bisa menambah *fee base income*,” paparnya.⁶⁰

Berita lainnya terkait dengan pelaku non-ormas Islam adalah tentang

ijin poligami yang diajukan oleh Syekh Puji sebagai berikut:

Izin Poligami Dikabulkan, Syekh Puji Sujud Syukur

Ungaran, Surya – Syekh Puji atau Pujiono Cahyo Widiyanto (47) langsung sujud syukur begitu mendengar putusan hakim Pengadilan Agama (PA) Ambarawa,

⁶⁰ Jawa Pos, Jumat, 27 Januari 2012

Kabupaten Semarang mengabulkan permohonan izin poligaminya, diruang sidang, (Kamis 26/1) pagi.

Wajah pengusaha kuningan asal Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ini sumringah karena sebentar lagi dapat menikahi Lutfiana Ulfa (16), sah secara hukum, setelah tertunda beberapa tahun.

Usai sidang, Syekh Puji didampingi istri pertama Umi Hanni dan calon istri kedua, Lutfiana Ulfa tak henti mengucap syukur. Bibir pemilik Pesantren Miftakhul Jannah ini selalu mengucapkan "alhamdulillah." "pastinya saya senang dengan putusan hakim," ujar Syekh Puji yang datang dengan mengendarai BMW merah nopol H 1 CW itu bersama istri pertama dan calon istri keduanya. Dengan ini, secapatnya Syekh Puji mendaftarkan rencana pernikahannya dengan Lutfiana Ulfa di kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Jambu).

Dalam sidang sekitar 30 menit itu, hakim fuad dalam putusnya menilai persyaratan yang diajukan Syekh Puji untuk poligami sudah lengkap dan memenuhi syarat. Syekh Puji sudah mendapat izin secara tertulis dan lisan dari istri pertamanya.⁶¹

Berita lain yang senada dengan ekonomi syariah adalah mengenai pajak penghasilan yang juga dikenakan pada praktek usaha syariah, sebagai berikut:

Kena pajak penghasilan; Praktek Usaha Syariah

Jakarta, Surya – sudah terbit dua peraturan tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kegiatan usaha pembiayaan syariah dan kegiatan usaha perbankan syariah.

Peraturan pertama yang terbiat adalah Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.

Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dedi Rudaedi, dalam peraturan ini ditegaskan bahwa perlakuan pajak atas kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan

⁶¹ Surya, Jumat, 27 Januari 2012

berdasarkan *Ijarah* diperlakukan sama dengan sama dengan kegiatan sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*). Sedangkan sewa guna usaha *Ijarah Muntahiyah Bittamluk* diperlakukan sama dengan sewa guna usaha hak opsi (*financial lease*).

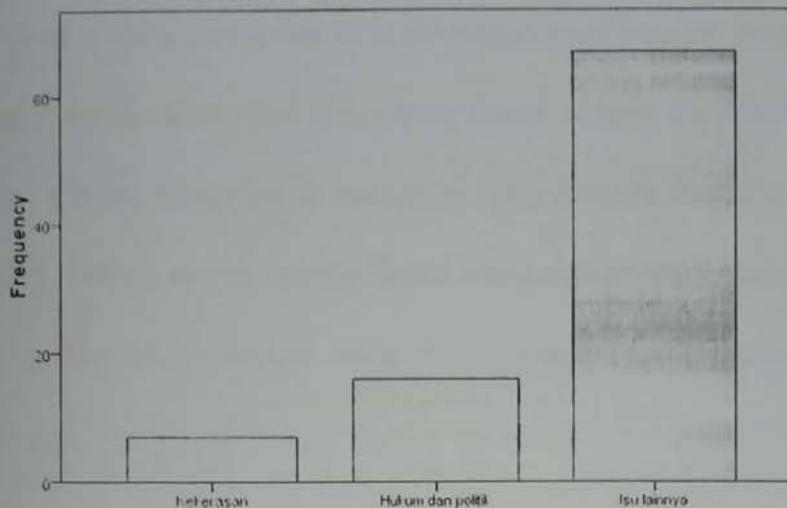
Untuk kegiatan usaha pajak piutang *Wakalat Bil Ujrah* dan pembiayaan konsumen berdasarkan akad *Murahabah, salam, dan istishna*, keuntungannya dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan pajak penghasilan atas bunga.⁶²

Dari gambaran berita diatas, fakta-fakta yang berkaitan dengan isu lainnya memiliki variasi yang cukup banyak. Akan tetapi dari berbagai variasi tersebut, isu lainnya ini tergolong lebih banyak karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, justru menghiasi pada periode catur wulan pertama ini. Selain isu ekonomi, sebetulnya variasi berita juga terdapat dalam bidang pendidikan, penyalahgunaan wewenang oleh intitusi pemerintah bidang keagamaan dan isu-isu personal lainnya.

Grafik di bawah menunjukkan betapa isu lainnya yang diperankan oleh pelaku non-ormas Islam menempati posisi yang cukup mencolok. Kenyataan ini menandakan bahwa pada periode catur wulan pertama ini, pelaku non-ormas Islam tidak bersinggungan secara langsung atau tidak banyak memerankan dirinya untuk berkontribusi pada kecenderungan peliputan media massa yang berkaitan dengan isu kekerasan, hukum dan politik.

⁶² Surya, Selasa, 17 Januari 2012

Bagan 3: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Januari - April 2012



Dapat diartikan bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh ormas Islam berkontribusi pada sumbangan-sumbangan khas yang berkaitan dengan kekerasan, hukum dan politik. Akan tetapi, pelaku-pelaku individual non-ormas Islam lebih banyak terkonsentrasi pada hal-hal diluar hukum, politik dan kekerasan.

Dua klasifikasi diatas menunjukkan perbedaan kecenderungan yang luar biasa tinggi. Maksudnya adalah bahwa kekuatan kolektif akan bermuara pada keutuhan kemampuan dan kemudian terdorong untuk melakukan berbagai kekerasan dan atau sebaliknya, harmoni serta terdorong pada proses-proses politik dan selanjutnya juga mengarah ke ranah hukum.

Kenyataan yang tampak pada periode catur wulan pertama ini memberi arti pentingnya untuk "mengontrol" ormas Islam agar tetap dalam koridor penjagaan stabilitas kehidupan sosial masyarakat.

3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa

Dari gambaran mengenai pemberitaan media massa yang menyangkut pelaku ormas Islam dan non-ormas islam dengan klasifikasi topik-topik diatas, sub ini menjelaskan mengenai jumlah berita yang ditampilkan oleh masing-masing media massa. Berita mengenai isu keislaman lebih banyak ditampilkan oleh Harian Jawa Pos, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 5: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Januari - April 2012

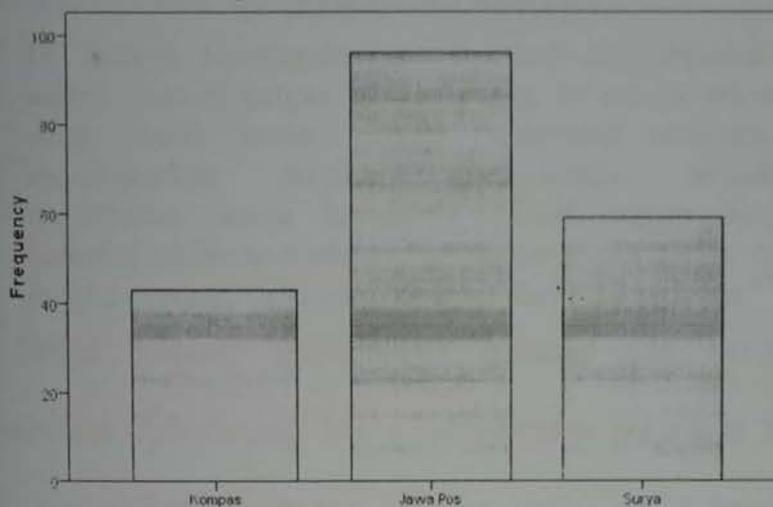
Jenis Media Massa	Frequency	Valid Percent
Kompas	43	21.7
Jawa Pos	96	48.5
Surya	59	29.8
Total	198	100.0

Berdasarkan data diatas, Jawa Pos menurunkan berita yang terkait dengan isu keislaman selama periode catur wulan pertama adalah sebesar 48.5%, Harian Kompas menurunkan berita mengenai isu keislaman pada periode ini sebesar 29.8%, dan pada urutan ketiga di tempati oleh Harian Surya yang hanya menurunkan berita mengenai isu keislmana sebesar 21.7%.

Fakta diatas menunjukkan bahwa Jawa Pos yang berlokasi di Jawa Timur mampu menemukan berbagai isu keislaman yang dianggap layak untuk diberitakan. Tentu hal ini tidak serta merta berkaitan dengan masyarakat Jawa Timur, utamanya umat Islam, merupakan entitas yang paling sering melakukan aktifitas-aktifitas yang merangsang media untuk

memberitakannya. Grafik dibawah ini menunjukkan betapa Jawa Pos terposisi pada deret grafik yang paling tinggi.

Bagan 4: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Januari - April 2012



Berita-berita keislaman yang ditampilkan oleh Jawa Pos berkenaan dengan isu keislaman umumnya berkategori straight news, yakni berita hangat mengenai kejadian yang sedang ramai di perbincangkan namun tidak memiliki nilai kedalaman yang tinggi. Salah satu contoh berita Jawa Pos mengenai isu keislaman sebagaimana yang ditampilkan oleh Fatayat NU berikut:

Fatayat: Negara tak Optimal Lindungi Perempuan

Jakarta – Pimpinan Pusat Fatayat NU hingga saat ini masih prihatin dengan kondisi perempuan Indonesia secara umum. Negara dianggap belum maksimal memainkan perannya melindungi kaum perempuan.

“Di mana negara, para pemimpin, saat ini rakyat merasa kesepian dan lapar? Dimana negara, para pemimpin, ketika para ibu dan perempuan Indonesia menghadapi kekerasan serta ketidakadilan? Di mana negara, ketika buru TKW berada di ujung penyiksaan di negeri orang?” tegas ketua umum PP Fatayat NU Ida Fauziah dalam

acara Catatan Awal Tahun dan Resolusi 2012 di kantor PBNU, Jakarta, kemarin (5/1).

Ida Menyatakan secara faktual perempuan Indonesia masih dikepung berbagai persoalan di sejumlah bidang. Melalui ketenagakerjaan, pendidikan, hingga politik. "Bidang-bidang itu pula menjadi barometer keberhasilan negara melindungi perempuan," terang dia.

Di bidang ketenagakerjaan, menurut dia, diperlukan upaya meminimalkan dan mencegah kekerasan seksual yang masih kerap terjadi. Pemerintah seharusnya meningkatkan program perlindungan terhadap perempuan secara konsisten. "Tidak cukup hanya bereaksi terhadap tindakan kekerasan secara parsial dan jangka pendek," ujar anggota DPR dari PKB tersebut.⁶³

Berita tentang perlindungan terhadap hak perempuan yang ditampilkan oleh Fatayat NU ini memberikan penjelasan bahwa Ormas juga berkonsentrasi secara terfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Jawa Pos menganggap isu ini menjadi isu strategis dan perlu didorong untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

B. Isu Keislaman Periode Mei – Agustus 2012

Pada periode catur wulan kedua (Mei-Agustus 2012) ini, isu-isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa lebih banyak berkaitan dengan pelaku non-ormas Islam⁶⁴ (isu keislaman lainnya). Sebesar 67.9% isu yang

⁶³ Jawa Pos. Jumat 6 Januari 2012

⁶⁴ Dalam banyak tabel dan grafik, pelaku non-ormas Islam juga ditulis dengan menggunakan istilah Isu keislaman lainnya. Kedua peristilahan ini mengarah pada kejadian-kejadian yang diliput oleh media massa pada tahun 2012 dan tidak ada kaitannya dengan ormas Islam. pemilihan istilah dan penekanan makna pada yang demikian ini diharapkan ormas Islam sebagai focus utama penelitian ini memperoleh porsi pembahasan dan analisa yang jauh lebih besar dan proporsional.

ditampilkan oleh media massa justru berkaitan dengan pelaku non-ormas Islam. Sedangkan hanya 32.1% yang ditampilkan oleh media berkaitan dengan pelaku ormas Islam, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 6: Isu Keislaman pada Mei - Agustus 2012

Klasifikasi Berita	Frequency	Valid Percent
Ormas Islam	84	32.1
Isu keislaman lainnya	178	67.9
Total	262	100.0

Pada tabel diatas jelas perbedaannya dengan apa yang ditampilkan pada periode catur wulan pertama. Pada catur wulan pertama Ormas Islam mendominasi pemberitaan di media massa, sedangkan pada catur wulan kedua ini. justru isu-isu keislaman yang diliput media massa lebih banyak diperankan oleh pelaku non-ormas Islam (Bandingkan dengan tabel 2).

Kecenderungan banyaknya pelaku non-ormas islam dalam pemberitaan ini tidak terlepas dari ranah sosial kemasyarakatan yang memang tidak banyak memerankan ormas Islam dalam berbagai segi kehidupan. Pada periode ini isu-isu yang berkaitan dengan ekspresi keberagaman mendapat porsi lebih banyak diberitakan oleh media massa, sebagaimana tampak dalam rekaman media massa berikut:

Peringatan Nuzulul Quran; Kembangkan Kerukunan dan Toleransi

Jakarta. Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa, salah satunya kerukunan dan toleransi. Nilai ini relevan untuk membangun solidaritas bangsa yang menghadapi tantangan dan harmoni dalam kehidupan saat ini.

Ajakan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peringatan Nuzulul Quran tahun 1433 Hijriyah/2012 tingkat nasional di istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8) malam. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunya Al-Quran ke bumi.

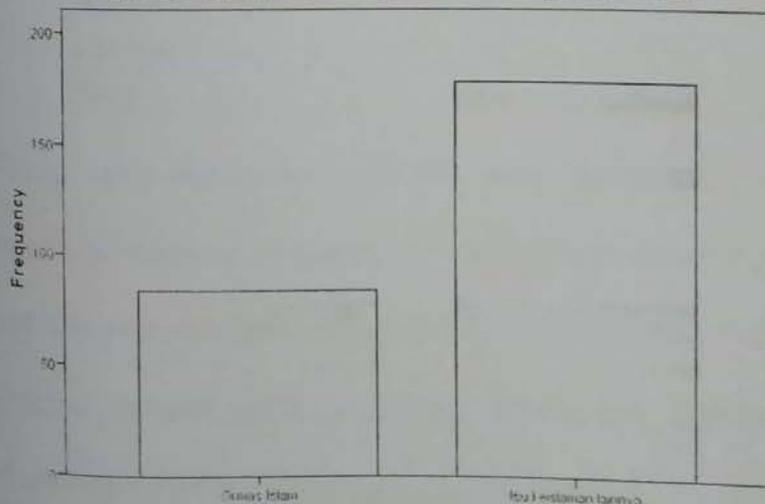
Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden Boediono beserta Ny Herawati Boediono, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Hari Poernomo, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparno, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu II, dan duta besar negara sahabat.

"Saya mengajak, mulai saat ini marilah kita hidup berdampingan secara damai, apapun agama, suku, daerah, dan perbedaan identitas lain," kata presiden.⁶⁵

Dari berita diatas dapat dikatakan bahwa acara-acara seremonial yang melibatkan perseorangan umat Islam menjai bagian tak terpisahkan dan mewarnai pemberitaan media massa.

Perbedaan yang sungguh jauh antara yang diperankan oleh ormas islam dengan pelaku non ormas islam (isu keislaman lainnya) sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 5: Isu Keislaman pada Mei - Agustus 2012



Kompas, Rabu, 8 Agustus 2012

Pada grafik diatas secara jelas dapat diketahui selama periode catur wulan kedua (Mei – Agustus 2012), isu-isu keislaman yang melibatkan pelaku non-ormas Islam jauh mendapatkan porsi pemberitaan yang tinggi oleh media massa. Oleh karena itu, ini berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh media massa selama periode catur wulan pertama (Januari – April 2012).

1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam

Pada periode catur wulan kedua ini, aktifitas-aktifitas yang terrekam oleh media massa berkaitan dengan pelaku ormas islam didominasi oleh isu kekerasan yakni sebesar 44.0%. sedangkan yang terkait dengan isu hukum dan politik menempati urutan kedua dengan porsi pemberitaan sebesar 39.3%, dan pada urutan ketiga ditempati oleh isu lainnya sebagaimana tampak dalam table berikut:

Tabel 7: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Mei - Agustus 2012

Topik Pemberitaan	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	37	44.0
Hukum dan Politik	33	39.3
Lainnya	14	16.7
Total	84	100.0

Pada table diatas, isu kekerasan yang menempati urutan teratas menandakan bahwa urusan yang berkaitan dengan ormas Islam sejatinya banyak berperan dan berkontribusi pada ranah kekerasan. Ranah ini tidak saja hanya meliputi praktek kekerasan. Pencegahan terhadap kekerasan dan berita-berita terkait persemaian gagasan perdamaian juga menjadi satu kesatuan dengan tema ini. Berita berikut menunjukkan bahwa kekerasan

yang diliput oleh media massa tidak hanya terbatas pada praktek kekerasan semata, melainkan juga pada upaya seruan pencegahan sebagai berikut:

Wapres Minta Ormas Ikut Berantas Kekerasan

Jakarta – toleransi kehidupan beragama di Indonesia sempat mendapat sorotan beberapa waktu terakhir. Namun, menurut Wakil Presiden Boediono, tantangan umat Islam di Indonesia tak hanya terkait dengan konsistensi untuk mengamalkan toleransi atas perbedaan diantara umat beragama.

Tantangan tersebut menurut Boediono, juga berkaitan dengan menjaga persatuan di internal umat Islam. "Bagaimana menjaga persatuan di dalam lingkungan umat Islam sendiri dengan menghindarkan diri dari sikap merasa benar sendiri dan sikap sesat-menyesatkan," urainya saat membuka Mukhtamar ke-39 Perkumpulan Al-Irsyad Al-Islamiyah 2012 di Jakarta kemarin (18/6).

Lebih gawat lagi, lanjut Boediono, jika sikap merasa benar atau menganggap sesat sesuatu tersebut diikuti dengan tindakan kekerasan. "itu melanggar hukum," katanya. Menurut Wapres, memberantas aksi kekerasan, termasuk yang menjurus kepada terorisme, memang tugas pemerintah. Namun, hal itu akan lebih muda dengan dukungan dari organisasi massa islam seperti Al-Irsyad, NU, dan Muhammadiyah. "Tugas bangsa ini akan dibuat jauh lebih mudah demi kemaslahatan masa depan bangsa ini."⁶⁶

Keutuhan bangunan anti kekerasan memang menjadi concern banyak pihak, utamanya karena hal ini juga menjadi kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi, yakni menggapai perdamaian. Karenanya, perdamaian sering diasosiasikan sebagai nilai universal yang harus dikedepankan oleh semua pihak.

Berita yang terkait dengan pencegahan kekerasan lainnya adalah sebagaimana yang ditampilkan oleh media massa dalam masalah syiah

⁶⁶ Jawa Pos, Selasa, 19 Juni 2012

Sampang. Kasus syiah memang terjadi hanya sekali, namun efek pemberitaannya cukup lama dan menyita banyak halaman media massa.

Hal tersebut sebagaimana dalam berita berikut:

Konflik Sosial; Selesaikan Kasus Kekerasan di sampang secara konstruktif

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri dan pejabat terkait untuk mendorong penyelesaian kasus Sampang secara konstruktif dan menyeluruh. Pemerintah, lewat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, aktif mengupayakan diskusi dengan kedua pihak yang bertikai.

”Diskusi mendalam di antara kedua pihak ini dimaksudkan agar ditemukan solusi yang sungguh berakar,” ujar juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu (29/8), di Kompleks Istana Presiden, Jakarta. Presiden, menurut dia, meminta agar soslusi itu dipastikan dijalankan. Jika ada komitmen yang dilanggar, perlu dibuat sanksi yang tegas.

Pemerintah memang diminta serius mendalami akar masalah dan semua faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Jangan disederhanakan sebagai pertikain keluarga karena justru menutupi masalah sesungguhnya.

Harapan itu disampaikan ahli teologi Islam sekaligus dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zainul Kamal dan peneliti senior The Wahid Institute, Achmad Suaedy, secara terpisah.

Menurut Zainul Kamal, kekerasan itu sulit disederhanakan sebagai pertikaian keluarga semata karena penyerangan menggunakan simbol-simbol agama.⁶⁷

Berita yang terkait dengan seruan Presiden RI untuk penyelesaian kasus sampan ini cukup menghangat dan menjadi isu nasional. Sampan yang merupakan daerah pelosok di kepulauan Madura, namun memiliki

⁶⁷ Kompas, Kamis, 30 Agustus 2012

kekuatan yang luar biasa dan menjadi isu nasional semata-mata hanya karena kasus tersebut menyeret agama ke dalam ranah kekerasan.

Agama yang bersanding dengan kekerasan umumnya mendapat perhatian yang luar biasa dari banyak kalangan, ini pantas mengingat agama sejatinya menuntun dan membimbing para pemeluknya untuk senantiasa mencintai perdamaian, hidup rukun damai dan tanpa perselisihan. Namun, kenyataan ini tak dapat dipungkiri mengingat agama juga mengisyaratkan pentingnya penegakan ajaran.

Berbeda dengan dua berita kekerasan diatas, berita lain yang sempat muncul di media massa pada periode ini adalah terkait politik. Dikatakan sebagai isu politik mengingat peristiwa ini juga terkait erat dengan pemerintahan. Narasi di bawah ini menunjukkan bahwa persoalan yang sebetulnya private dan diatur oleh agama masing-masing akhirnya juga menjadi urusan pemerintah. Peristiwa penentuan penetapan Hari Raya Idul Fitri yang sebetulnya menjadi kepentingan umat islam sendiri, akhirnya menyeret mediasi pemerintah untuk menetapkan hari raya. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai ormas Islam di seluruh Indonesia, sebagaimana ditampilkan oleh berita berikut:

Muhammadiyah Absen Sidang Isbat; Karena Sudah Putuskan Puasa 20 Juli

Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kukuh terhadap keputusan memulai puasa tahun ini pada 20 Juli nanti. Karena itu, salah satu ormas Islam besar di tanah air tersebut tidak akan mengikuti sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan 1433 Hijriyah.

“Kami sudah memutuskan, Insya Allah, 20 Juli adalah hari pertama puasa dan 19 Juli mulai sholat Tarawih,”

ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin (27/6).

Menurut Din, sidang isbat hanya mengutamakan pandangan pemerintah, dia menilai, sidang isbat kerap berjalan tidak objektif. Selain itu, dalam sidang isbat tidak terdapat upaya musyawarah yang melibatkan banyak pihak. "Pada pikiran Muhammadiyah, itu (sidang isbat) tidak perlu. Sebab, itu hanya pikiran subjektif pemerintah dan biasanya tidak ada musyawarah dan tidak ada diskusi," terangnya.

Din menilai, pemerintah tidak pernah menampung perbedaan pendapat dari masyarakat. Karena itu, Muhammadiyah menolak mengikuti sidang isbat sejak tahun lalu.⁶⁸

Ketidakhadiran Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam menjadi pemandangan tersendiri. Ormas ini memiliki argumentasi yang kuat, tetapi disisi lain pemerintah juga merasa perlu menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Pada kenyataannya hari raya juga dapat dilaksanakan secara bersama, meski cara penentuan hari raya ini tidak sama. Hal tersebut sebagaimana tampak dalam berita berikut:

Dua Ormas Lebaran Bareng; Jatuh Pada 19 Agustus

Surabaya, Surya – perayaan Idul Fitri tahun ini akan lebih semarak dibandingkan tahun lalu. Ini menyusul adanya kemungkinan barengnya perayaan awal lebaran antara organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah, yakni jatuh pada hari Minggu, 19 Agustus 2012.

Kordinator Tim Rukyatul Hilal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jatim KH Sholeh Hayat mengatakan, kemungkinan samanya pelaksanaan wal lebaran Idul Fitri tahun ini antara Nu dan Muhammadiyah terlihat dari sejumlah isyarat. Isyarat tersebut antara lain, 21 sistem yang dijadikan rujukan bahas hisab rukyat Kantor Kemeterian Agama Jatim

⁶⁸ Jawa Pos. Kamis, 28 Juni 2012

mencatat, hasil hisab dalam ijtimak akhir Ramadhan terjadi jum'at 17 Agustus sekitar pukul 21.50 WIB sampai dengan 22.54 WIB.

Pada waktu itu, posisi hilal di semua hitungan hisab minus 02,28 derajat sampai minus 05,38 derajat di bawah ufuk. Dari situ diambil kesimpulan, 1 Syawal (lebaran) jatuh pada hari Ahad (Minggu), 19 Agustus 2012.

"Jadi kalau dalam mengawali Ramadhan terjadi perbedaan antara NU, Pemerintah dengan Muhammadiyah, tapi dalam mengakhiri umur Ramadhan atau merayakan 1 Syawal 1433 H kemungkinan akan bareng," tegas Sholeh, Jum'at (10/8).⁶⁹

Isu lain yang masih dalam ranah politik adalah berita mengenai tanwir Muhammadiyah. Kegiatan yang dilaksanakan di Bandung ini berusaha memperteguh kepentingan peneguhan ideologi serta konsolidasi gerakan di tengah penterasi ideologi partai.

Berita berikut menunjukkan bahwa ormas Islam memiliki porsi tersendiri bagi media massa. Media menganggap banyak hal yang dilakukan oleh ormas Islam layak menjadi suatu berita yang harus diketahui oleh masyarakat.

Tanwir Muhammadiyah; Teguhkan Ideologi dan Konsolidasi

Bandung, Kompas – masalah penetrasi ideologi kepartaian menjadi salah satu topik yang diutarakan dalam Tanwir Muhammadiyah di Bandung, Jawa Barat, jumat (22/6). Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah peneguhan ideologi serta konsolidasi organisasi.

Demikian pemaparan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Hotel Horison. Sidang tersebut diikuti para ketua PP dan Pimpinan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Secara bergantian, laporan mengenai kegiatan tiap bidang dipaparkan.

⁶⁹ Surya, 11 Agustus 2012

"Kalau secara organisasi ringkih, otomatis rentan terhadap peluang penetrasi," ujar Haidar.

Pendapat Haidar terkait kerukunan umat beragama kembali mengutip hasil muktamar sebelumnya, yakni menerima pluralitas, tetapi menolak pluralisme yang menyamakan semua agama. Keberadaan Forum Kerukuna Umat Beragam di daerah patut dihormati pendapatnya sejauh tidak menjangkut isi ajaran agama.

Pemaparan bidang hukum oleh PP Muhammadiyah Bidang Hikmah, Hukum dan HAM Abdul Fatah Wibisono menyoroti tentang upaya uji materi atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 mengenai Migas. Alasannya, peraturan itu dinilai melepaskan kedaulatan energi dari rakyat kepada asing.⁷⁰

Adapun berita terkait isu lainnya yang diperankan oleh ormas Islam adalah sebagaimana yang tampak pada apa yang dilakukan MUI dalam kasus pencegahan pembelian uang menjelang hari raya Idul Fitri berikut:

MUI Haramkan Beli Uang Baru

Jombang, Surya – setiap menjelang lebaran, menjamur jasa penukaran uang baru di jalan-jalan. Fenomena ini hampir merata di Jawa Timur, bahkan seluruh pelosok negeri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang melalui ketuanya, KH Cholil Dahlan memberikan fatwa mengejutkan. Ditegaskan, jasa penukaran uang di jalan hukumnya haram.

Alasannya, dalam transaksi tersebut, uang ditukar dengan uang yang nilainya lebih. Karena terdapat selisih, maka termasuk unsur riba. "Riba jelas diharamkan dalam Islam," kata KH. Cholil.

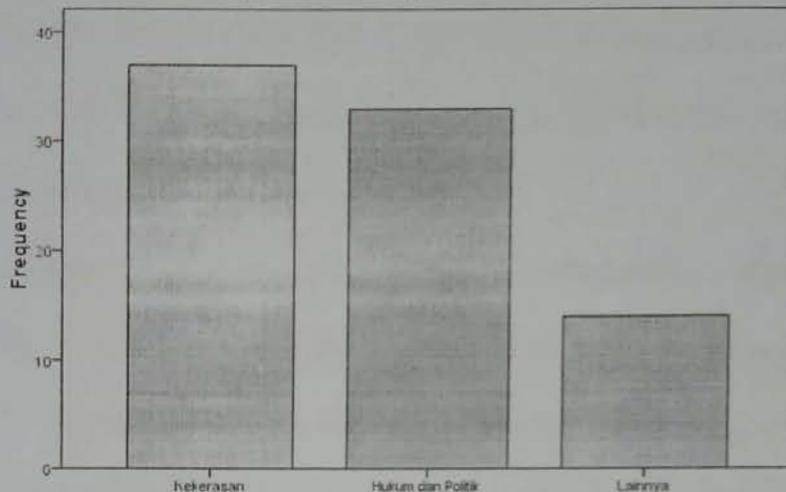
KH. Cholil lantas memberikan contoh, misalnya, seseorang ingin mendapatkan uang Rp 100.000 dalam bentuk pecahan Rp 10.000-an, maka yang bersangkutan harus membayar Rp 110.000. "Dari situ terdapat selisih Rp 10.000. itulah yang dinamakan riba dan itu haram

⁷⁰ Kompas. Sabtu, 23 Juni 2012

hukumnya,” kata KH Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang ini.⁷¹

Dari berbagai gambaran pemberitaan diatas, isu kekerasan yang diperankan oleh media massa masih menempati porsi unggul. Hal ini sebagaimana tampak dalam gambaran grafik berikut:

Bagan 6: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Mei - Agustus 2012



Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, fakta kekerasan dan politik yang ditampilkan oleh ormas Islam dan berhasil diliput oleh media massa ini juga memperkuat hasil dari penelitian ini bahwa ormas islam lebih banyak bersinggungan dengan fakta kekerasan, hukum dan politik. Kenyataan ini memperteguh hasil diatas bahwa pembinaan terhadap kehidupan berkelompok dan berserikat juga perlu digalakkan agar apa yang ternarasi dalam bagian ini—kekerasan—dapat tereliminasi.

⁷¹ Surya. Jumat, 3 Agustus 2012

2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)

Pelaku non ormas Islam atau isu keislaman lainnya pada dasarnya menempati posisi yang jauh lebih banyak pada periode catur wulan kedua ini. Angka 67.9% merupakan angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan pelaku Ormas Islam.

Dari angka 67.9% justru 57.3% topik yang terkait isu diluar kekerasan, hukum dan politik. Angka ini jika dirunut pada periode pertama merupakan besaran konsisten dari keterkaitan berita isu keislmana yang melibatkan pelaku non-ormas Islam.

Table di bawah menunjukkan bahwa isu kekerasan yang hanya 12.9% bukan merupakan isu yang biasa melibatkan pelaku non-ormas Islam. meski isu hukum dan politik, jika dibandingkan dengan periode pertama tampak masih memperoleh angka yang cukup tinggi yakni sebesar 29.8%, tetapi angka ini juga tidak mencapai besaran separuh dari total is yang dimunculkan oleh media massa terkait dengan pelaku non-ormas Islam.

Tabel 8: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Mei - Agustus 2012

Topik Pemberitaan	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	23	12.9
Hukum dan politik	53	29.8
Isu lainnya	102	57.3
Total	178	100.0

Sedikitnya isu kekerasan yang melibatkan pelaku non-ormas Islam tampak dalam gambaran berita mengenai terorisme. Penggeledahan rumah terduga teroris merupakan pelaku non-ormas yang dilakukan oleh aparat untuk menertibkan dan mengamankan stabilitas nasional.

Meski jika dirunut, terorisme sejatinya memiliki keterkaitan dengan jaringan ormas Islam berhaluan kanan/radikal. Gambaran mengenai berita terorisme sebagaimana tampak dalam berita berikut.

Polisi Geledah Rumah-Ruko Aset Teroris

Medan – Polisi bersenjata lengkap menggeledah sejumlah tempat di Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin (21/6). Belum ada keterangan resmi tentang penggeledahan tersebut. Dugaan warga, tempat-tempat yang digeledah dicurigai sebagai aset teroris.

Kepala Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai yang kemarin berada di Medan menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi soal itu. Namun, dia juga tidak membantah. "Saya tidak bisa memberikan keterangan tentang operasi yang sedang berjalan," katanya, saat ditemui di bandara Polonia, Medan, kemarin.

Rumah yang kemarin digeledah antara lain, antara lain, berada di jalan Eka Warni III Dan Kompleks Griya Karya Kasih, Jalan Karya Kasih, Medan. Satu lokasi lagi kabarnya berada di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Tiga orang tampak dibawa keluar dari rumah di Jalan Eka Warni III setelah penggeledahan. Ada yang menduga mereka ditangkap di rumah itu. Informasi lain menyebutkan, mereka ditangkap beberapa hari lalu dan kemarin dibawa untuk menunjukkan lokasi.⁷²

Berbeda dengan isu di atas, pelaku non-ormas Islam juga berkontribusi terhadap pemberitaan media massa terkait dengan ranah hukum dan politik. Dikatakan demikian, mengingat proses hukum yang berkaitan dengan korupsi juga tidak dapat dipisahkan dengan isu politik.

Gambaran mengenai isu korupsi di tubuh kementerian agama ini merupakan isu yang melibatkan pelaku non-ormas Islam, sebagaimana dalam berita berikut:

⁷² Jawa Pos. Jumat, 22 Juni 2012

Korupsi Pengadaan Al Quran Kementerian Agama Dukung KPK

Jakarta, Kompas – Kementerian Agama terus mendukung penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Direktorat Jendral Bimas Islam dan pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Direktorat Pendidikan Islam di kementerian tersebut. Pembebasan di dua pejabat kementerian tersebut pada pekan lalu merupakan salah satu langkah untuk mempermudah proses hukum yang tengah berjalan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Djamil, di sela-sela buka puasa bersama di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, Senin (13/8).

Saat ini, proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus berjalan dengan memanggil sejumlah pejabat di Kementerian Agama untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Untuk penyelidikan dugaan suap dan pengaraan anggaran pengadaan Al Quran di parlemen, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Fraksi Partai Golkar, Zulkarnain Djabar, dan anaknya yang juga pengusaha, Dedi Prasetya.⁷³

Korupsi memang masih menjadi primadona di negeri ini. Tema tersebut tidak saja menjadi momok bagi pemerintahan secara umum, namun terkhusus juga bagi kementerian Agama. Isu ini menjadi sangat kronis dan hamper sulit diurai jalan keluarnya. Institusi yang seharusnya terbebas dari isu demikian ini juga tak mampu membendungnya.

Berita lain terkait isu diluar tema kekerasan, hukum dan politik adalah berita terkait haji. Haji memiliki motif ekonomi tinggi, disamping sebagai sebuah ibadah. Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang juga

⁷³ Kompas. Selasa, 14 Agustus 2012

diatur oleh pemerintah. Semestinya isu haji juga menjadi bagian dari isu islam dan politik, namun dalam kaitan ini dimaknai sebagai isu islam dan ekonomi serta ubudiyah. Berita tentang haji merupakan berita yang tidak terkait dengan ormas Islam. karenanya, berita ini diklasifikasi dalam lingkun pelaku non-ormas Islam.

Antrean Haji Sampai 15 Tahun; Daftar Tunggu Capai 1,7 Juta Orang

Jakarta – Antusiasme umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sungguh luar biasa. Karena kuota terbatas, alhasil, mereka harus mengantre. Nah, dari tahun ke tahun, antrean itu semakin panjang.

Menteri Agama (Menag) Suryadarma Ali mengatakan, lama antrean bisa mencapai 15 tahun. Hal itu terjadi di Sulawesi Selatan. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak kerana upaya untuk memangkas antrean itu tergantung kepada kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi.

”Persoalan panjangnya antrean jamaah haji tidak terlepas dari faktor *supply and demand*,” kata suryadharma di kantor Kemenko Kesra kemarin (14/8).

Menteri yang akrab dipanggil SDA itu mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kuota haji Indonesia tidak berubah, yakni 211 ribu jamaah pertahun. Kuota tersebut dipecah menjadi dua. Yaitu, 194 ribu untuk jamaah haji reguler dan 17.000 untuk jamaah haji kusus.⁷⁴

Isu terkait pelaku non-ormas Islam lainnya dluar topic kekerasan, hukum dan politik adalah isu terkait ekspresi keberagamaan. Dalam berita berikut dipaparkan mengenai cara praktis berjilbab secara modis, yang memang menjadi tuntutan pemenuhan gaya hidup *a la* islami bagi para muslimah.

⁷⁴ Jawa Pos. Rabu, 15 Agustus 2012

Ekspresi keberagaman merupakan isu lumrah yang biasa terjadi di kalangan umat islam. Isu ini umumnya tidak terwadahi dalam konteks ataupun tema tertentu sehingga untuk memayunginya diberi label ekspresi keberagaman.

Berita-berita terkait ekspresi keberagaman umumnya cukup banyak, berita ini diklasifikasi ke dalam isu lainnya baik yang diperankan oleh ormas Islam maupun oleh pelaku non-ormas Islam. tampak di bawah ini adalah berita mengenai ekspresi keberagaman yang diperankan oleh pelaku non-ormas Islam.

Berjilbab Modis Sesuai Syar'i Dalam 5 Menit

Surabaya, Surya – mengenakan jilbab modis berbagai model tetapi tetap sesuai syar'i bisa dilakukan kaum muslimah. Cara itu diajarkan Rini Roemah Hijab dari komunitas hijabee dalam lokakarya di Mustofa Center 2, Royal Plaza, Surabaya, Sabtu (28/7).

Puluhan peserta yang sudah membayar ongkos Rp 45.000 belajar cara berjilbab seperti ala *ris tie die*, dalaman ciput dan aksesoris ciput. Para peserta juga bersedia membawa sendiri kaca kecil duduk. Rini juga mengajarkan cara mengenakan jilbab ala Hana Tajima, Blogger asal Malaysia yang biasa mengulas aneka gaya jilbab modis. Bersama Din Pelangi, Hana Tajima ini disebut-sebut sebagai perempuan dengan model jilbab yang menjadi *trend setter*.

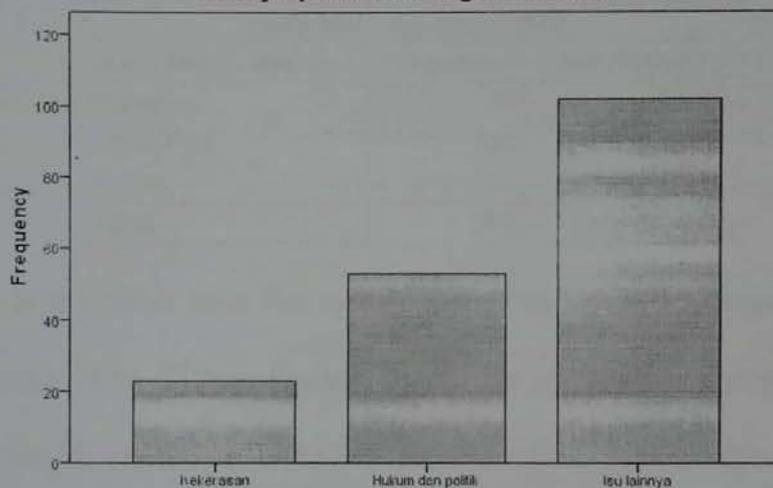
"Sebenarnya Hijabee sendiri punya 30 model. Tapi umumnya peserta memilih mdel yang *trend setter* ala dua model itu," jelas Rini

Seperti diperagakan para peserta, ternyata tidak perlu waktu lama untuk mengenakan jilbab ala Hana Tajima, tinggal memasang dalaman ciput, melipat segitiga jilbab paris tie die, memasang ke kepala dengan memiringkan salah satu sisi. Setelah itu menguatkanya dengan memberi peniti si sisa-sisa samping. Ekor jilbab disatukan dan ditarik ke depan. "ternyata kurang dari 5

menit ya memakainya,” komentar Paulina Nursanti, salah satu peserta.⁷⁵

Dari berbagai gambaran pemberitaan diatas, pelaku non-ormas Islam jauh lebih banyak menwarnai isu-isu selain kekerasan, hukum dan politik. Hal ini menandakan bahwa ekspresi keberagaman, ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya merupakan kewajaran yang ditangkap oleh media massa sebagai sesuatu yang unik, dan layak diketengahkan kepada pembaca. Ketimpangan porsi pemberitaan antar topik sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 7: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Mei - Agustus 2012



Grafik diatas—topik media terkait pelaku non-ormas Islam pada periode catur wulan kedua (Mei-Agustus 2012)—cukup konsisten jika disejajarkan dengan apa yang terjadi pada rekaman media periode catur wulan pertama (Januari-April 2012). Hasilnya adalah pelaku non-ormas Islam lebih banyak menyumbangkan pada isu-isu diluar kekerasan, hukum dan politik bagi pemberitaan media massa.

⁷⁵ Surya, Minggu, 29 Juli 2012

3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa

Jika pada periode catur wulan pertama, Jawa Pos menempati urutan pertama dalam pemberitaan isu keislaman, pada periode ini juga masih ditempati Jawa Pos dalam pemberitaan isu tersebut.

Sebesar 46.9% Jawa Pos menurunkan berita tentang isu keislaman pada periode Mei-Agustus 2012. Urutan kedua ditempati oleh Kompas dengan sebesar 29.8% dan di urutan ketiga ditempati oleh Harian Surya sebesar 23.3%, sebagaimana dalam table berikut:

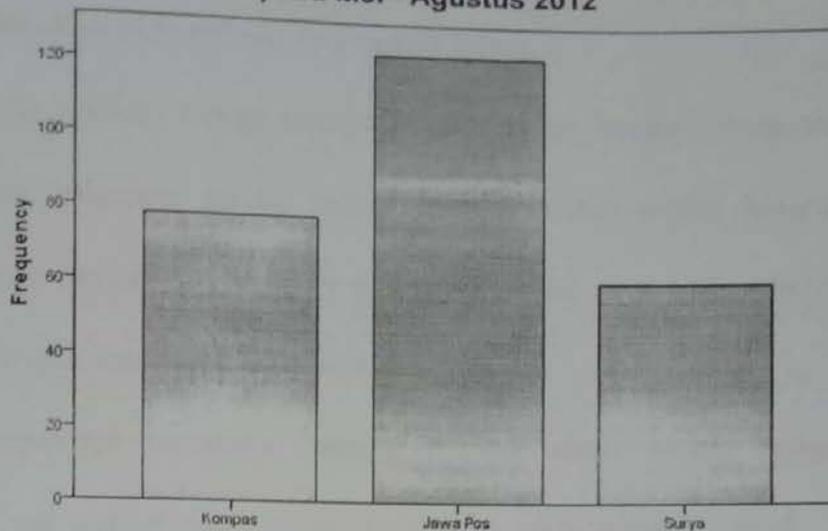
Tabel 9: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Mei - Agustus 2012

Jenis Media Massa	Frequency	Valid Percent
Kompas	78	29.8
Jawa Pos	123	46.9
Surya	61	23.3
Total	262	100.0

Konsistensi Jawa Pos memberitakan isu keislaman tidak terlepas dari konteks Jawa Timur, dimana daerah ini merupakan daerah yang kaya dengan berbagai dinamika social kemasyarakatan dan keagamaan.

Meski Harian Surya merupakan harian lokal Jawa Timur, akan tetapi Surya hanya memiliki lebih sedikit jumlah halaman jika dibandingkan dengan Jawa Pos. Grafik perbandingan pemberitaan media massa mengenai isu keislaman sebagaimana tampak di bawah ini.

Bagan 8: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Mei - Agustus 2012



C. Isu Keislaman Periode September – Desember 2012

Periode catur wulan ketiga (September-Desember 2012) tampaknya juga memiliki kecenderungan yang sama dengan periode catur wulan kedua (Mei-Agustus 2012). Table berikut menunjukkan 56.2% berita yang dirilis oleh media massa terkait dengan isu keislaman lainnya atau pelaku non-ormas Islam. Sedangkan 43.8% melibatkan pelaku ormas Islam.

Tabel 10: Isu Keislaman pada September - Desember 2012

Klasifikasi Berita	Frequency	Valid Percent
Ormas Islam	123	43.8
Isu keislaman lainnya	158	56.2
Total	281	100.0

Dari tabel diatas tampak persamaan kecenderungan tentang berita keislaman yang diperankan oleh pelaku non-ormas Islam pada periode sebelumnya (Mei-Agustus 2012) dengan besaran 67.9%. Meski angka untuk periode ini sedikit lebih kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan berita

yang diperankan oleh pelaku ormas Islam hasilnya masih tampak lebih besar yang dilakukan oleh pelaku non-ormas Islam.

Berita berikut, terkait terorisme, merupakan berita kekerasan yang masih menghiasi rekaman media massa periode catur wulan ketiga. Berita ini merupakan berita yang dilansir Kompas dengan gaya penggabungan berbagai fakta jaringan terorisme yang ada di Indonesia.

Tampaknya terorisme sampai periode catur wulan ketiga ini masih menjadi isu sentral yang perlu diwaspadai oleh berbagai pihak. Semata-mata demi menjaga stabilitas dan gangguan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terorisme; Kekuatan Besar, Kelompok Kecil

Poso, Sulawesi Tengah, memang menjadi perhatian. Namun, munculnya kelompok-kelompok baru dalam jaringan terorisme tidak hanya berasal dari rekrutmen dan proses pelatihan di Poso. Kelompok baru muncul juga dari infiltrasi paham radikal melalui terpidana terorisme yang sudah menjalani hukuman.

Menurut Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Petrus Golose, saat ini sudah terjadi gejala residivisme. "Teroris yang sudah menjalani hukuman di penjara mengulangi perbuatan," katanya. Ia mencontohkan, Joko Priyanto (45) alias Joko Parkit yang dihukum karena menyembunyikan Noordin M. Top.

Rudi Kurnia, tersangka teroris yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah, mengungkapkan, saat terjadi ledakan di Beji, Depok, Badri Hartono menyaksikan berita di televisi. Badri mengatakan kepada Rudi, "kemungkinan yang di Beji itu Anwar".

Badri ternyata mengenal Anwar. Dalam ledakan bom di Beji, salah satu korban pernah disebut polisi sebagai Mr X, Mr X ini dikenal tersangka M. Thoriq sebagai Anwar. dalam pemeriksaan DNA Polri, diketahui MR X

adalah Wahyu Ristanto alias Anwar, korban tewas dalam sebuah ledakan di sebuah rumah kontrakan di Beji.⁷⁶

Berita lain yang juga menghiasi halaman media massa adalah seputar Pilkada Jawa Timur. Berita politik memang selalu menjadi hal yang wajib bagi media massa. Tampaknya berita yang demikian ini selain bermuatan informatif juga mendorong berbagai kalangan untuk bermanuver dan seolah-olah apa yang ditampilkan oleh media massa menjadi sesuatu yang luar biasa.

Prinsip regulasi opini yang dimiliki oleh media massa ini juga yang selanjutnya mengantarkan perguliran opini masyarakat. Apa yang tampak biasa-biasa saja di mata umum, jika sudah dikorbankan biasanya menjadi sesuatu yang luar biasa.

Cagub PPP Tunggu Sikap PWNU Jatim

Surabaya, Surya – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim memilih menunggu Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim terkait calon yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013.

“Siapa yang direstui PWNU dan para kiai, itulah yang kemungkinan besar akan didukung PPP,” kata Ketua DPW PPP Jatim Musyafa’ Noer kepada wartawan, Jum`at (28/12).

Dijelaskan, saat ini PWNU masih memproses dua kader terbaiknya untuk direstui agar diusung menjadi cagub, yakni Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum Muslimat Nu Khofifah Indah Parawansa.

Ditanya apakah PPP lebih condong ke Khofifah seperti pada Pilgub 2008 lalu, musyafa’ kembali menegaskan, tergantung sikap PWNU. “Ya ketua PWNU dan kiai mendukung Khofifah,” paparnya.⁷⁷

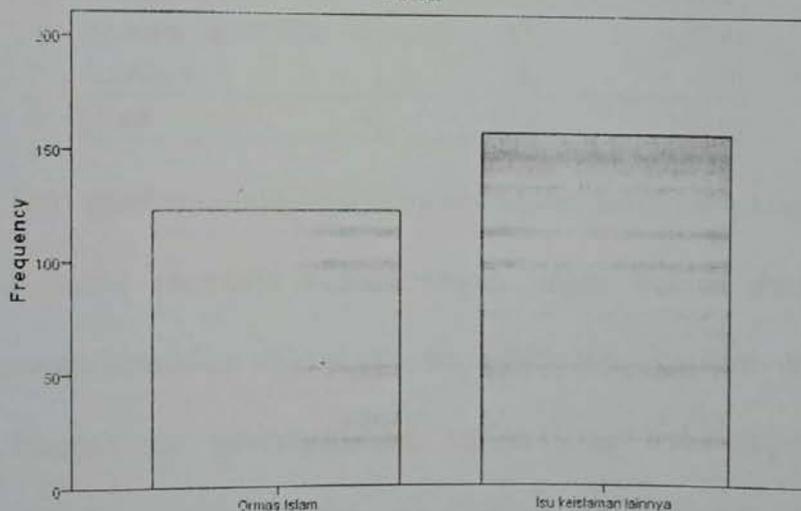
⁷⁶ Kompas, Kamis, 4 Oktober 2012

⁷⁷ Surya, Sabtu, 29 Desember 2012

Sikap politik sebagaimana yang ditampilkan oleh PWNU Jawa Timur yang kemudian dipandang oleh Partai Persatuan pembangunan sebagai sesuatu yang harus ditunggu, seharusnya menjadi sesuatu yang biasa. Akan tetapi, setelah ini dikemas oleh media dengan bidikan-bidikan dan penekanan tertentu menjadi sesuatu yang luar biasa.

Tentunya, dua cuplikan berita diatas dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk lebih lanjut mendalami berbagai varian topik dan keterkaitannya dengan pelaku ormas Islam maupun pelaku non-ormas Islam. gambaran mengenai pelaku non-ormas Islam yang lebih banyak menyumbangkan berita di media massa sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 9: Isu Keislaman pada September - Desember 2012



Sampai pada bagian ini dapat dinyatakan bahwa isu-isu pemberitaan media massa yang melibatkan pelaku non-ormas Islam pada periode catur wulan kedua dan ketiga memiliki persamaan lebih banyak porsinya daripada isu-isu pemberitaan yang melibatkan pelaku ormas Islam. Pelaku ormas Islam

hanya menempati porsi pemberitaan lebih banyak oleh media massa pada periode catur wulan pertama.

1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam

Berkaitan dengan pemberitaan media massa yang melibatkan pelaku ormas Islam, tampaknya isu kekerasan memiliki porsi paling tinggi dengan 57.7% judul berita di media massa. Disusul sebesar 37.4% pelaku ormas Islam yang terkait is hukum dan politik dan pada posisi terakhir ormas Islam diberitakan oleh media massa sebesar 4.9% terkait isu lainnya, sebagaimana tampak dalam table di bawah:

Tabel 11: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada September - Desember 2012

Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	71	57.7
Hukum dan Politik	46	37.4
Lainnya	6	4.9
Total	123	100.0

Dari gambaran table diatas menunjukkan fakta yang konsisten bahwa ormas Islam memiliki kecenderungan tinggi terlibat dalam fak-fakta kekerasan, kemudian disusul oleh fakta-fakta terkait hukum dan politik.

Nuansa isu kekerasan dan varian yang terkelompokkan dalam komponen topik ini—sebagaimana penjelasan diatas—tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dan seolah menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan Ormas untuk senantiasa mengeliminirnya. Berita terkait isu kekerasan sebagaimana tampak dalam pemberitaan harian Kompas tentang berbagai atraksi kekerasan yang berujung pada relokasi.

Kebebasan Beragama; Relokasi Takkan Selesaikan Masalah

Jakarta, Kompas – kebijakan merelokasi kelompok minoritas dalam kasus-kasus kebebasan beragama dinilai tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya menimbulkan persoalan baru. Pemerintah harus tegas dalam menjamin kebebasan beragama sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal itu disampaikan Kepala Program Monitoring dan Advokasi The Wahid Institute M Subhi Azhari dan Direktur Bantuan Hukum Jakarta Feby Yonesta, Rabu (24/10).seusai betemu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan. Turut hadir jur bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging; perwakilan Pondok Pesantren Al Ghozali, Zulkarnain; serta warga perwakilan Kota Paris Bogor, Turmudi.

“Tawaran solusi relokasi dari pemerintah, misalnya dalam kasus GKI Yasmin (Bogor), syiah (Sampang), dan Ahmadiyah (Lombok), tidak menyelesaikan masalah. Jemaah Ahmadiyah di Lombok, misalnya, relokasi di pengungsian malah menimbulkan masalah baru, karena mereka terlantar. Kita tidak ingin itu terulang. Seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemerintah,” kata Subhi.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya tegas menjamin hak warga negara terkait kebebasan beragama serta mengambil alih penyelesaian kasus-kasus terkait kebebasan beragama.⁷⁸

Berita yang dilansir oleh harian Kompas diatas menyuguhkan berbagai persoalan kekerasan bernuansa agama yang dimainkan oleh kelompok beragama. Menurut berita diatas, pemerintah seharusnya menjamin hak setiap warga Negara terkait kebebasan beragama serta mengambil alih berbagai penyelesaian kasusu-kasus kekerasan dan kebebasan beragama.

Gambaran pemberitaan diatas menadakan betapa kasus kekerasan atasnama agama maupun kebebasan beragama masih menjadi pelajaran

⁷⁸ Kompas. Kamis, 25 Oktober 2012

berharga bagi bangsa Indonesia dalam tahun 2012. Konflik-konflik atas nama agama menjadi sesuatu yang seharusnya dapat dihindari jika pemerintah memiliki ketegasan memainkan perannya dalam menjamin hak warga Negara untuk menjalankan agamanya.

Berita lain yang melibatkan ormas Islam adalah terkait hukum dan politik. Fakta bahwa Indonesia masih dirundung penyakit kronis yang bernama korupsi mendorong ormas tertentu untuk memberikan fatwa terkait hal tersebut.

Munas NU; Fatwa Suap harus Implementatif

Jakarta – Praktik *risywah* (suap) dalam politik menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon pada 15-17 september nanti. Kalangan parpol mengingatkan, keputusan apapun nanti tidak hanya berhenti sebatas fatwa. "keputusan itu harus implemetatif dalam seluruh aktivitas permusyawaratan di internal NU," tegas ketua DPP PPP Arwani Thomafi kemarin (11/9).

Arwani berharap, fatwa tentang *risywah* tidak hanya diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal. "Forum muktamar, konferwil (konferensi wilayah), dan konfercab (konferensi cabang) NU harus menjadi teladan bagi kami di parpol. Itu dilakukan untuk sebuah permusyawaratan yang bersih dan bebas *money politics*," tutur sekretaris fraksi PPP di DPR tersebut.

Munas di pesantren Kempek, Cirebon, itu akan membahas sejumlah hal. Diantaranya, *masail diniyah waqi'iyah* atau isu-isu faktual seperti *risywah*. Dalam praktiknya, *risywah* tidak identik dengan *money politics* bisa hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya, sedekah, zakat, pemberian uang secara langsung ataupun tak langsung, komitmen, dan cara-cara lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan dalam pemilu.

Sebelumnya, ketua umum PB NU Said Aqil Siraj menyatakan bahwa *risywah* dalam politik sama dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan

diharamkan agama. Dengan mengutip sebuah ayat Alquran, dia menyebutkan bahwa koruptor layak di hukum seberat-beratnya. "hukuman untuk pelakunya adalah dipotong kedua tangan dan kakinya atau dimusnakan dari muka bumi."⁷⁹

Dalam paparan berita diatas ditekankan oleh NU bahwa *risywah* dalam politik sama dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan agama. Dengan mengutip sebuah ayat Al-Quran, dia menyebutkan bahwa koruptor layak dihukum seberat-beratnya.

Gambaran yang demikian ini menandakan bahwa ormas Islam juga mendorong pengupayaan jalan terbaik dalam pencegahan berbagai kesesatan politik. Jika ranah politik dapat berjalan dengan baik kemungkinan besar proses konsolidasi demokrasi dalam perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara juga dapat dijalankan dengan baik pula.

Selain berita diatas, ormas Islam juga memiliki potensi besar dalam pendulangan suara. Ormas merupakan ladang pendulangan suara bagi kepentingan kontestasi politik dan kekuasaan. Gambaran mengenai kans sumbangan suara ormas bagi pendulangan suara sebagaimana tampak dalam berita berikut:

Satria Bergitar Berkelana ke Basis NU untuk Cari Dukungan Bagi Pilpres

Jombang, Surya – Pedangdut kondang Rhoma Irama mulai melakukan safari politik ke basis NU, Jombang. Itu dimulai dengan kunjungan ke kediaman Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur di Ponpes Tarbiyatun Nasyiin, Dusun Paculgowang, Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Sabtu (29/12) pagi.

⁷⁹ Jawa Pos, Rabu 12 September 2012

Kedatangan Rhoma yang juga dijuluki *Satria Bergitar* (sesuai judul album dan film yang pernah dibuatnya), selain disambut tuan rumah KH Aziz, serta ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam pertemuan itu, KH Azis sempat bercerita, ketika masih muda dulu sempat menyukai lagu Rhoma, judulnya '*Kegagalan Cinta*'.

"Kau yang berjanji kau yang mengingkari, kau yang mulai kau yang mengakhiri," lantun Kiai Azis di depan Rhoma dan Cak Imin, yang disambut gelak tawa hadirin.

KH. Azis mengatakan dirinya mengagumi lagu-lagu karya raja dangdut tersebut. KH Azis juga masih ingat, saat itu tahun 1974 ia menyaksikan pentas Rhoma di Kediri. "Waktu itu, saya masih pengantin baru. Senang sekali menyaksikan Rhoma duet dengan Elvi Sukaesih," katanya.⁸⁰

Tahun 2012 santer isu tentang keinginan Raja Dangdut H. Rhoma Irama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI dalam konstesasi politik 2014 mendatang. Raja dangdut ini memiliki pengikut fanatic yang luar biasa. Ia kemudian melakukan berbagai manuver dan juga atas dasar dorongan dari partai politik, melakukan lobi-lobi dan silaturahmi politik ke berbagai tokoh ormas.

Berita lain dalam periode ini yang juga masih mengkaitkan antara pelaku ormas Islam dengan wilayah politik adalah tentang kepentingan NU dalam kontestasi pilkada Jawa timur. NU yang merasa sebagai mayoritas di Jawa Timur dengan sendirinya merasa perlu untuk mengambil sikap (pada waktu ini) untuk mendorong berbagai proses politik yang memiliki kesamaan dengan kepentingannya.

⁸⁰ Surya. Minggu, 30 Desember 2012

PW NU Jatim Rapatkan Barisan Gonjang-ganjing pecahnya KarSa

Surabaya – kabar pecahnya pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) ternyata sudah memprediksi ketua PW NU Jatim Mutawakkil Alallah. Sudah lama dia melihat kemungkinan tersebut terjadi.

“Saya sudah menduga bahwa KarSa jilid II ini sulit dilanjutkan,” jelas mutawakkil. Prediksi itu di dasarkan pada pengetahuannya sendiri dan informasi yang dikumpulkan dari massa lapisan bawah.

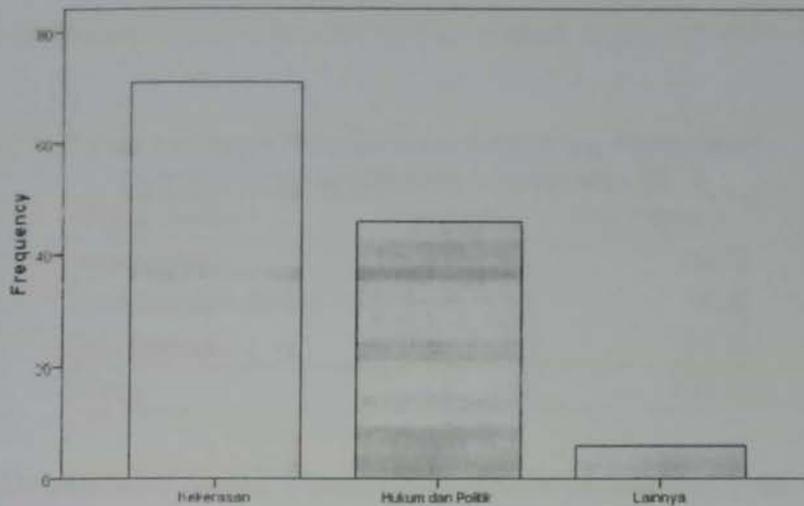
Menurut dia, berdasar cerita masyarakat NU di lapisan bawah, manfaat pemimpin yang ada kurang terasa. Akhirnya, mereka menghendaki untuk pisah saja. “Banyak komitmen yang pernah disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo, tapi banyak yang tidak dilaksanakan. “Ya, memang ada yang dilaksanakan. Tapi, banyak yang tidak. Terutama ke masyarakat pesantren,” tuturnya.

Dia menambahkan, PW NU Jatim pasti akan menyebut satu nama yang didukung NU dalam pilgub Jatim 2013. “Tapi, saya tak bisa pastikan waktunya kapan. Yang jelas secepatnya,” tuturnya.⁸¹

Berbagai berita mengenai keterlibatan ormas di ranah kekerasan dan politik diatas menunjukkan bahwa ormas tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu yang terkait kekerasan, hukum dan politik. Ormas menjadi salah satu instrument pendorong perubahan mengingat bahwa ormas dengan berbagai dukungan dan modal sosial yang dimilikinya merupakan entitas yang cukup diperhitungkan. Gambaran mengenai keterlibatan ormas Islam dalam isu-isu kekerasan, hukum dan politik sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

⁸¹ Jawa Pos. Rabu, 28 November 2012

Bagan 10: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada September - Desember 2012



Sampai pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa ormas memiliki kecenderungan berkontribusi terhadap pemberitaan isu-isu kekerasan, hukum dan politik. Keadaan yang demikian ini sama dengan apa yang terjadi pada periode catur wulan pertama dan kedua. Penjelasan ini menggambarkan betapa kontribusi ormas juga dapat direplikasi untuk kepentingan pembaharuan dan perbaikan berbagai hal. Utamanya karena ormas memiliki berbagai modal sosial, jaringan dan beberapa modal kapital yang dapat digunakan dan disinergikan dengan berbagai kepentingan lainnya.

2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)

Dalam konteks pemberitaan yang melibatkan pelaku non-ormas Islam disebutkan bahwa pada dua periode diatas banyak didominasi oleh isu-isu lainnya diluar isu kekerasan, hukum dan politik. Tampaknya, dalam periode catur wulan ketiga (September-Desember 2012) ini, kecenderungan tersebut agak sedikit berbeda. Data berikut menunjukkan

bahwa meski isu lainnya di luar kekerasan, hukum dan politik menempati porsi terbanyak (51.3%), namun is kekerasan juga mencapai 32.3%.

Tabel 12: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada September - Desember 2012

Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	51	32.3
Hukum dan politik	26	16.5
Isu lainnya	81	51.3
Total	158	100.0

Dalam tabel diatas. menunjukkan bahwa kekerasan juga mendominasi lebih dari 30%. Ini berarti ada rentetan isu yang terjadi sebelumnya. Berita dibawah ini mengilustrasikan betapa isu kekerasan yang dimainkan oleh pelaku non-ormas Islam sebetulnya juga memiliki rentetan dengan apa yang dilakukan oleh Ormas Islam, seperti berikut:

Densus Tangkap Anggota Jaringan Thorik

Jakarta – Operasi anti terorisme yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri membuahahkan hasil. Tadi malam pasukan berlambang burung hantu menangkap seorang terduga teroris di Depok, Jawa Barat. Dia adalah Sofyan alias Fatah, warga RT 04/RW 03 Gang Duku Kampung Pulo Mangga, kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok.

“Benar, ada operasi oleh Mabes Polri. Detailnya silahkan ke Mabes. Kami tidak berwenang,” ujar Wakapolres Depok AKBP Ahmad Mustofa Kamal kepada koran ini tadi malam. Menurut dia, polres depok hanya dilibatkan dalam pengamanan wilayah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Sofyan diduga terkait jaringan teroris M. Thorik yang pernah membuat *basecamp* di kawasan Beji, Depok. Dia sudah dua tahun tinggal di lingkunagn itu, Densus tidak menyita barang berbahaya di lokasi. Petugas hanya membawa sebuah laptop dan beberapa buku.

Kasus bom Beji hingga kini masih dikembangkan oleh Densus 88. Dari kecerobohan seorang terduga teroris

bernama wahyu. akibatnya jaringan itu terbongkar. Mulai M. Thorik di kawasan Tambora, Jakarta hingga Joko Parkit di Laweyan, Solo.⁸²

Dari gambaran berita diatas, tampaknya terorisme merupakan jejaring yang dimiliki oleh Ormas Islam, namun setelah melalui proses hukum dan penindakan kasus ini kemudian melimpah menjadi persoalan personal pelaku teroris.

Penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 tidak melibatkan pelaku ormas Islam. Namun, jika hal ini dirunut ke belakang atau jika terjadi proses hukum, jaringan ini ujung-ujungnya juga mengkait dengan ormas Islam. tampaknya, yang demikian ini yang menyebabkan tingginya berita kekerasan yang melibatkan pelaku non-ormas Islam. berita lain yang mendorong banyaknya porsi kekerasan adalah terkait proses penindakan terhadap aksis terorisme yang kemudian menewaskan terduga teroris oleh densus 88, sebagai berikut:

Simpatisan Korban Mengamuk; Densus 88 Tewaskan Terduga Teroris

Poso - Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggerebek rumah warga di RT 20 B, Jalan Pualu Sabang, Lorong Merpati, Kelurahan Kayamanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, kemarin.

Satu orang tewas dan satu lainnya ditangkap hidup saat penggerebekan yang berlangsung singkat bakda subuh. Sekitar pukul 05.20, tersebut.

Korban tewas, adalah Ahmad Halil, dan yang berhasil ditangkap adalah M. Yasin. Lokasi penggerebekan berjarak hanya sekitar 300 meter dari Pasar Sentral Poso dan atau hanya sekitar 350 meter dari Mapolres Poso.

* Jawa Pos, Selasa, 9 Oktober 2012

Korban tewas, Ahmad Halil, adalah PNS yang bertugas sebagai polisi kehutanan (polhut) Dinas Kehutanan Pemkab Poso. "Yang bersangkutan diduga terlibat dalam kelompok yang latihan di Gunung Biru dan hutan Tamanjeka," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta kemarin.

Mengapa harus ditembak? Menurut Boy, polisi yang menyergap mendapatkan perlawanan, "anggota di lapangan dilempari bom pipa," ucapnya.⁸³

Berbeda dengan berita kekerasan di atas, berita yang melibatkan pelaku non-ormas Islam namun masih memiliki nuansa kekerasan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru *ngaji* di Musollah. Berita ini merupakan berita kekerasan dengan motif yang berbeda dengan terorisme.

Jenis-jenis berita kriminal ini mendorong banyaknya porsi persentase kekerasan yang dilakukan oleh individual (non-ormas Islam) yang selanjutnya mengangkat derapat persentase dari pemberitaan media massa mengenai isu keislaman di media massa dengan pelaku non-ormas Islam.

Guru Perkosa Murid di Musallah

Jombang – Polisi terus mengusut perbuatan cabul yang dilakukan Sugondo, warga Dusun Klampisan, Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Jombang, terhadap muridnya sendiri. Selain menghadirkan korban Bunga (bukan nama sebenarnya) di hadapan tim penyidik, polisi meminta korban lain segera melapor.

Kapolres Jombang AKBP Tribisono Soemiharso mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti bila ada laporan siswa lain yang menjadi korban mantan guru tersebut. Sebab, dengan laporan itu pihaknya bisa muda bergerak melakukan penyelidikan," sampai saat ini korban lain belum melapor," katanya.

⁸³ Jawa Pos. Minggu, 4 November 2012

Sementara itu, Ketua LP2A Jombang M. Syarifuddin menyatakan, korban pernah melihat kekurangan si guru tersebut tidak hanya kepada dirinya. Beberapa siswa lain juga pernah menjadi korban. "perbuatan intim layaknya hubungan suami istri itu sering dilakukan," ungkapnya.

Bukan hanya di kelas setelah memberikan les tambahan, perbuatan bejat tersebut juga pernah dilakukan di saf perempuan masalah setempat. Tentu saja saat situasi masalah sedang sepi atau seusai anak-anak mengaji. "ketika berusaha menolak, korban selalu dipukul dengan tangan kosong. Sehingga korban takut dan akhirnya menurut saja," beber pria yang akrab disapa Udin itu.⁸⁴

Berbeda dengan berita kekerasan diatas, berita mengenai pengajian yang diselenggarakan untuk para purel merupakan ekspresi keberagaman yang melibatkan pelaku non-ormas Islam. Berita ini berkontribusi dalam menambahi persentase jumlah berita yang terkait isu lainnya yang diperankan oleh non-ormas Islam selama periode catur wulan ketiga.

Pengajian Untuk Para Purel; Lady Mulai Gemar baca Al-Quran

Tuban, Surya – sudah sekitar tahun terakhir ini muncul aktifitas kerohanian komunitas tempat hiburan malam. Sebulan sekali, masing-masing pengelola tempat dugem yang ada menggelar pengajian yang ditujukan bagi para pekerjanya dengan mengundang seorang ustadz.

Salah satunya yang digelar di OK Karaoke. Tempat hiburan yang menyuguhkan *live* musik dangdut, *Karaoke room* dan *live DJ performance* di Jl Raya Tuban-Semarang ini memilih hari Jumat pertma setiap bulan untuk menyelenggarakan kegiatan Islam di Hal. Semua pegawai, beserta para musisi, penyanyi dangdut, sampai purel ikut dalam acara rutin itu.

"Awalnya memang canggung, tapi lama kelamaan kami terbiasa. Kami senang bisa mendapat ilmu agama dalam kegiatan seperti ini," kata Sinta (nama samarana), salah satu purel di sela ikut pengajian. Saat pengajian,

⁸⁴ Jawa Pos. Minggu, 9 Desember 2012

penampilan penampilan para pekerja malam itu pun berubah total. Mereka semua mengenakan busana muslim layaknya santri pondok pesantren.

Sang ustadz yang bertugas memberikan materi seputar pengetahuan agama, tidak pernah ganti. Yakni selalu Agus Riza Habibi, pengasuh Pondok Pesantren Asy Shomadiyah Tuban. *Saking* akrabnya, tokoh agama yang akrab disapa Gus Riza itu sekarang punya sebutan baru yakni Gus Parel.⁸⁵

Berbagai berita lain terkait dengan isu lainnya adalah sebagaimana yang dilansir oleh Jawa Pos terkait kasus pemalsuan paspor dengan judul berita "Polisi Periksa Kepala Kantor Kemenag; Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Paspor 36 CJH", sebagai berikut:

Mojokerto – Polres Mojokerto mulai menelusuri dugaan pemalsuan Paspor 36 Calon Jamaah Haji (CJH) kloter 44 dari Kabupaten Mojokerto. Kemarin dua penyidik Satreskim Polres Mojokerto mendatangi ruang kerja Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto, Ahmad Rodli.

Kedatangan petugas sekitar pukul 11.30 itu bertujuan meminta keterangan soal kebenaran temuan dugaan pemalsuan identitas paspor 36 CJH. "Kedatangan kami untuk menanyakan kebenaran dugaan pemalsuan paspor CJH," ujar Khoirul, salah seorang penyidik, kepada Rodli.

Diruang itu, dua anggota polisi tersebut ditemui Rodli sendirian. Namun, tak lama rodli didampingi Plt Kasi Pelaksanaan Haji dan Umrah Amir Solihuddin.

Petugas yang dipersilahkan di ruang tamu itu terdengar beberapa kali mencecar Rodli dengan pertanyaan. Mulai pertanyaan pembagian kuota di tingkat pusat, persyaratan CJH, tahap pelunasan, persiapan sebelum keberangkatan, sampai kepastian jumlah CJH yang berangkat tahun ini.⁸⁶

⁸⁵ Surya, Senin, 10 Desember 2012

⁸⁶ Jawa Pos, Rabu, 10 Oktober 2012

Sedangkan berita mengenai isu ekonomi syariah yang dikelompokkan dalam isu lainnya dengan pelaku non-ormas Islam adalah sebagaimana tampak dalam berita dengan judul "Keuangan Syariah; Besaran Uang Muka Ikuti Batas Konvensional" berikut:

Jakarta, Kompas – rencana pembatasan uang muka minimal untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor melalui pembiayaan lembaga keuangan syariah masih terus di godok. Aturan itu tidak hanya berlaku bagi bank syariah dan unit usaha syariah, tetapi juga lembaga pembiayaan syariah.

Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edy Setiadi menjelaskan, BI mengkaji aturan itu bersama Kementerian Keuangan. "Kalau besarnya, arahnya sama seperti konvensional," kata Edy, di Jakarta, kemarin.

BI beralasan, saat ini diperbankan syariah sudah terlihat membesarnya pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan rumah. Jika dibebaskan, dikhawatirkan berdampak buruk akibat melonjaknya pembiayaan konsumsi.

"Prinsipnya, jangan sampai aturan uang muka di perbankan konvensional ini justru menggelembungkan pembiayaan konsumsi di perbankan syariah," kata Edy.

Per Juli 2012, bank umum syariah dan unit usaha syariah membukukan pembiayaan Rp 120,91 triliun. Dari sisi porsi pembiayaan, jumlah terbesar justru di pembiayaan konsumsi, sebesar Rp 52,264 triliun. Pembiayaan modal kerja sebesar Rp 47,499 triliun dan pembiayaan investasi sebesar Rp 21,146 triliun.⁸⁷

Sedangkan berita lain yang melibatkan pelaku non-ormas Islam dari unsur pemerintahan adalah terkait berita haji yang dilansir oleh Jawa Pos dengan judul "11.360 Calon Jamaah Haji Gagal Berangkat; Tempat Digantikan Pengantre Tahun Berikutnya", sebagai berikut:

⁸⁷ Kompas, Sabtu, 8 September 2012

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan ketentuan bahwa pelunasan BPIH tahap II bukan untuk jamaah yang masuk kuota berangkat tahun ini. Melainkan untuk jamaah yang ada di daftar tunggu. Akibatnya, 11,360 calon jamaah haji kuota berangkat 2012 yang tidak bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahap ini harus gigit jari karena mereka gagal berangkat tahun ini.

Kasus ini, antara lain, mencuat di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak masyarakat yang bingung dengan sistem baru ini. Kekisruan timbul karena muncul penafsiran berbeda antara masyarakat dengan Kemenag terkait dengan mekanisme pelunasan BPIH.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat menganggap bahwa pelunasan tahap II ini digunakan juga untuk jamaah haji yang tidak bisa melunasi BPIH pada tahap I. Seperti diketahui, pelunasan tahap I dilakukan pada 27 Juli hingga 31 Agustus lalu. Pelunasan tahap II dilakukan pada 3-7 September.⁸⁸

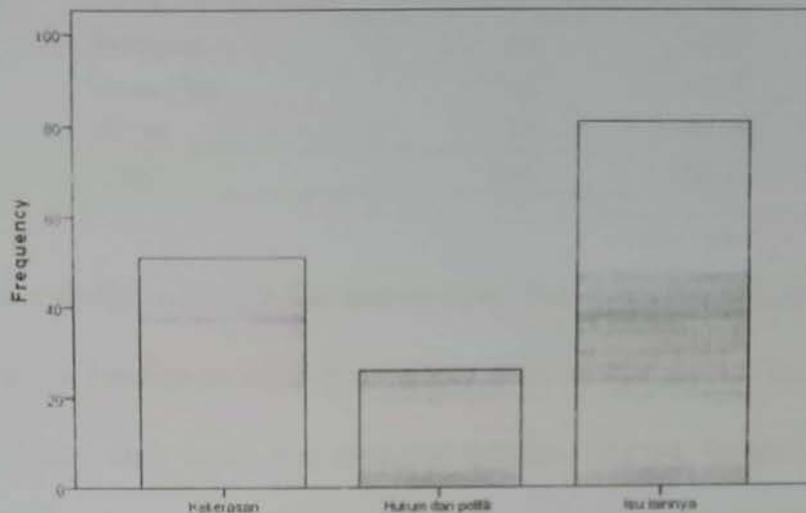
Berbagai berita baik mengenai kekerasan bernuansa terorisme, kekerasan seksual, maupun ekspresi keberagaman para maksiat merupakan serentetan berita yang menghiasi halaman-halaman media massa selama periode catur wulan ketiga (September-Desember 2012). Trend pemberitaan pada pelaku non-ormas Islam yang lebih banyak mengarah pada isu lainnya merupakan kesamaan trend yang terjadi pada dua periode catur wulan sebelumnya.

Hal yang membedakan kecenderungan kejadian pada periode ini dengan dua periode sebelumnya hanya tampak pada porsi keterlibatan pelaku non-ormas Islam pada isu kekerasan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kesimpulan pada periode ini justru memiliki trend yang sedikit

⁸⁸ Jawa Pos, Rabu, 5 September 2012

berbeda dengan periode sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana tampak dalam gambaran grafik berikut:

Bagan 11: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada September - Desember 2012



3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa

Berbagai varian berita sebagaimana diilustrasikan diatas, tampaknya Jawa Pos masih tetap mendominasi porsi pemberitaan terbesar. Fakta ini konsisten dengan apa yang terjadi pada periode catur wulan pertama dan catur wulan kedua. Sebanyak 40.6% berita yang ditampilkan oleh Jawa Pos berisi isu keislaman baik yang melibatkan pelaku ormas Islam maupun pelaku non ormas Islam dengan berbagai varian isu terkait kekerasan, hukum dan politik serta isu-isu dluar dua komponen topic tersebut.

Harian Kompas menurunkan berita mengani isu keislaman sebesar 32.0% dan hanya sebesar 27.4% Harian Surya menurnkan berita terkait isu keislmanan. Fakta yang ditam;pilkan oleh ketiga media massa ini

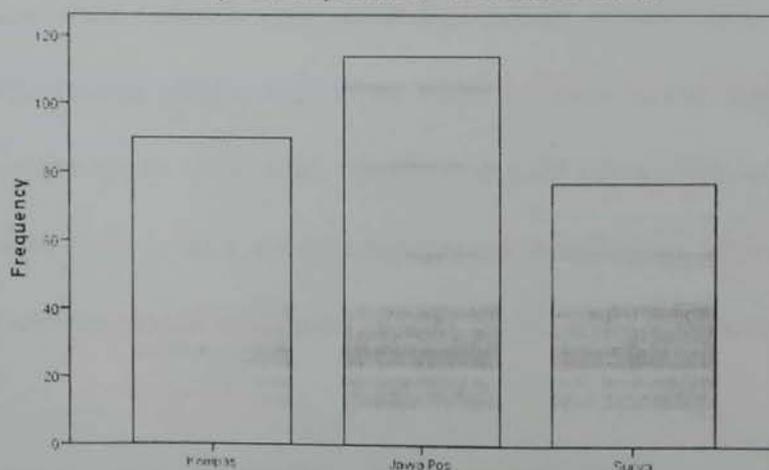
menunjukkan konsistensi dengan periode-periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam data tabel berikut:

Tabel 13: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada September - Desember 2012

Jenis Media Massa	Frequency	Valid Percent
Kompas	90	32.0
Jawa Pos	114	40.6
Surya	77	27.4
Total	281	100.0

Fakta diatas menunjukkan bahwa Jawa Pos memiliki kaitan erat dengan berbagai isu keislaman yang ditampilkan oleh media massa. Berbagai berita yang dimuat oleh Jawa Pos mengindikasikan adanya factor islam dalam berbagai kejadian dan pemberitaan. Gambaran mengenai grafik persentase pemberitaan yang dilakukan oleh media massa selama kurun periode September-desember 2012 sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 12: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada September - Desember 2012



D. Isu Keislaman di Media Massa Selama Tahun 2012

Bagian ini merupakan ringkasan kejadian selama satu tahun 2012. Karenanya, bagian ini merupakan gambaran besar dari rincian pemberitaan media massa terkait isu keislaman baik yang melibatkan pelaku ormas Islam maupun pelaku non-ormas Islam selama periode tahun 2012.

Selama tahun 2012, berita yang melibatkan ormas Islam sebesar 42.5% atau sebanyak 315 judul berita. Sedangkan berita yang terkait pelaku non-ormas Islam atau isu keislaman lainnya sebanyak 57.5% atau sebanyak 426 judul berita. Hal ini sebagaimana tampak dalam table berikut:

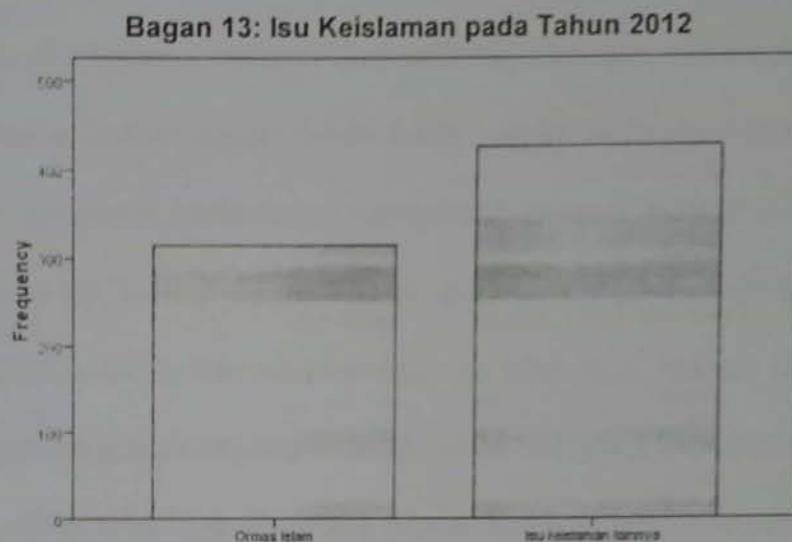
Tabel 14: Isu Keislaman pada Tahun 2012

Klasifikasi Berita	Frequency	Valid Percent
Ormas Islam	315	42.5
Isu keislaman lainnya	426	57.5
Total	741	100.0

Jika dilihat selama satu tahun periode frekwensi pemberitaan media tentang isu keislaman sejatinya masih banyak yang diperankan oleh pelaku non-ormas Islam daripada yang melibatkan pelaku ormas Islam. namun harus diakui, banyaknya pelaku non-ormas Islam ini juga terkait pada banyaknya varian komponen ini yang tidak saja terbatas pada pelaku individu, melainkan juga meluas pada pelaku institusi kenegaraan, pendidikan, ekonomi, maupun ekspresi keberagaman komunitas yang tidak dapat digolongkan dalam ormas Islam.

Merujuk pada argumentasi diatas, dapat dikatakan bahwa utuhnya pemberitaan yang melibatkan ormas Islam dan banyaknya varian berita yang melibatkan pelaku non-ormas Islam sejatinya dapat dinyatakan bahwa pelaku

ormas Islam memiliki kans besar dalam menyumbangkan berita-berita yang terkiat dengan isu kekerasan; isu hukum dan politik; maupun isu lainnya (dluar kekerasan, hukum dan politik). Gambaran mengenai kedua komponen pelaku yang diberitakan oleh media massa selama tahun 2012 ini dapat dilihat dalam grafik berikut:



1. Isu Keislaman terkait Ormas Islam

Berbicara mengenai pemberitaan yang melibatkan ormas Islam dalam kurun waktu satu tahun 2012 ini, frekwensi ormas Islam sebagai pelaku pemberitaan menempatkan isu kekerasan dalam porsi 47.6% lebih banyak jika dibandingkan dengan yang terkait isu hukum dan politik yang besarannya mencapai 42.2%. Isu lainnya yang melibatkan pelaku ormas Islam hanya memperoleh proporsi sebesar 10.2%. hal ini sebagaimana table berikut:

Tabel 15: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Tahun 2012

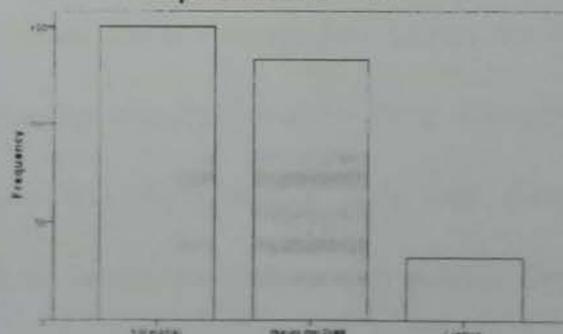
Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	150	47.6
Hukum dan Politik	133	42.2
Lainnya	32	10.2
Total	315	100.0

Berkaitan dengan data diatas, pelaku ormas Islam memiliki kecenderungan konsisten; memiliki persebaran konsisten pada tiap-tiap periode catur wulan—berkontribusi pada isu kekerasan, hukum dan politik. Ini menandakan bahwa ormas Islam lebih banyak berurusan dengan berbagai masalah kekerasan; perdamaian, kebebasan beragama, pluralism, konflik.

Selain itu, isu-isu seputar hukum dan politik juga dimainkan oleh ormas Islam. Kedekatan ormas Islam dengan isu kekerasan, hukum dan politik ini karena memang kecenderungan ormas Islam baik yang berhaluan kiri maupun kanan/radikal tidak bias dilepaskan dengan berbagai isu-isu tersebut.

Ormas Islam yang secara normatif memiliki modal social, capital dan dukungan intelektual secara mudah masuk pada wilayah-wilayah yang tidak mungkin dialami oleh pelaku individual. grafik di bawah ini memberikan gambaran proporsi yang dimainkan oleh ormas Islam dalam rekaman media massa selama tahun 2012.

Bagan 14: Topik Pemberitaan terkait Ormas Islam pada Tahun 2012



2. Isu Keislaman terkait Non-Ormas Islam (Lainnya)

Dalam hal pelaku non ormas Islam atau pelaku lainnya, berita-berita yang terkait dengan is kekerasan, hukum dan politik tampaknya tidak terlalu signifikan. Hal ini wajar, mengingat secara individu orang akan sulit melakukan berbagai bentuk kekerasan, melakukan berbagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan, melakukan berbagai diseminasi terhadap isu perdamaian, pluralism, dan harmoni sosial.

Memang harus diakui sebagian besar individu telah melakukan hal ini. akan tetapi dukungan terhadap nilai berita amatlah kurang. Sehingga perilaku-perilaku dalam lingkup topik kekerasan, hukum dan politik yang dilakukan oleh pelaku non-ormas Islam juga sulit diliput oleh media massa.

Data berikut menampilkan betapa isu lainnya yang dilakukan oleh pelaku non-ormas Islam amat mendominasi dan terpaut jauh dengan isu kekerasan, hukum dan politik yang terjadi selama tahun 2012.

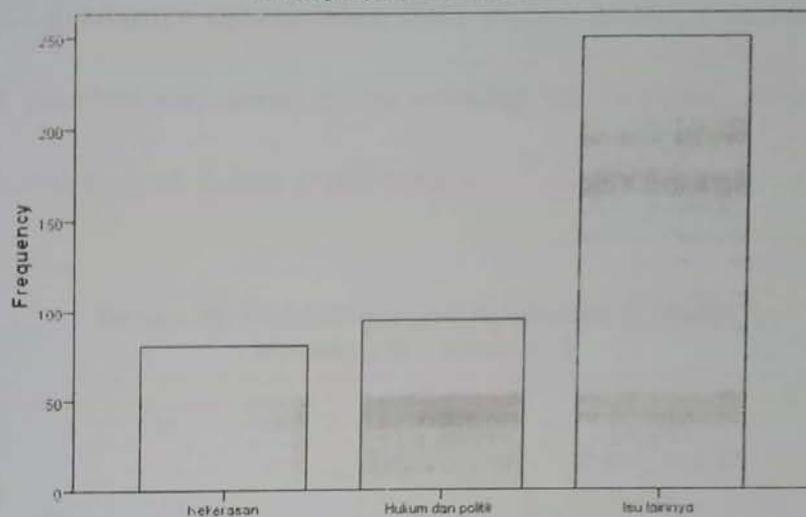
Tabel 16: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Tahun 2012

Topik Berita	Frequency	Valid Percent
Kekerasan	81	19.0
Hukum dan politik	95	22.3
Isu lainnya	250	58.7
Total	426	100.0

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa media menghendaki nilai berita tinggi terhadap kejadian-kejadian yang dianggap layak disampaikan kepada masyarakat luas. Kehadiran individu tidak mampu mengangkat nilai berita dalam ranah kekerasan, hukum dan politik. Sehingga media merasa

kurang layak menghadirkan kejadian-kejadian ini dalam halaman-halamannya. Gambaran mengenai proporsi pemberitaan media massa selama tahun 2012 terhadap isu keislaman yang melibatkan pelaku non-ormas Islam sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 15: Topik Pemberitaan terkait Isu Keislaman Lainnya pada Tahun 2012



3. Klasifikasi Jumlah Berita di Media Massa

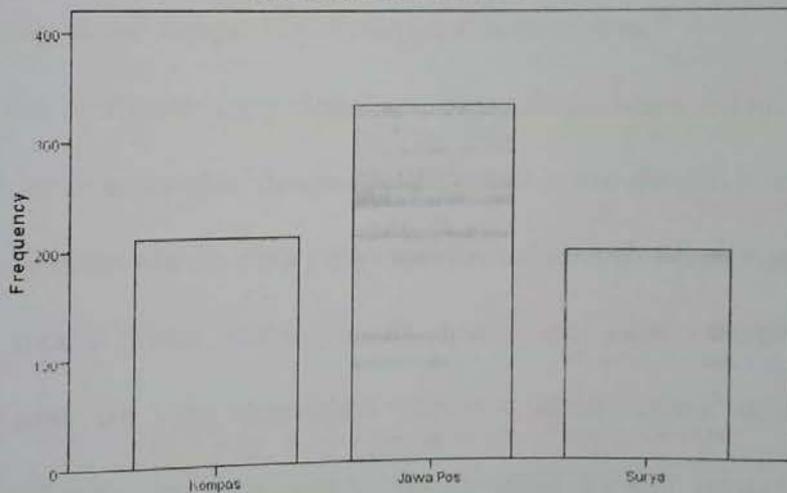
Setelah mengetahui klasifikasi berita yang ditampilkan per periode cayur wulan, dengan hasil tertinggi pemberitaan yang terkait isu keislaman adalah Jawa Pos, bagian ini juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012 media massa yang paling banyak menurunkan berita tentang keislaman adalah Jawa Pos juga.

Tabel 17: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Tahun 2012

Jenis Media Massa	Frequency	Valid Percent
Kompas	211	28.5
Jawa Pos	333	44.9
Surya	197	26.6
Total	741	100.0

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 44.9% Jawa Pos melansir berbagai berita terkait isu keislaman baik yang melibatkan pelaku ormas Islam maupun pelaku non-ormas Islam. peringkat kedua disusul oleh pemberitaan harian Kompas dengan proporsi berita sebesar 28.5%. Sedangkan pada peringkat ketiga diduduki oleh Harian Surya yang hanya menurunkan berita terkait isu keislaman selama tahun 2012 sebesar 26.6%. Gambaran mengenai proporsi pemberitaan media massa terhadap isu keislaman selama tahun ini sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Bagan 16: Pemberitaan Isu Keislaman di Media Massa pada Tahun 2012



BAB IV

TREND ISU KEISLAMAN DAN ORMAS ISLAM TAHUN 2012

Merujuk pada paparan dalam bab sebelumnya, bab ini hendak melihat trend yang ditampilkan oleh media massa selama tahun 2012 dengan membandingkan proporsi pemberitaan yang terjadi selama tiga periode catur wulan (Januari-April, Mei-Agustus, dan September-Desember).

Perbandingan ini ingin menunjukkan bahwa isu-isu yang dirilis oleh media massa merupakan isu-isu yang dapat mempengaruhi trend kejadian-kejadian di masa mendatang. Kecenderungan pemberitaan media massa umumnya terkait dengan sisi kemenarikan kejadian, sehingga setiap media memiliki sudut pandang masing-masing sesuai dengan visi media yang diembannya.⁸⁹

Trend isu keislaman yang dimainkan oleh Ormas Islam dalam pembahasan ini hanya akan dibandingkan dengan antara ormas Islam dengan yang non ormas Islam. sebagaimana olahan data yang terdapat dalam bab sebelumnya, trend isu keislaman antara ormas Islam dengan non-ormas Islam tampaknya masih didominasi oleh isu yang dimainkan oleh non ormas Islam. dalam table 14 digambarkan bahwa isu yang terkait ormas islam selama tahun 2012 hanya berkisar 42.5% atau sebanyak 315 judul berita. Ini berbeda dengan isu yang dimainkan oleh non-ormas Islam yang jumlahnya mencapai 57.5% atau sebanyak 426 judul berita dari total 741 judul berita.

⁸⁹ Penjelasan mengenai pers dan pergulatannya dalam memperjuangkan visi media dapat dibaca lebih lanjut misalnya, Steele, *Wars Within*.

Jika melihat trend isu keislaman yang dimainkan oleh ormas Islam pada masing-masing periode, tampaknya dalam periode pertama isu yang melibatkan ormas Islam ini yang paling banyak, yakni sebesar 54.5%, disusul kemudian pada periode ketiga yang jumlahnya mencapai 43.8% dan terakhir ditempati oleh periode kedua dengan porsi sebesar 32.1%, sebagaimana tampak dalam table di bawah:

Tabel 18: Perbandingan Proporsi Berita Keislaman 2012

Klasifikasi Berita	Periode I		Periode II		Periode III	
	Q'ty	%	Q'ty	%	Q'ty	%
Ormas Islam	108	54.5	84	32.1	123	43.8
Non-Ormas Islam	90	45.5	178	67.9	158	56.2

Jika melihat trend yang ditampilkan table diatas, isu keislaman yang melibatkan ormas Islam tampaknya hanya menguat pada periode pertama. Pada periode ini, isu ormas Islam melebihi isu non-ormas Islam dengan 108 judul berita.

A. Potensi Kekerasan dalam Ormas Islam

Sebagaimana paparan di awal bab ini dan kesimpulan masing-masing item uraian dalam bab sebelumnya, isu kekerasan yang melibatkan ormas Islam memiliki dominasi yang tinggi. Dominasi mengenai berbagai bentuk kekerasan dan sebaliknya ini dimungkinkan oleh banyaknya organisasi masyarakat ini yang memiliki modal social, modal capital, dan modal pengetahuan sebagai bagian dari nilai yang dikembangkan oleh organisasi.

Beberapa pemberitaan media massa menunjukkan bahwa kekerasan-kekerasan yang dimunculkan oleh ormas Islam umumnya dilakukan oleh

kelompok islam radikal, yakni gerakan keislaman yang memegang teguh ajaran Islam tanpa mentransformasi ke dalam dialektika sosial keindonesiaan.

Model-model gerakan yang dilakukan oleh FPI, kelompok jaringan terorisme merupakan bagian tak terpisahkan dari berita media massa manakala meliput is kekerasan. Berbeda dengan kekerasan dalam bentuk aksi yang dilakukan oleh ormas radikal ini, Ormas semacam NU dan Muhammadiyah tergolong dalam kelompok tema kekerasan bukan karena mereka melakukan tindakan anarkhi, melainkan lebih pada upayanya menyerukan anti kekerasan dan penyemaian formulasi perdamaian.

Tabel 19 di bawah ini menunjukkan bahwa trend kekerasan yang dimainkan oleh ormas Islam menempati proporsi yang hamper berimbang dengan isu hukum dan politik.

Tabel 19: Perbandingan Topik Berita Ormas Islam 2012

Topik Berita	Periode I		Periode II		Periode III	
	Q'ty	%	Q'ty	%	Q'ty	%
Kekerasan	42	38.9	37	44.0	71	57.7
Hukum dan Politik	54	50.0	33	39.3	46	37.4
Lainnya	12	11.1	14	16.7	6	4.9

Deretan angka 38.9% untuk periode pertama, 44.0% untuk periode kedua, dan 57.7% untuk periode ketiga merupakan angka yang cukup tinggi bagi ormas Islam dalm keterlibatannya dengan isu kekerasan. Perjumpaan ormas dengan isu kekerasan ini jika dibandingkan dengan pelaku non ormas Islam proporsinya terpaut jauh. Dalam table 20 di bawah disebutkan perilaku non-ormas Islam yang terlibat dalam isu kekerasan tak lebih dari 35% sebagaimana tampak dalam kejadian-kejadian yang terrekam oleh media

massa pada periode ketiga. Hal ini menandakan bahwa kekerasan menjadi sangat rasional jika bersanding dengan komunalitas.

B. Ormas Islam dalam Pusaran Dinamika Politik

Sebagaimana dijelaskan diatas, dinamika politik di negeri ini juga tak luput dari peran ormas. Peran ini dapat berupa antitesa maupun sintesa pergerakan politik negeri. Ormas Islam, karena kekuatannya di tingkat *grassroot* dapat dengan mudah dibidik oleh kelompok politik tertentu. Sebaliknya, karena merasa memiliki kekuatan besar, ormas Islam juga tak segan-segan memasukkan berbagai kepentingannya dalam proses politik.

Pergulatan Ormas dalam berbagai perubahan social Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memberikan gambaran bahwa ormas merupakan kunci bagi keberhasilan proses konsolidasi demokrasi dan peradaban. Gambaran mengenai kedekatan ormas dalam berbagai isu politik dan hukum sebagaimana tampak dalam tabel 19 adalah gambaran nyata bahwa media massa melihat ormas sebagai obyek berita yang memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca.

Data yang menunjukkan angka 50.0% pada periode pertama, 39.3% pada periode kedua, dan 37.4% pada periode ketiga tentang keterlibatan ormas Islam dalam isu hukum dan politik memberi arti ormas masih menjadi incaran media dan karenanya juga berkontribusi dalam mendorong berbagai proses politik di Indonesia.

Memang, jika dibandingkan dengan isu kekerasan, isu hukum dan politik menempati porsi kedua kaitannya dengan pemberitaan media massa tentang

isu keislaman yang melibatkan ormas Islam. Dengan demikian tidak salah jika menyimpulkan ormas Islam memiliki kedekatan dengan pusaran politik Indonesia.⁹⁰

C. Pelaku Non-Ormas Islam dalam Berbagai Ekspresi Keislaman

Berbeda dengan isu-isu media yang melibatkan ormas Islam, isu-isu yang melibatkan non-ormas Islam justru tidak banyak menggambarkan kaitannya antara kekerasan, hukum dan politik. Isu-isu yang ditangkap oleh media massa justru lebih banyak berkaitan dengan isu-isu ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan berbagai turunan masalahnya, serta isu-isu ekspresi keberagamaan.

Gambaran mengenai pemberitaan media massa terkait dengan isu-isu tersebut telah diuraikan secara luas dalam bab sebelumnya. Sehingga, bab ini hanya ingin memberikan penyimpulan terhadap temuan-temuan faktual yang terkait dengan pelaku non-ormas Islam.

Data perbandingan sebagaimana dalam table 20 di bawah ini menunjukkan bahwa perilaku non-ormas Islam telah dipotert oleh media sebanyak 74.4% pada periode pertama, 57.3% pada periode kedua, dan 51.3% pada periode ketiga. Semua isu yang melibatkan pelaku non-ormas Islam dalam isu diluar kekerasan, hukum dan politik rata-rata melebihi angka 50% untuk tiap-tiap periodenya.

⁹⁰ Berbagai fakta sejarah keterlibatan organisasi masyarakat Islam dapat dilihat dalam banyak artikel maupun buku sejarah. Perjuangan yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah ada salah satu contoh praktis sumbangan ormas bagi dinamika perpolitikan Indonesia

Sama halnya dengan ormas Islam yang lebih dominan pada isu kekerasan, hukum dan politik, non ormas Islam menampilkan isu-isu yang sifatnya individual. Individualitas ini justru sangat langka mampu dipotret oleh media kecuali hanya isu tersebut betul-betul memiliki nilai berita tinggi.

Individu jarang dapat menjadi obyek berita yang bagus, mengingat peran individu jika tidak bersinggungan dengan komunalitas juga tidak mampu menyentuh pembaca media bersangkutan. Artinya memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan individu amatlah jarang dapat tersentuh oleh liputan media massa.

Tabel 20: Perbandingan Topik Berita Non-Ormas Islam 2012

Topik Berita	Periode I		Periode II		Periode III	
	Q'ty	%	Q'ty	%	Q'ty	%
Kekerasan	7	7.8	23	12.9	51	32.3
Hukum dan politik	16	17.8	53	29.8	26	16.5
Isu lainnya	67	74.4	102	57.3	81	51.3

Dari table diatas, selain factor individu yang diperankan oleh entitas non-ormas Islam, isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun ekonomi dan pendidikan, bukanlah isu menarik yang bias dengan begitu saja menjadi mangsa pemberitaan media massa.

Dengan tingkat kesulitan yang tinggi tersebut, perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh non-ormas Islam ini sesungguhnya memberikan makna bahwa pelaku non-ormas Islam kurang dapat menyumbangkan isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan ataupun hukum dan politik.

Jadi, temuan berkaitan dengan poin ini adalah bahwa non-ormas Islam lebih banyak menyumbangkan berita di media massa tidak dalam kerangka

yang membahayakan alias hanya butuh diliput untuk menghiasi halaman-halaman media massa dan tidak berimplikasi pada proses pencegahan. Isu-isu non-ormas Islam merupakan isu yang masih dalam batas kewajaran sehingga tidak perlu diantisipasi secara ketat. []

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan mengenai Trend ormas Islam dan Isu keislaman tahun 2012 diatas, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Isu keislaman tahun 2012 lebih banyak memberitakan tentang isu yang terkait dengan pelaku non-ormas Islam. meski demikian, mengingat is non-ormas Islam memiliki banyak variabel, isu ormas Islam dapat dikatakan sebagai is yang menempati porsi paling banyak diberitakan oleh media massa.
2. Isu-isu yang melibatkan ormas islam sebagai organisasi sosial banyak dijumpai berkaitan dengan tema kekerasan. Tema kekerasan disini tidak terbatas pada aksi dan tindak kekerasan yang melibatkan ormas, melainkan juga is-isu perdamaian, pencegahan pada tindak kekerasan dan resolusi konflik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ormas Islam
3. Disamping isu kekerasan, yang juga berpusat pada ormas Islam adalah isu seputar hukum dan politik. Isu ini meskipun menempati posisi kedua dalam kaitan ormas Islam merupakan isu yang banyak dijumpai terutama dalam kontestasi politik tertentu.
4. Adapaun isu diluar tema kekerasan serta tema hukum da politik, lebih banyak diperankan oleh non-ormas Islam. isu ini cukup banyak meliputi antara lain semua isu ekspresi keberagamaan dan isu-isu yang melibatkan individu, ataupun isntitusi pemerintahan. Adapun isu-isu yang mendukung

banyaknya pemberitaan ormas Islam juga termasuk isu perbankan syariah, isu bidang pendidikan dan persekolahan serta isu kesehatan.

B. Implikasi

Dari simpulan diatas hal-hal yang menarik untuk diantisipasi berdasarkan analisis dari rekaman berita yang dilansir oleh media massa adalah berkaitan dengan ormas Islam. entitas ini memiliki daya dukung yang cukup kuat untuk menjadi bahan berita ataupun aksi pergerakan social lainnya.

Ormas Islam hendaknya ditempatkan sebagai media pergerakan perubahan social yang dapat bekerja dan bergerak secara santun, tanpa menimbulkan tindak kekerasan. Penguatan ormas dalam ranah hukum dan politik masih sangat diperlukan bagi proses dan dinamika perubahan keadaan yang lebih baik. harus diakui keberadaan ormas berkontribusi nyata dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberangus ormas dengan cara-cara seperti menertibkan menggunakan UU Ormas adalah langkah yang perlu dikoreksi sehingga tidak menimbulkan berbagai kontrovesi di masyarakat. []

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Mohammad dan Marpuji Ali, "Filsafat Pendidikan Muhammadiyah; Tinjauan Historis dan Praksis," *Tajdid*, Vol. 2 No 2, (2004).
- Anam, Choirul *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Bisma Satu, 1999); Lihat pula Andre Feillard, *NU vis a vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Anggaran Dasar Hasil hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985
- Asy'ari, Suaidi "A Real threat from within; Muhammadiyah's Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2007): 18-41.
- Azhari, Añif. "Majalah Al-Muslimun dalam Wacana Relasi Islam dan Negara; Studi Analisis Isi terhadap Pemberitaan dan Artikel-artikel Majalah Al-Muslimun tahun 1998-2001" *Antologi Kajian Islam*, Seri 4. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Biyanto. "Pluralism Discourse; the Views of Young Muhammadiyah Intellelectuals." *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 3, No. 2 (2009): 314-340
- Buehler, Michael. "Islam and Democracy in Indonesia." *Inside Turkey*, Vol. 11, No. 4 (2009).
- Chisaan, Choirotun. *Leshumi*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Chodjim, Achmad. *Sunan Kalijaga*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama' dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hasan, M. Nur. *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam Upaya Pemberdayaan Civil Society*. Yogyakarta: Manhaj, 2010
- Hidayat, Syamsul "Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya," *Tajdid*, Vol. 9, No. 1 (2011), 61.
- <http://pelitaonline.com/opinions/ruu-ormas-antra-idialisme-dan-realita> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)
- <http://www.annah.com/news/2013/04/09/mengapa-kita-harus-> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/30/mp7pkv-a> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)
- <http://www.tempo.co/read/news/2005/01/12/05554834/Relawan-FPI-Tidur-di-Kuburan>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492975/RUU-Ormas> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

<http://www.tempo.co/topik/lembaga/45/Front-Pembela-Islam--FPI>.

<http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2013/06/27/25509/in>. (diakses pada tanggal 22 Oktober 2013)

Iskandar, A. Muhaimin. *Momentum untuk Bangkit: Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik, dan Keagamaan*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Jahroni, Jajang. *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003*. Washington: University of Washington Press, 2008.

Jawa Pos, 10 Oktober 2012

Jawa Pos, 12 September 2012

Jawa Pos, 15 Agustus 2012

Jawa Pos, 18 April 2012

Jawa Pos, 19 Januari 2012

Jawa Pos, 19 Juni 2012

Jawa Pos, 21 Pebruari 2012

Jawa Pos, 22 Juni 2012

Jawa Pos, 27 Januari 2012

Jawa Pos, 27 Maret 2012

Jawa Pos, 28 Juni 2012

Jawa Pos, 28 November 2012

Jawa Pos, 4 November 2012

Jawa Pos, 5 September 2012

Jawa Pos, 6 Januari 2012

Jawa Pos, 9 Desember 2012

Jawa Pos, 9 Oktober 2012

Jawa Pos, 8 Pebruari 2011

Jawa Pos, 8 Pebruari 2011

Kompas, 13 Maret 2012.

Kompas, 14 Agustus 2012

Kompas, 23 Juni 2012

Kompas, 25 Oktober 2012

Kompas, 30 Agustus 2012

Kompas, 4 Oktober 2012

- Kompas. 8 Agustus 2012
- Kompas. 8 September 2012
- Kompas. Sabtu 17 Januari 2012
- Luwarso. Lukas. dkk, *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2008.
- Muhadjir. Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik dan realisme Metaphisik telaah studi teks dan penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Serasin, Edisi III, 1999.
- Muzadi. Abdul Muchit. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Muzakki. Akh. dkk. *Pilkada dan Civil Society; dari Harmoni ke Fragmentasi*. Surabaya: Yayasan Percik bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur, 2011.
- Nasir. M. Ridlwan. "Live in Destiny or Die as Martyr: The Venture of Front Pembela Islam (FPI) in Contemporary Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 1 (2008).
- Niam. Khoirun. "Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Media Massa tahun 2011," Laporan Penelitian tidak dipublikasi. Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Pausacker. Helen. "Playboy, the Islamic Defenders' Front and the Law; Enforcing Islamic Norms in Post-Soeharto Indonesia?." *Australian Journal of Asian Law*. Vol 13, No 1 (2012).
- Pranowo. M. Bambang. *Orang Jawa jadi Teroris*. Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan LaKIP, 2011.
- Saleh, Fauzan. "the school of ahl al-sunnah wa al jama'ah and the attachment of Indonesian Mislms to its doctrines." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2. No. 1 (2008).
- Steele, Janet. *Wars Within; Pergulatan Tempo, Majalah Berita sejak Zaman Orde Baru*. terj. Arif Zulkifli. Jakarta: Dian Rakyat, 2007.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surya. 10 Desember 2012
- Surya. 17 Januari 2012
- Surya. 19 Januari 2012
- Surya. 23 April 2013
- Surya. 23 Januari 2012
- Surya. 27 Januari 2012
- Surya. 29 Desember 2012
- Surya. 29 Juli 2012
- Surya. 3 Agustus 2012

Surya. 30 Desember 2012

Surya. 6 April 2012

Surya. 31 Maret 2011

Surya. 31 Maret 2011

Surya. 11 Agustus 2012

Syam, Nur. *Tarekat Petani; Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Yakin, Haqqul. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.

Zain, Fathurin. *NU Politik: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKiS, 2004.



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR : In.02/1/PP.00.9/ 292 /PI/ 2013
TENTANG
BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU, KOLEKTIF, KOMPETITIF DAN UNGGULAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2013
REKTOR IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian individu, kolektif, kompetitif dan unggulan di lingkungan IAIN Sunan Ampel, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian yang dimaksud;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian tahun anggaran 2013
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sunan Ampel ;
4. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel tahun 2012, Nomor : In.02.1/ PP.00.9/917/ P/ 2012, tanggal 10 September 2012;
5. Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel, No. : In.02/1/KU.00/06A/P/2013 tanggal 03 Januari 2013, Tentang Standard Biaya Satker BLU IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2013.
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU (DIPA-BLU) IAIN Sunan Ampel Nomor : DIPA-025.04.2.423770/2013, tanggal 05 Desember 2012 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU, KOLEKTIF KOMPETITIF, DAN UNGGULAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2013
- Pertama : Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Keputusan Rektor Nomor: In.02/1/PP.00.9/209a/P/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Bantuan Penelitian Individu, Kolektif, Kompetitif, dan Unggulan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013
- Kedua : Memberikan bantuan penelitian Individu yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), bantuan penelitian kolektif sebagaimana pada Lampiran II surat keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah); bantuan penelitian kompetitif sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); bantuan penelitian unggulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Ketiga : Pencairan Bantuan Penelitian tersebut dilakukan secara bertahap melalui rekening penerima bantuan, tahap pertama untuk bantuan penelitian individu Rp.5.000.000,- , untuk bantuan penelitian kolektif Rp. 12.500.000,- untuk bantuan penelitian kompetitif Rp. 25.000.000,- dan untuk bantuan penelitian unggulan Rp. 25.000.000,- Tahap kedua untuk bantuan penelitian individu Rp.5.000.000,- untuk bantuan penelitian kolektif Rp. 12.500.000,- bantuan penelitian kompetitif Rp. 25.000.000,- dan bantuan penelitian unggulan Rp. 25.000.000,- , bantuan dibayarkan (Lunas) setelah penerima bantuan menyerahkan Laporan hasil penelitian;
- Keempat : Kepada penerima bantuan penelitian harus menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Lembaga Penelitian selambat-lambatnya pada tanggal 22 Nopember 2013;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2013

A.n. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Rejabat Pembuat Komitmen
Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel



M. Zumrotul Mukaffa
NIP. 1970101519970320014

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AKU IAIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran IAIN Sunan Ampel, Surabaya;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL

NOMOR : In.02/1/PP.00.9/ 292 /P/ 2013

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013

TENTANG

BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2013

NAMA	FAKULTAS	NAMA	JUMLAH
Drs. Mustofa Huda, SH., M.Ag	Tarbiyah	Paham Ittihad dan Hulul dalam pandangan Tasawuf Al Ghazali	10.000.000
Itсна Syahadatul Dinurriyah, MA	Adab	Analisa tentang kontruksi gender dalam pertarungan Simbolik Di Media Massa	10.000.000
Suyikno, S.Ag., M.H	Syari'ah	Transformasi Konflik Pasca Kerusakan Sunni-Syiah Masyarakat Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur	10.000.000
Zaky Ismail, M.Si	Ushuluddin	Ahmadiyah di Lombok (Studi tentang pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak sipil jemaat Ahmadiyah di Mataram Pasca Adanya SKB 2008)	10.000.000
Dr. Muhammad Baihaqi, MA	Tarbiyah	Validitas Toafl (Test of Arabic as a Foreign Language) secara logis dan empiris bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampel	10.000.000
H. Abu Dzarrin aql- Hamidy, M.Ag	Syari'ah	Metode Istinbad Hukum Ahmad Al-Sharbasi dalam Karyanya Yas'alunak fi al-din wa al- Haya	10.000.000
Ismail MH. S.Sos, M.Si, Dr	Ushuluddin	Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Nelayan Tradisional di Desa Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang	10.000.000
Dra.Hj.Suqiyah Musafa'ah,MAg	Syari'ah	Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Kontekstual Ayat Waris)	10.000.000
Ali Nurdin, S.Ag., M.Si	Dakwah	KONTRUKSI KOMUNIKASI DOSEN DENGAN MAHASISWA	10.000.000
DR. Ahmad Nur Fuad, MA	Adab	Respon Ulama Syi'ah terhadap Revolusi Konstitusional 1906-11 di Iran ; Suatu Tinjauan Sosio - Historis	10.000.000
Dr. Achmad Faizur Rosyad, M.ag	Adab	Sejarah Dan Karakteristik Diakritik Mushaf Maghrigi, Arab Saudi Dan Indonesia (Studi Perbandingan)	10.000.000
Dr. Phil. Khoirul Niam	Tarbiyah	Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa tahun 2012	10.000.000
Drs. Masyhudi, M.Ag	Adab	Manuskrip Dala'il Al-Khairat dari Sidayu Gresik (Kajian Hubungan antar kebudayaan terhadap Sharif Ahmad	10.000.000
Dr. Ali Maksun, M.Ag., M.Si	Tarbiyah	Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf	10.000.000
Dr. H. M. Shodiq, S.Ag, M.Si	Dakwah	Generasi Online di IAIN Sunan Ampel Surabaya	10.000.000
Aun Falestien Faletehan, MHRM	Dakwah	Analisa Training dan Developmen Bagi Dosen-Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya	10.000.000
Moh. Faizin, S.Ag., M.Pd.I	Tarbiyah	Pengembangan Perangkat Pembelajaran terpadu tipe webbed berbasis pemecahan masalah pada kelas X di MA Nurul Jadid Probolinggo	10.000.000
Drs. M. Taqwm Suji, M.PdI	Dakwah	Dakwah dan Entrepreneurship (Analisa Isis Materi Ceramah Da'1 Yusuf Mansur)	10.000.000
Abdulloh Ubet, M.Ag	Adab	Kualitasa Hadith-Hadith Tentang Nikah Mut'ah	10.000.000
Drs. H. Noor Ahmadi, M.Si	Dakwah	Pesantren Dan Kewira Usahaan (Studi peran pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausahawan Mandiri	10.000.000
Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A	Ushuluddin	Khitlan Wanita dalam perspektif Hadis	10.000.000
Dr. H. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag.	Tarbiyah	Dialektika Aliran Sunni di Indonesia	10.000.000
Dr. Imam Amrusi Jaelani, MAg	Syan'ah	Rekonstruksi fikih yang sederhana dan relevan dengan realitas kekinian	10.000.000
Moch. Choirul Arif, M.Fil.I	Dakwah	Tingkat Literasi Media Berbasis Kompetensi Individual Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya	10.000.000
Dr. Khoirul Yahya, M.Si	Ushuluddin	Evaluasi Kebijakan Program Kemiskinan untuk Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo	10.000.000
Drs. Tasmuji, M.Ag	Ushuluddin	Eksistensi Tuhan Dalam Pandangan Aliran Kepercayaan Dan Kebatlanan	10.000.000
Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I	Tarbiyah	Studi Komparasi Integrasi Keilmuan Berbasis Islamisasi Ilmu Dengan Integrated Twin Tower	10.000.000